

**PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
PERENCANAAN PARTISIPATIF**

**(Studi Kasus pada Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan
Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister**



Oleh

**KUNTARTA
NIM. 18603011111013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

Lembar Pengesahan

TESIS

**PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN PARTISIPATIF
(Studi Kasus Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia
Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Oleh:

Kuntarta

NIM.186030111111013

telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 18 Desember 2019
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Irwan Noor, MA

NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota

Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si

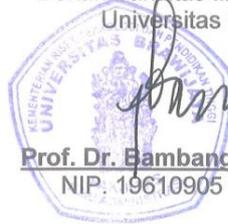
NIP. 19710505 199903 2 001

Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik

Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA

NIP. 1971013 200003 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

NIP. 19610905 198601 1 002



IDENTITAS PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS**JUDUL TESIS:**

**PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
PERENCANAAN PARTISIPATIF
(STUDI KASUS PADA PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA
PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**

Nama Mahasiswa : Kuntarta
NIM : 186030111111013
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Minat : Perencanaan Pembangunan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Dr. Irwan Noor, MA
Anggota : Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Farida Nurani, S.Sos, M.Si
Dosen Penguji 2 : Fadillah Putra, S.Sos, M.Si., MPAff., Ph.D

Tanggal Ujian : 18 Desember 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis yang berjudul "Perencanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus pada Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta)" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 18 Desember 2019
Mahasiswa



Nama : Kuntarta
NIM : 186030111111013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

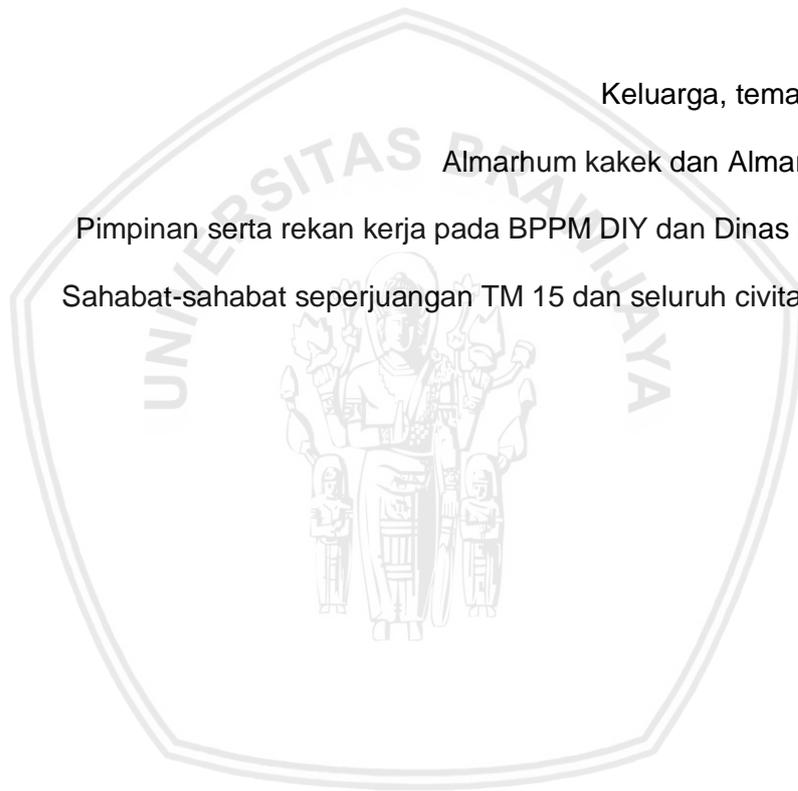
Orang tua,

Keluarga, teman, sahabat,

Almarhum kakek dan Almarhum kakak

Pimpinan serta rekan kerja pada BPPM DIY dan Dinas P3AP2 DIY

Sahabat-sahabat seperjuangan TM 15 dan seluruh civitas MIAP UB



UCAPAN TERIMA KASIH

Proses penyelesaian penyusunan Tesis ini sudah tentu melibatkan peran banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dalam memberikan ide, arahan, bimbingan, kritik dan saran serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan lancar. Melalui lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Firda Hidayati, S.Sos., M.PA., D.PA., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Irwan Noor, MA, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ide, arahan, saran dan masukan dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Farida Nurani, S.Sos, M.Si dan Bapak Fadillah Putra, S.Sos, M.Si., MPAff., Ph.D selaku dosen dan sekaligus Tim Penguji yang telah memberikan kritikan, saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya dan seluruh staf Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan pengetahuan, pemikiran dan bantuan selama kegiatan perkuliahan.



7. Kepala Pusbindiklatren Bappenas beserta jajarannya yang telah memberikan beasiswa selama penulis menempuh pendidikan program magister di Universitas Brawijaya.
8. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan instansi asal penulis.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani pendidikan program magister di Universitas Brawijaya.
10. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah mendoakan dan memberi motivasi demi keberhasilan selama menempuh pendidikan.
11. Rekan-rekan *Tailor Made 15* Bappenas yang merupakan keluarga baru tempat saling berdiskusi, saling menguatkan dan saling membantu satu dan lainnya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam pendidikan ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini,

Malang, 18 Desember 2019

Penulis

RINGKASAN

Kuntarta, NIM. 18603011111013 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2019. Perencanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta). Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Irwan Noor, MA, Anggota: Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si.

Latar Belakang penelitian ini adalah untuk mewujudkan pemenuhan kondisi dasar dalam membangun kesetaraan gender, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2004 menetapkan kebijakan membentuk sebuah model desa yang diberi nama "Perempuan Indonesia Maju Mandiri" atau PRIMA. Salah satu provinsi yang menjadi *pilot project* Desa PRIMA adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan pada tahun anggaran 2008. Mulai tahun 2009 hingga 2019, kegiatan Desa PRIMA dibiayai sendiri oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada akhir 2018 telah terbentuk 83 Desa PRIMA. Untuk melihat kualitas sebuah program dan kegiatan, maka bisa dilihat pada perencanaannya. Karena dalam sebuah perencanaan, terkandung pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Sayangnya, untuk perencanaan pengembangan Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terlihat sebagai perencanaan yang rutinitas dan semua desa mendapatkan perlakuan yang sama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah perencanaan pengembangan Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta? dan Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa perencanaan pengembangan Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014).

Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pengembangan Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terlihat sebagai rutinitas. Hal ini dapat terjadi karena perencanaannya lebih menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis daripada perencanaan partisipatif. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dari empat unsur perencanaan yang terdiri dari : (1) sumber masalah berbasis data, ternyata untuk unsur ini belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan data profil Desa PRIMA seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini belum ada; (2) tujuan perencanaan, unsur ini sudah terpenuhi untuk mendukung pencapaian visi misi Gubernur; (3) program yang dikembangkan, unsur ini sudah terpenuhi karena program diturunkan dari visi dan misi Gubernur di dalam mencapai kualitas hidup masyarakat Yogyakarta melalui program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan; (4) Identifikasi aktor-aktor, ternyata unsur ini juga belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik yang hanya melibatkan aktor-aktor dari pemerintah provinsi dan kabupaten sedangkan aktor dari desa sasaran kurang dilibatkan sejak proses perencanaan.

Untuk aspek pengembangan Desa PRIMA telah dilakukan sebagai berikut (1) aspek permodalan, dengan memberikan bantuan keuangan melalui skema hibah; (2) aspek manajemen, sudah dilakukan dengan memberikan pelatihan manajemen organisasi dan keuangan; (3) aspek teknologi dan inovasi, dengan memberikan pelatihan inovasi untuk kemasan produk dan pelatihan Higienes. Sayangnya belum ada pengenalan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) aspek pemasaran, baru menyentuh pada aspek peningkatan informasi pasar melalui kegiatan pameran dan publikasi di media cetak dan televisi. Masih diperlukan kegiatan untuk pengembangan atau perluasan konsumen sasaran.

Terdapat empat faktor pendukung perencanaan pengembangan Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri yaitu: (1) faktor lingkungan, kebijakan Desa PRIMA dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (2) faktor sistem yang digunakan dengan menggunakan *cascade* dalam perencanaan di Pemda DIY, (3) faktor perkembangan ilmu dan teknologi karena Pemda DIY sudah menggunakan aplikasi perencanaan Jogja Plan. dan (4) faktor pendanaan, yang selalu naik setiap tahunnya. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah faktor sumber daya manusia perencana karena tidak memiliki staf perencana, yang ada jabatan fungsional yang diperbantukan sebagai staf perencana.

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Pemberdayaan Perempuan, Desa PRIMA, Daerah Istimewa Yogyakarta



SUMMARY

Kuntarta, NIM. 186030111111013 Master of Public Administration Program, Faculty of Administrative Sciences Brawijaya University, 2019. *Women's Empowerment Planning in The Perspective of Participatory Planning (Case Study of Women's Advanced Village (Desa PRIMA) Development Planning in Yogyakarta)*. Advisory Commission, Chairperson: Dr. Irwan Noor, MA, Member: Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si.

The background of this research is to realize the fulfillment of basic conditions in building gender equality, then the State Ministry for Women's Empowerment in 2004 set a policy of establishing a village model named "Advanced Indonesian Women's Village" or "Desa PRIMA". One of the provinces which became the pilot project Desa PRIMA was the Yogyakarta Special Region which was carried out in 2008 with the target of eight villages spread across four regencies in the Yogyakarta Special Region. From 2009 to 2019, the Desa PRIMA program was self-financed by the Government of the Special Region of Yogyakarta and at the end of 2018, eighty-three Desa PRIMA were formed. After the formation of the Desa PRIMA, the next step is development. It is intended that the Desa PRIMA does not stop at only its formation. To assess the quality of a program and activity, planning must be considered. Because in planning, contained guidelines for the implementation of activities aimed at achieving development goals. Unfortunately, for the Desa PRIMA development plan in the Yogyakarta Special Region, it still looks like routine planning because it only repeats from year to year and all villages get the same treatment.

The problem formulations in this research: How is the development plan of Desa PRIMA in Yogyakarta Special Region so far? And What are the supporting factors and obstacles to the planning of Desa PRIMA development in Yogyakarta Special Region? The objectives of this research: to describe and analyze the Desa PRIMA development planning in the Yogyakarta Special Region and describe and analyze the supporting and inhibiting factors for the Desa PRIMA development planning in the Yogyakarta Special Region.

This research method is a qualitative approach for case study research. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis using interactive model data analysis of Miles and Huberman (2014).

The results showed that the Desa PRIMA development planning in Yogyakarta Special Region was still seen as a routine. This can occur because of the four elements of planning consisting of (1) data-based problem sources, (2) planning objectives, (3) programs developed and (4) identification of actors/subjects. It turns out, the planning and identification of problems in Desa PRIMA was not based on data. This condition was due to the lack of profile data of Desa PRIMA, whereas in planning, problems must be based on data. For the development aspect of the Desa PRIMA, maximum efforts had been done on the capital and management aspects. Unfortunately, for the other aspects technology



and innovation aspects had not been optimally implemented because the use of appropriate technology for production and marketing innovation through social media had not been done. The marketing aspect which is the main problem also had not been carried out maximally because the activity was only an exhibition. There are four factors supporting the development planning of Desa PRIMA in the Yogyakarta Special Region consisting of: (1) environment, (2) system used, (3) development of science and technology and (4) funding. Meanwhile, the inhibiting factor is the human resource planner because it did not have planning staff, there were only functional staffs that were positioned as planning staff.

Keywords: Participatory Planning, Women's Empowerment, PRIMA Village, Yogyakarta Special Region



RIWAYAT HIDUP

Kuntarta, lahir pada tanggal 23 Juni 1982 di Bantul, Yogyakarta, anak bungsu dari lima saudara pasangan Widyo Sumarto dan Ngaidah. Pendidikan Formal mulai tingkat dasar sampai menengah atas di tempuh di Yogyakarta. Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK/Sosiatri) diperoleh dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2005. Mulai tahun 2011 hingga saat ini penulis bekerja sebagai PNS dalam jabatan Calon Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Malang, 18 Desember 2019

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian penyusunan Tesis yang berjudul "Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Tesis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Adapun konten dari Tesis ini terdiri 6 (enam) Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Analisa *Social Setting* Lokasi Penelitian, Bab IV Metode Penelitian, Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab VI Penutup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak agar Tesis ini semakin baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Malang, 18 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
IDENTITAS PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	x
RIWAYAT HIDUP.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Perencanaan.....	26
2.2.1 Pengertian dan Pentingnya Perencanaan.....	26
2.2.2 Unsur-Unsur Perencanaan.....	29
2.3 Perencanaan Partisipatif.....	30
2.3.1 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.....	30
2.3.2 Pendekatan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	33
2.3.3 Perencanaan Partisipatif.....	35
2.4 Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri.....	39
2.4.1 Pemberdayaan.....	39
2.4.2 Pemberdayaan Perempuan.....	41
2.4.3 Pemberdayaan Perempuan Melalui Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri.....	44
2.4.4 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	49
2.4.5 Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Dalam Bingkai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	51
2.5 Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri.....	52
2.5.1 Konsep Pengembangan.....	52
2.5.2 Konsep Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri.....	53
2.5.3 Aspek-Apek Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri.....	58
2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan.....	68
2.6 Kerangka Berpikir.....	72



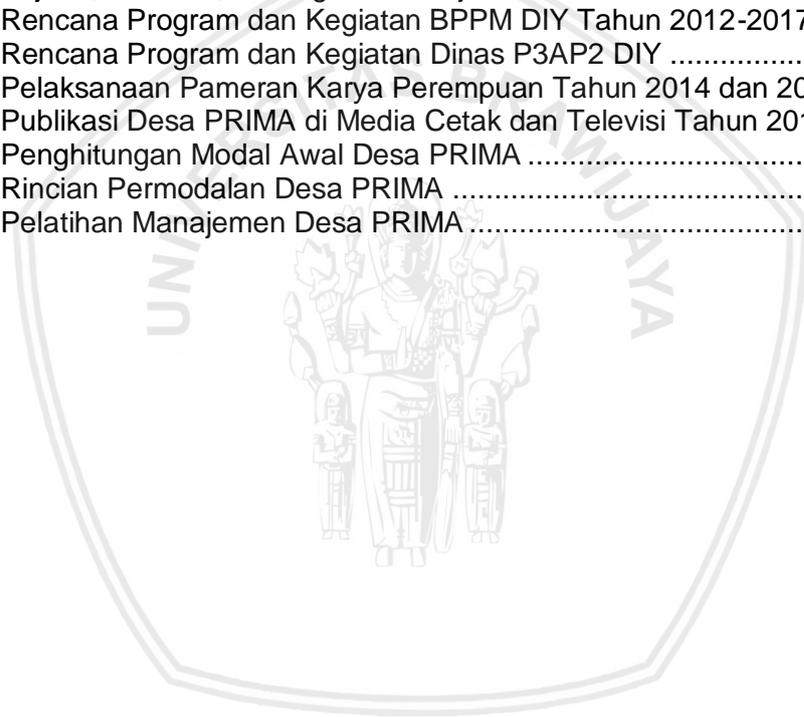
BAB III	ANALISA SOCIAL SETTING LOKASI PENELITIAN	73
	3.1 Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	73
	3.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	75
	3.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	76
	3.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	79
	3.5 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	79
BAB IV	METODE PENELITIAN	81
	4.1 Jenis Penelitian	81
	4.2 Fokus Penelitian	81
	4.3 Lokasi dan Situs Penelitian	83
	4.4 Sumber Data	83
	4.5 Informan	85
	4.6 Teknik Pengambilan Data	87
	4.7 Uji Keabsahan Data	89
	4.8 Analisa Data	90
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
	5.1 Hasil Penelitian	94
	5.1.1 Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta	94
	5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta	141
	5.2 Pembahasan	147
	5.2.1 Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta	147
	5.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta	187
BAB VI	PENUTUP	198
	6.1 Kesimpulan	198
	6.2 Saran	201

LAMPIRAN-LAMPIRAN



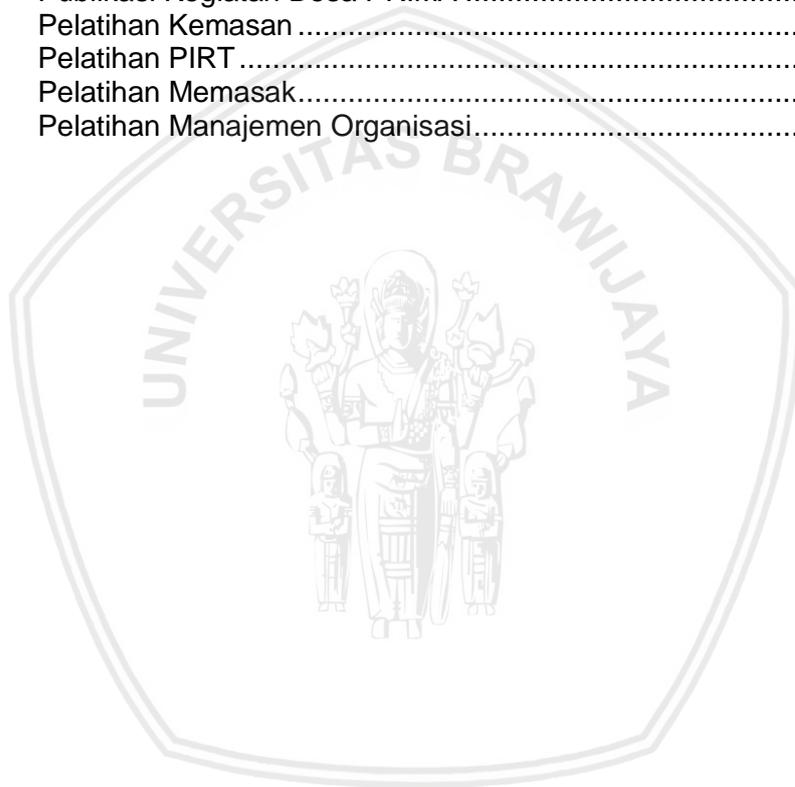
DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 .	6
2.1	Rangkuman Penelitian Terdahulu	20
3.1	Jumlah Penduduk DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	75
4.1	Informan Kunci.....	85
5.1	Kantong Kemiskinan DIY Tahun 2016-2017.....	96
5.2	Desa PRIMA menurut Kabupaten Tahun 2008-2018	99
5.3	Profil Desa PRIMA Kabupaten Sleman Tahun 2008-2016	104
5.4	Klasifikasi Desa PRIMA Tahun 2018.....	106
5.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas P3AP2 DIY	111
5.6	Rencana Program dan Kegiatan BPPM DIY Tahun 2012-2017.....	114
5.7	Rencana Program dan Kegiatan Dinas P3AP2 DIY	115
5.8	Pelaksanaan Pameran Karya Perempuan Tahun 2014 dan 2015...	124
5.9	Publikasi Desa PRIMA di Media Cetak dan Televisi Tahun 2019	129
5.10	Penghitungan Modal Awal Desa PRIMA	136
5.11	Rincian Permodalan Desa PRIMA	138
5.12	Pelatihan Manajemen Desa PRIMA	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Struktur Organisasi Desa PRIMA	48
2.2	Kerangka Berpikir Penelitian	72
3.1	Struktur Organisasi Dinas P3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta	78
4.1	Analisis Data Kualitatif (<i>Interactive Model Analysis</i>).....	91
5.1	Stand Peserta Pameran Karya Perempuan 2014.....	125
5.2	Kepala BPPM DIY Membuka Pameran Karya Perempuan 2015	126
5.3	Pameran Desa PRIMA di Indocraft 2019.....	128
5.4	Publikasi Kegiatan Desa PRIMA	129
5.5	Pelatihan Kemasan	131
5.6	Pelatihan PIRT	133
5.7	Pelatihan Memasak.....	134
5.8	Pelatihan Manajemen Organisasi.....	141



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dipandang masih kurang memihak perempuan. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu (1) struktur masyarakat yang didominasi ideologi patriarkhal dan (2) sejalan dengan budaya patriarkhal, pembangunan kapitalis menciptakan ketimpangan bagi perempuan (Winarno, 2013:124). Kondisi tersebut membuat penilaian atau persepsi kepada para perempuan dalam penempatan pekerjaan misalnya menempatkan mereka pada posisi-posisi yang tidak menguntungkan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan gender, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden. Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada seluruh aparat pemerintah dari Pusat-Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Berangkat dari Instruksi Presiden inilah selanjutnya dikenal strategi pembangunan dengan istilah Pengarusutamaan Gender.

Menurut Utaminingsih (2017:30), "pengarusutamaan Gender atau disebut *gender mainstreaming* adalah suatu model pendekatan yang mengintegrasikan permasalahan gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, proyek dalam institusi pemerintah". Melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan publik yang mengacu pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender yang dikenal dengan kebijakan responsif gender. Langkah advokasinya dalam pembangunan bertumpu pada dua pendekatan yaitu (1) mendudukkan pemerintah sebagai *agent of change* bagi pembangunan yang adil gender dan (2) melakukan intervensi terhadap semua tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi (Mufidah, 2009:97-98).

Salah satu implementasi Pengarusutamaan Gender kemudian lahir program-program pemberdayaan perempuan. Menurut Hubeis (2016:125-126), "pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi". Pemberdayaan perempuan diindikasikan oleh situasi ketika sebagian besar mayoritas dari perempuan akan mampu menikmati "kebebasan memilih" untuk mandiri dan mengembangkan diri sehingga dapat memiliki kesetaraan akses terhadap sumber daya di ranah domestik atau publik, memperoleh kesempatan dan kekuasaan. Lebih lanjut Hubeis (2016:135) menjelaskan bahwa "pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah bertujuan untuk memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduksi mereka".

Ada empat indikator pemberdayaan dalam konteks kesetaraan gender yang dimulai dengan pemberdayaan bagi perempuan. Empat indikator tersebut meliputi: (1) akses yaitu adanya kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan, (2) partisipasi yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut, (3) kontrol yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut, dan (4) manfaat yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara (Nugroho, 2011:XXI).

Dalam membangun kesetaraan gender tidak bisa disamakan dengan membangun infrastruktur. Membangun kesetaraan gender tidak bisa dilakukan di daerah miskin, terbelakang dalam pendidikan dan masyarakatnya masih kuat budaya patriarkinya. Membangun kesetaraan gender memerlukan kondisi-kondisi dasar yang memungkinkannya bekerja secara efektif. Dalam konsep ilmu ekonomi disebut sebagai *ceteris paribus*. Maka, untuk membangun kesetaraan gender memerlukan tiga kualitas yang meliputi sektor (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) ekonomi (Nugroho, 2011:XXII).

Dalam rangka memenuhi kondisi dasar dalam membangun kesetaraan gender, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2004 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 58/SK/MENEG.PP/XII/2004 Tahun 2004 Tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) bertujuan untuk (1) sebagai prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, (2) upaya untuk

meningkatkan kualitas kesehatan perempuan, (3) kualitas pendidikan perempuan, serta (4) penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Penetapan prioritas ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa kemiskinan di seluruh dunia senantiasa berdampak pada perempuan dan anak. Harapannya dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi, maka perempuan akan lebih berdaya dan memiliki posisi tawar yang lebih baik di keluarganya (KemenPPPA, 2012:8).

Implementasi pemberdayaan perempuan dari penetapan kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) ini, salah satunya dengan melakukan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu model desa yang menggambarkan adanya upaya jaminan sosial ekonomi bagi perempuan dan anak terutama dalam keluarga miskin. Model Desa ini selanjutnya diberi nama "Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) atau dengan nama lain menyesuaikan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masing-masing daerah (KemenPPPA, 2012:9). Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) didefinisikan sebagai sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pembentukan kelompok usaha dengan anggota minimal dua puluh lima perempuan pelaku usaha di desa yang dianggap berpotensi dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (DP3AP2, 2019:3).

Salah satu provinsi yang menjadi *pilot project* Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan pada tahun anggaran 2008 dengan sasaran delapan desa yang tersebar di empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai tahun 2009 sampai saat ini program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dibiayai sendiri oleh

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini diambil karena didasarkan pada dua isu di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pertama, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling banyak adalah perempuan. Berdasarkan data terpilah gender dan anak tahun 2019 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 sebanyak 3.802.872 jiwa dengan rincian jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.921.394 jiwa atau 50,52 %, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.881.478 jiwa atau 49,48% (DP3AP2 DIY, 2019). Kedua, angka kemiskinan dan ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu di atas nasional. Pada data yang terbaru yaitu tahun 2018, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta angka kemiskinannya pada angka 11,81 % dan angka kemiskinan Nasional pada angka 9,66% (BPS, 2019). Untuk Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 pada angka 0.422 dan Gini Ratio Nasional tahun 2018 pada angka 0.384 (BPS Provinsi DIY, 2019).

Berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022, salah satu yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah terwujudnya masyarakat inklusif gender dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain dengan salah satu sarannya adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Strategi yang kemudian ditempuh melalui kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

Proses pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dilakukan dengan cara pendampingan di masing-masing desa sasaran selama tiga tahun (DP3AP2, 2019:5). Pelaksana kegiatannya adalah Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM DIY) sampai tahun 2018. Adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka mulai tahun 2019 pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data sampai akhir tahun 2018, di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terbentuk delapan puluh tiga Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

No	Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Bantul	20
2	Kabupaten Kulon Progo	17
3	Kabupaten Gunungkidul	31
4	Kabupaten Sleman	15
	Total	83

Sumber : DP3AP2, 2019

Pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti memiliki dampak positif bagi perempuan. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Murti Maharini pada tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Dampak Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta" disimpulkan bahwa Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dapat meningkatkan jumlah pendapatan perempuan pelaku usaha, mampu meningkatkan pemenuhan konsumsi rumah tangga dan mampu meningkatkan omzet usaha perempuan pelaku usaha (Maharini, 2018:61).

Langkah yang harus ditempuh setelah pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) adalah melakukan pengembangan. Hal ini agar Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) tidak sekedar dibentuk dan ada di desa. Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) perlu dikembangkan dengan tujuan agar kaum perempuan mampu mencapai peningkatan pada kualitas: (1) kualitas ekonomi secara lebih mandiri, (2) kualitas kesehatan (3) meningkatkan kontribusi terhadap kesetaraan gender (KemenPPPA, 2012:42).

Secara konseptual pengembangan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral berdasar kebutuhan melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan, 2005). Untuk konteks dunia usaha pengembangan didefinisikan sebagai cara yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat lewat bimbingan dan bantuan demi menumbuhkan serta menambah kemampuan usaha-usaha kecil supaya berubah menjadi usaha lebih tangguh dan mandiri (Hafsah, 2000:198). Sejauh ini Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) juga bisa disebut sebagai wadah kelompok perempuan pelaku usaha. Maka untuk aspek pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), bisa menggunakan pendekatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini mengingat kondisi di lapangan bahwa Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih masuk kategori industri rumah tangga dengan ciri-ciri mendekati ciri-ciri usaha mikro yaitu (1) kepemilikan modal kelompok sebesar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah dan (2) omzet kurang dari tiga ratus juta. Dari gambaran tersebut, maka untuk pengembangan

Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) bisa mengadopsi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas pada empat aspek yaitu (1) permodalan, (2) pemasaran, (3) teknologi dan inovasi, dan (4) manajemen (Budiarto, dkk, 2015:99). Langkah ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ammad Khan, Nazish Kanwal, Peer Ghulam Nabi, Ashfaq Ahmad Shah (2016:) tentang *Sarhad Rural Support Program (SRSP)* yaitu suatu program dalam memberdayakan pengusaha perempuan pedesaan melalui kredit mikro di Pakistan. Dalam studinya disimpulkan bahwa *Sarhad Rural Support Program (SRSP)* melalui kredit mikro terbukti efektif dalam memberdayakan pengusaha perempuan di dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, keluarga dan masyarakat. Namun melalui penelitian ini juga merekomendasikan adanya pengembangan program melalui penciptaan pasar, pendidikan bisnis dan pelatihan bagi pengusaha perempuan :

"Market creation for rural women entrepreneurs is very important and should be carried out by microcredit institutions beyond just providing credit services to the clients. This will not only facilitate the existing women entrepreneurs in strengthening their business but also motivate other rural women to create better decisions on business establishment and taking credit from the institutions. The study also recommends that it is very crucial if Sarhad Rural Support Program (SRSP) conduct business education and training for the women entrepreneurs."(Khan, dan Nazish, dan Nabi, dan Ashfaq (2016:161).

Penciptaan pasar bagi pengusaha perempuan pedesaan sangat penting dan harus dilakukan oleh lembaga kredit mikro selain memberikan layanan kredit kepada pengusaha perempuan pedesaan. Ini tidak hanya akan memfasilitasi pengusaha perempuan di dalam memperkuat bisnis mereka tetapi juga akan memotivasi perempuan pedesaan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam mendirikan usaha dan mengambil kredit dari lembaga-lembaga tersebut. Studi ini juga merekomendasikan bahwa sangat penting jika Program Sarhad Rural Support Program (SRSP) melakukan pendidikan bisnis dan pelatihan bagi para wirausaha perempuan.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ammad Khan, Nazish Kanwal, Peer Ghulam Nabi, Ashfaq Ahmad Shah (2016:), untuk pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) tidak sekedar diberikan bantuan modal juga harus diikuti dengan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola serta membantu dalam pemasaran hasil produknya.

Berdasarkan hasil pra penelitian pada tanggal 15 April 2019, penulis melihat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini hanya fokus pada pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Sayangnya, untuk program pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dari delapan puluh tiga desa yang sudah terbentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta belum terlihat maksimal. Indikasinya, seluruh Desa mendapatkan perlakuan yang sama yang bersifat rutinitas pada tiga aspek yaitu (1) permodalan, melalui pemberian modal masing-masing desa sebesar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah (2) teknologi dan inovasi berupa pelatihan kemasan dan (3) manajemen yaitu memberikan pelatihan manajemen organisasi dan pembukuan kepada anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Untuk aspek pemasaran belum terlihat maksimal karena kegiatan pameran hanya dilakukan pada tahun 2015 dan 2016.

Untuk melihat kualitas sebuah program dan kegiatan yang pertama harus dilihat dari perencanaannya. Hal ini dikarenakan dalam sebuah perencanaan karena dalam perencanaan terkandung adanya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1995:9). Demikian pula sebagai sebuah

program dan kegiatan, pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan melalui proses sebuah perencanaan. Perencanaan sendiri berasal dari kata "rencana", yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan (Abe, 2005:27). Dari pengertian sederhana ini kemudian disimpulkan bahwa sebuah perencanaan terdiri beberapa komponen penting meliputi: (1) tujuan atau apa yang hendak dicapai, (2) kegiatan atau tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan dan (3) waktu atau kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan (Abe, 2005:27).

Pentingnya perencanaan menurut Kuncoro (2018:72), "bahwa perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Empat fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan". Hal ini juga mengingatkan bahwa perencanaan memuat segala sesuatu yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman untuk melaksanakan semua aktivitas organisasi.

Kualitas perencanaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu yang terbaik diantara provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perencanaan yaitu (1) pada tahun 2016 menerima Anugerah Pangripta Nusantara dengan kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik III dan (2) pada tahun 2017 menerima Anugerah Pangripta Nusantara dengan kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik I Tahun 2017. Kemudian tahun 2018 menerima dua penghargaan yaitu (1) penghargaan "*Innovation Challenge*" mendapatkan Peringkat I pada Tingkat Nasional yang diberikan oleh *Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)*, dan (2) penghargaan "Anugerah Pandu Negeri (APN) 2018" sebuah ajang pemberian penghargaan tahunan untuk

pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tatakelola pemerintahan sangat baik, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Public Governance* (IIPG).

Sayangnya, untuk konteks perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terlihat sebagai perencanaan yang prosedural dan hanya pengulangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pra penelitian pada 15 April 2019, penulis berhasil mengidentifikasi dua faktor utama yang menjadi penyebab perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat rutinitas.

Pertama, ketiadaan data. Menurut Abe (2005:52), "dalam sebuah perencanaan diperlukan sebuah data yang berisi kondisi obyektif yang biasanya tersaji dalam angka-angka statistik". Berangkat dari data inilah yang kemudian akan membantu memahami dengan jernih masalah dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah serta akan sangat menentukan jenis dan bentuk tindakan yang akan dilakukan berbeda-beda disesuaikan potensi dan kondisi masing-masing lokasi. Idealnya data yang digunakan adalah data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sayangnya, hasil temuan dilapangan data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta belum tersedia sampai saat ini. Data yang tersedia baru sebatas nama dan alamat Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) saja.

Kedua, tidak melibatkan desa sasaran dalam perencanaan. Dalam proses perencanaan pembangunan dikenal dengan pendekatan perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang dalam

tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (Abe, 2005:88). Tujuan melibatkan masyarakat dalam perencanaan agar rumusan masalahnya menjadi lebih dekat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) masing-masing desa sasaran sebenarnya memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiadaan melibatkan desa sasaran sejak proses perencanaan membuat output perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) diseragamkan dengan seluruh desa mendapatkan intervensi yang sama.

Berdasarkan gambaran di atas, selanjutnya diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih mendalam. Melalui penelitian juga akan diketahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaannya. Hasil akhirnya penelitian ini bisa menjadi titik tolak dalam memperbaiki perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka selanjutnya penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

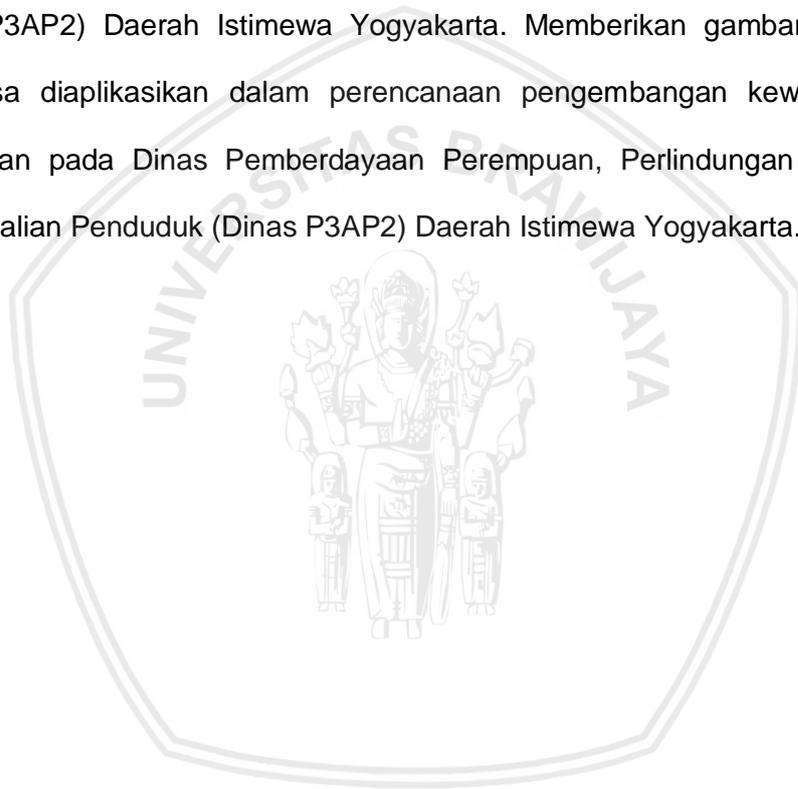
1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengembangan keilmuan khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama penggunaan data sebagai basis sebuah perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berangkat dari kasus perencanaan pengembangan Desa PRIMA maka perencanaan yang baik adalah perencanaan yang disusun dengan berbasis data dan dilakukan secara partisipatif. Perencanaan yang disusun dengan basis data dan partisipatif akan membantu memahami dengan jernih masalah dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Hal ini kemudian akan menentukan jenis dan bentuk tindakan yang tepat untuk dilakukan penanganan di dalam mengatasi masalah tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan. Memberikan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta. Memberikan gambaran inovasi yang bisa diaplikasikan dalam perencanaan pengembangan kewirausahaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Seorang peneliti perlu untuk melihat hasil penelitian terdahulu, karena bisa membantu mendalami topik permasalahan maupun bisa digunakan sebagai pembanding. Sejauh ini belum banyak penelitian tentang Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri, apalagi program ini hanya ada di Indonesia. Selanjutnya, penelusuran terhadap penelitian terdahulu dilakukan terhadap penelitian yang dianggap relevan dan mampu dijadikan referensi untuk memperkaya dan memperkuat penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu yang relevan untuk dapat dijadikan referensi dalam penelitian antara lain :

Murti Maharini (2018) melalui penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Dampak Program Desa Prima Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini memberikan bukti bahwa Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran program ini adalah para perempuan, karena perempuan sebagai bagian dari pilar rumah tangga yang diharapkan lebih mempunyai kontribusi untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga. Tingkat pendapatan perempuan yang memperoleh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan

perempuan yang tidak memperoleh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Oleh karena itu, Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri dinilai efektif untuk meningkatkan pendapatan perempuan pelaku usaha kecil.

Mardiana Andarwati, Edi Subiyantoro, Tutut Subadyo (2018) yang berjudul "Pengaruh Pelatihan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Terhadap Keberdayaan Pengrajin Batik Tulis Ramah Lingkungan". Tujuan dari penelitian ini untuk mewujudkan dan meningkatkan keberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) batik tulis di Trenggalek dengan konsep ramah lingkungan melalui penerapan alat produksi yang berteknologi tepat guna. Hasil penelitian menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah batik tulis di Trenggalek dalam proses produksi menggunakan teknologi tepat guna berupa pewarna alami dan penggunaan meja gambar batik terbukti mempermudah kegiatan produksi lebih cepat dan lebih berkualitas.

Susmita Chatterjee, dan Sangita Dutta Gupta dan Parijat Upadhyay (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Empowering Women And Stimulating Development At Bottom Of Pyramid Through Micro Entrepreneurship*". Penelitian dilakukan di *India pada Program Self-help Groups (SHGs)*, dimana program ini adalah sebuah organisasi perempuan yang terdiri dari 10-20 anggota perempuan desa yang menumbuhkembangkan kebiasaan menabung dan diberikan akses ke kredit untuk memberikan dorongan kepada para anggotanya mendirikan usaha mikro mereka sendiri dengan bantuan kredit tersebut. Penelitian ini menyatakan bahwa perempuan merupakan salah satu pendorong pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan bahwa perempuan jika mulai memiliki penghasilan, maka mereka akan membelanjakan uangnya untuk pendidikan anak-anak dan kesejahteraan mereka.

Muhammad Ammad Khan, Nazish Kanwal, Peer Ghulam Nabi, Ashfaq Ahmad Shah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*Empowering Women Entrepreneurs Through Microcredit: Assessing the Role of Sarhad Rural Support Program in Pakistan*". Penelitian ini mengambil studi tentang dampak *Sarhad Rural Support Program (SRSP)* yaitu suatu program dalam memberdayakan pengusaha perempuan pedesaan melalui kredit mikro di Pakistan. Dalam studinya yang mengambil sampel 300 perempuan pengusaha disimpulkan bahwa *Sarhad Rural Support Program (SRSP)* melalui kredit mikro terbukti efektif dalam memberdayakan pengusaha perempuan di dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, keluarga dan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya pengembangan program melalui penciptaan pasar, pendidikan bisnis dan pelatihan bagi para pengusaha perempuan.

Dadan Sutrisno, dan Agus Suryono, dan Abdullah Said (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)". Penelitian ini berusaha menggali permasalahan usaha mikro yang dihadapkan pada permasalahan pemasaran dan memerlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasinya, ditinjau dari aspek perencanaan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- (1) perencanaan strategis yang dilakukan Dinas Koperindag dalam penyusunannya cenderung didominasi perencanaan prosedural dan mengabaikan aspek perencanaan substantif, sehingga belum mencerminkan perencanaan yang efektif,
- (2) Dalam implementasinya terkendala ketidaksepahaman antar aktor perencana pada berbagai tingkatan organisasi,
- dan (3) pembinaan usaha mikro harus diarahkan pada strategi agresif yaitu

ekspansi pasar dan penguatan daya saing dalam rangka menghadapi pasar bebas, melalui pembangunan jaringan kerjasama hulu-hilir dengan memberdayakan komunitas/asosiasi UMKM, dan fasilitasi pembangunan jaringan pemasaran online terpadu berbasis komunitas.

Irwani Jamilah, dan Erlina, dan Rujiman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Serdang Bedagai". Penelitian ini mengkaji pengaruh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) dengan dimensi penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumberdaya perempuan, dan pengembangan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Lila Bismala (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah." Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Model manajemen usaha ini mengadopsi dari manajemen perusahaan, yang bekerja pada aspek manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran.

Putri Pangestika, dan Imam Santoso, dan Retno Astuti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Dukungan Kucuran Kredit (Studi Kasus: UMKM

Kabupaten XYZ)". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kinerja UMKM setelah mendapat kucuran kredit. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada omset penjualan dan keuntungan usaha setelah mendapat kucuran kredit di UMKM di Kabupaten XYZ, namun pada jumlah tenaga kerja menunjukkan adanya peningkatan yang tidak signifikan. Penelitian ini merekomendasikan tiga prioritas strategi pengembangan yang dapat diterapkan UMKM di Kabupaten XYZ yaitu (1) melakukan inovasi produk yang diolah, (2) menjaga dan mempertahankan kualitas produk dan (3) meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan UMKM.

Zoran Rakicevic, dan Jasmina Omerbegovic Bijelovic, dan Danica Lecic Cvetkovic (2015) dalam penelitian yang berjudul "*A model for effective planning of SME support services*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membuat sebuah model perencanaan efektif bagi Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan sebuah survei yang dilakukan dengan mengambil sampel sejumlah 336 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Serbia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masalahnya bukan terletak pada jenis dan volume kegiatannya namun yang terpenting adalah dukungan yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu sendiri.

Juvenal Alves (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Penguatan Modal Usaha". Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Distrik Ermera, Timor Leste. Hambatan yang ditemukan dalam

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Distrik Ermera, Timor Leste meliputi empat hal: (1) daya beli pasar, (2) kualitas produk dan jasa, (3) kreativitas dan inovasi serta (4) lemahnya sumber daya manusia dan modal usaha.

Nugraha Utama Sudarsana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Perencanaan Partisipatif Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan". Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perencanaan Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down dan teknokratis. Pendekatan partisipatif belum sepenuhnya diadopsi mengingat masyarakat miskin sebagai sasaran program belum dilibatkan dalam penyusunan rencana. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk Daerah Istimewa Yogyakarta partisipasi masyarakat lebih mudah direalisasikan karena adanya faktor pendukung partisipasi masyarakat yaitu adanya sistem sosial di dalam masyarakat seperti kebiasaan bergotong-royong, *sambatan* (saling menolong disaat ada anggota masyarakat yang membutuhkan), budaya *ewuh-pakewuh* (tidak enak hati) jika tidak ikut suatu kegiatan serta hubungan kekerabatan yang masih sangat erat.

Untuk mempermudah pemahaman penelitian-penelitian terdahulu, berikut rangkuman penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun Penelitian Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kontribusi bagi Penelitian Ini	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini

1	Murti Maharini 2018 Evaluasi Dampak Program Desa PRIMA Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian ini memberikan bukti bahwa Program Desa PRIMA berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	Memberikan masukan mengenai keberhasilan Program Desa PRIMA dalam memberdayakan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya mengambil topik Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta • Perbedaannya penelitian ini meneliti dampak Program Desa PRIMA. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah perencanaan pengembangan Desa PRIMA
2	Mardiana Andarwati, Edi Subiyantoro, Tutut Subadyo 2018 Pengaruh Pelatihan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Terhadap Keberdayaan Pengrajin Batik Tulis Ramah Lingkungan	Hasil penelitian menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah batik tulis di Trenggalek dalam proses produksi menggunakan teknologi tepat guna berupa pewarna alami dan penggunaan meja gambar batik terbukti mempermudah kegiatan produksi lebih cepat dan lebih berkualitas	Memperkuat kajian pustaka pada aspek teknologi dan inovasi pada pengembangan Desa PRIMA	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya meneliti tentang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah • Perbedaannya penelitian ini membahas dampak penggunaan teknologi tepat guna bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sementara penelitian yang akan dilakukan membahas perencanaan pengembangan usaha perempuan
3	Susmita Chatterjee, dan Sangita Dutta Gupta dan	Dari hasil penelitian ini dapat diketahui	Memperkuat kajian pustaka pada aspek permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya meneliti tentang pemberdayaan perempuan

	<p>Parijat Upadhyay</p> <p>2017</p> <p>Empowering Women And Stimulating Development At Bottom Of Pyramid Through Micro Entrepreneurs hip</p>	<p>bahwa Program Self-help Groups (SHGs) yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari 10-20 anggota perempuan desa memiliki kebiasaan menabung dan diberikan akses ke kredit yang kemudian mampu memberikan dorongan kepada para anggotanya untuk mendirikan usaha mikro.</p>	<p>Desa PRIMA</p>	<p>melalui kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaannya penelitian ini membahas korelasi pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan. Sementara penelitian yang akan dilakukan membahas perencanaan pengembangan usaha perempuan
4	<p>Muhammad Ammad Khan, Nazish Kanwal, Peer Ghulam Nabi, Ashfaq Ahmad Shah</p> <p>2016</p> <p>Empowering Women Entrepreneurs Through Microcredit: Assessing the Role of Sarhad Rural Support Program in Pakistan</p>	<p>Sarhad Rural Support Program (SRSP) melalui Kredit mikro terbukti efektif dalam memberdayakan pengusaha perempuan namun masih diperlukan pengembangan usaha perempuan melalui Pendidikan dan pelatihan serta menciptakan pasar bagi pengusaha perempuan</p>	<p>Memperkuat kajian pustaka pada aspek pemasaran Desa PRIMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya topiknya program pemberdayaan perempuan • Perbedaannya penelitian ini meneliti dampak Program sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah perencanaan pengembangan usaha perempuan

5	<p>Dadan Sutrisno , dan Agus Suryono, dan Abdullah Said</p> <p>2016</p> <p>Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.</p>	<p>Penelitian ini berusaha menggali permasalahan usaha mikro yang dihadapkan pada permasalahan pemasaran dan memerlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasinya, ditinjau dari aspek perencanaan strategis</p>	<p>Memperkuat kajian pustaka pada aspek pemasaran Desa PRIMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya topiknya perencanaan usaha mikro • Perbedaannya penelitian ini pada perencanaan strategi UMKM sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah perencanaan pengembangan Desa PRIMA
6	<p>Irwani Jamilah, dan Erlina, dan Rujiman</p> <p>2016</p> <p>Pengaruh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (DESA PRIMA) Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Serdang Bedagai".</p>	<p>Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.</p>	<p>Memberikan penguatan kajian pustaka pada tujuan Desa PRIMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya mengambil topik Desa PRIMA. • Perbedaannya penelitian ini meneliti pengaruh Program Desa PRIMA terhadap pengembangan suatu wilayah. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah perencanaan pengembangan Desa PRIMA
7	<p>Lila Bismala</p> <p>2016</p> <p>Model</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil</p>	<p>Memperkuat kajian pustaka pada aspek manajemen Desa PRIMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya topiknya pengembangan usaha mikro • Perbedaannya

	Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah."	dan Menengah sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha.		<p>penelitian ini fokus pada Model Manajemen UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah perencanaan pengembangan Desa PRIMA
8	Putri Pangestika, dan Imam Santoso, dan Retno Astuti 2016 Strategi Pengembangan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Dukungan Kucuran Kredit (Studi Kasus: UMKM Kabupaten XYZ)	Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada omset penjualan dan keuntungan usaha setelah mendapat kucuran kredit di UMKM di Kabupaten XYZ, namun pada jumlah tenaga kerja menunjukkan adanya peningkatan yang tidak signifikan	Memperkuat kajian pustaka pada aspek permodalan Desa PRIMA	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya topiknya pengembangan usaha mikro • Perbedaannya penelitian ini pada strategi pengembangan potensi UMKM sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah perencanaan pengembangan Desa PRIMA
9	Zoran Rakicevic, dan Jasmina Omerbegovic, dan Danica Lecic Cvetkovic 2015 A model for effective planning of SME support	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dukungan pemerintah kepada Usaha Kecil dan Menengah masalahnya bukan terletak pada jenis dan volume kegiatannya	Memberikan masukan, dan penguatan dalam analisa unsur sebuah perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya topiknya perencanaan pengembangan usaha mikro • Perbedaannya penelitian ini hanya fokus pada satu unsur perencanaan yaitu penggunaan data sebagai

	services	namun yang terpenting adalah dukungan yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sebaiknya disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu sendiri.		basis perumusan masalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya ada empat unsur yaitu data sebagai perumusan masalah, tujuan, program dan aktor yang terlibat.
10	Juvenal Alves 2015 Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Penguatan Modal Usaha	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hambatan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Distrik Ermera, Timor Leste meliputi empat hal: (1) daya beli pasar, (2) kualitas produk dan jasa, (3) kreativitas dan inovasi serta (4) lemahnya sumber daya manusia dan modal usaha.	Memberikan masukan, dan penguatan dalam kajian pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya topiknya pengembangan usaha mikro • Perbedaannya penelitian ini pada strategi pengembangan potensi UMKM sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah perencanaan pengembangan Desa PRIMA
11	Nugraha Utama Sudarsana 2015 Perencanaan Partisipatif	Perencanaan Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di	Memberikan penguatan dalam analisa data pada unsur perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya topiknya perencanaan kegiatan pengurangan kemiskinan di Daerah Istimewa

	Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	Daerah Istimewa Yogyakarta lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down dan teknokratis		Yogyakarta <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaannya penelitian ini fokusnya pada proses perencanaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya pada unsur-unsur perencanaan.
--	-------------------------------------	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki kontribusi dalam memberikan arah, masukan maupun memperkuat analisa pembahasan dalam penelitian ini.

2.2 Perencanaan

2.2.1 Pengertian dan Pentingnya Perencanaan

Secara sederhana definisi perencanaan menurut Abe (2005:27), "perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan". Menurut pendapat Conyers (1984), "batasan tentang perencanaan hampir sama banyaknya dengan pengertian istilah rencana itu sendiri". Berikut definisi perencanaan dari beberapa tokoh yang dirangkum oleh Conyers :

1. Waterson (1965:26) menyatakan bahwa pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu;
2. Schaffer (1970:29) menyatakan bahwa apapun yang terlintas di benak kita manakala kita membicarakan perencanaan kiranya tidak terlepas dari kaitan persoalan pengambilan keputusan. Implikasinya adalah bahwa pasti ada cara yang lebih baik dalam pengambilan keputusan tersebut, mungkin dengan cara lebih memperhatikan lebih banyak data yang ada, ataupun hasil-hasil yang mungkin dicapai dimasa yang akan datang;

3. Beenhakker (1980:22) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang dapat terlaksanakan (Conyers, 1984:4).

Selanjutnya konsep perencanaan secara khusus ada tiga hal yaitu (1) perencanaan bukan sekedar membuat sebuah dokumen perencanaan, (2) perencanaan bukanlah sesuatu yang sekali jadi namun dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus dan (3) konsep perencanaan memiliki implikasi penting yang berkaitan dengan konsep serta peran si perencana. Perencana dalam konteks ini bukan sekedar seseorang yang bekerja sebagai perencana di suatu departemen perencanaan namun juga politisi, administrator dan masyarakat yang terlibat erat dalam proses pembangunan (Conyers, 1984:8-9).

Secara mendasar perencanaan bisa ditinjau dari tiga hal yaitu :

1. Dipandang dari sudut kegiatan dasar manusia yang terkandung dalam tingkah laku manusia pada semua tingkatan masyarakat. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran dan tindakan manusia yang berorientasi ke masa depan;
2. Ditinjau dari sudut pilihan rasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa depan yang sesuai melalui suatu tahapan pemilihan;
3. Ditinjau dari sudut pemecahan masalah (problem solving). Perencanaan adalah proses pemecahan masalah yang ditujukan pada jenis-jenis masalah yang sangat spesifik (Mahi dan Sri, 2017:1).

Dari beberapa pendapat sebelumnya, setidaknya kita memperoleh gambaran bahwa pengertian perencanaan pada hakekatnya begitu beragam dan tidak bisa didefinisikan secara baku. Pada hakekatnya perencanaan merupakan sesuatu yang penting baik di sektor swasta maupun sektor publik. Kenapa perencanaan menjadi sesuatu yang penting? Menjadi penting karena menurut Kuncoro (2018:72), "perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Empat fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan

dan mengendalikan". Hal ini juga mengingatkan bahwa perencanaan memuat segala sesuatu yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman untuk melaksanakan semua aktivitas organisasi.

Sementara menurut Tjokroamidjojo (1995:8), "pentingnya dilakukan sebuah perencanaan karena adanya keyakinan bahwa arah pembangunan masyarakat yang baik hanya dapat dilakukan melalui suatu pengarahan dan "campur tangan" pemerintah". Beberapa alasan kuat perlunya melakukan perencanaan sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkiraan mengenai potensi potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi;
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik (*the best alternatif*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik (*the best combination*);
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya;
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (Tjokroamidjojo, 1995:9).

Dalam kerangka pemerintahan pentingnya perencanaan setidaknya ada dua alasan yaitu (1) adanya suatu kebutuhan mendesak untuk menjalankan agenda pembangunan dengan secara maksimal, tepat dan hemat, dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dan (2) adanya kebutuhan untuk mentransformasikan masyarakat, sehingga pada proses transformasi itu tahapan yang dilalui harus merupakan tahapan dalam kendali dan stabil (Abe, 2005:50-51). Perencanaan dalam pemerintahan secara ringkas diperlukan untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan tersusun dan dituangkan

dalam anggaran. Adapun bahan perencanaan yang baik adalah data dan ramalan (Syamsi, 1986:134).

2.2.2 Unsur-Unsur Perencanaan

Menurut Abe (2005:27), "perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan". Dari pengertian sederhana ini kemudian dapat disimpulkan bahwa sebuah perencanaan terdiri beberapa komponen penting meliputi: (1) tujuan atau apa yang hendak dicapai, (2) kegiatan atau tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan dan (3) waktu atau kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan (Abe, 2005:27). Pendapat Abe ini juga diperkuat oleh pendapat Conyers (1984:4), "bahwa terdapat empat elemen dasar perencanaan yaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, (4) perencanaan untuk masa depan".

Soekartawi (1990) selanjutnya melengkapi dua pendapat Abe dan Conyers di atas dengan menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya mengambil suatu kebijaksanaan (*policy*) dengan mempertimbangkan hal-hal atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Artinya dari sekian banyak alternatif, maka perlu dipilih perencanaan yang didasarkan pada aspek skala prioritas;
2. Perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia;
3. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak;
4. Perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai.
5. Perencanaan juga dapat diartikan dengan kepentingan masa depan. Perencanaan yang dikaitkan dengan kepentingan masa depan adalah suatu hal yang baik, agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan di masa depan (Soekartawi, 1990:4-6).

Selanjutnya sebuah perencanaan yang baik harus mencakup beberapa unsur, sebagaimana pendapat Syamsi (1986) berikut ini :

"Dalam membuat sebuah perencanaan yang baik mencakup enam unsur pokok yaitu :

1. *What* atau apa, yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan;
2. *Why* atau mengapa, yaitu alasan memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan;
3. *How and How Much* atau bagaimana dan berapa, yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan dengan dana yang tersedia;
4. *Where* atau di mana, yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek);
5. *When* atau kapan, yaitu pemilihan waktu atau timing yang tepat;
6. *Who* atau siapa, yaitu menentukan orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan subyek pelaksana. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa sebagai obyek pelaksanaan kegiatan atau *whom*" (Syamsi, 1986:134-135).

2.3 Perencanaan Partisipatif

2.3.1 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2001 dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, maka sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan itu dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui undang-undang ini daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah (Sjahrizal, 2017:11).

Secara umum menurut Sjahrizal (2017:24), "perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan". Sementara menurut Jhingan (1984) dalam Sjahrizal (2017:25), "perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan

perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula". Perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor sebagai berikut : (1) kegagalan mekanisme pasar, (2) ketidakpastian masa datang dan (3) untuk memberikan arah pembangunan yang jelas (Kuncoro, 2018:10).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, proses pembangunan perlu didorong secara terpadu dan efisien. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya memiliki lima tujuan dan sasaran pokok yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil (Sjahrizal, 2017:26).

Perencanaan pembangunan selanjutnya dapat diklasifikasikan menurut beberapa jenis. Menurut pendapat Lincolin Arsyad (2001) dalam Sjahrizal (2017), jika dilihat dari jangka waktunya perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis sebagai berikut :

1. Perencanaan Jangka Panjang.
Biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Dewasa ini pembangunan jangka panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. perencanaan jangka panjang bersifat makro (menyeluruh) meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya dan tata ruang namun tidak sampai kepada program dan kegiatan secara rinci. Di dalam perencanaan jangka panjang juga tercakup pentahapan pembangunan untuk masing-masing periode 5 tahunan;
2. Perencanaan Jangka Menengah
Biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mengikuti masa jabatan presiden dan kepala daerah yaitu 5 tahun. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga lebih bersifat

operasional. Perencanaan jangka menengah juga memuat sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar monitoring dan evaluasi;

3. Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan (*Annual Planning*). Rencana ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah yang bersifat operasional karena di dalamnya memuat program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya. Bahkan di dalamnya juga termuat indikator dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Oleh karena itu, rencana tahunan ini dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) dan daerah (RAPBD) (Sjafrizal, 2017:30-32).

Selain menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan bisa dilihat berdasarkan prosesnya yaitu : *top down* dan *bottom up*. Pada masa Presiden Megawati proses *top down* dimulai dari pembahasan GBHN oleh MPR diikuti dengan penyusunan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) oleh pemerintah Pusat untuk memberikan arahan bagi tujuan, kebijakan dan program nasional. Rencana Strategis pembangunan disusun berdasarkan PROPENAS dan diikuti dengan penyusunan rencana pembangunan nasional tahunan yang menetapkan prioritas anggaran pembangunan nasional. Selanjutnya seluruh pemerintah daerah diharuskan menyusun pola dasar pembangunan (POLDAS), sebagai rencana induk yang menggabungkan visi, misi, arah dan strategi pembangunan daerah dalam jangka menengah dan Panjang. Proses *bottom up*, merupakan proses konsultasi dimana setiap tingkat pemerintahan menyusun draf proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemerintahan di bawahnya. Proses ini dimulai dari musyawarah pembangunan dusun, musyawarah pembangunan desa, tingkat kecamatan kemudian dibahas di tingkat kabupaten/kota dan terakhir diajukan ke tingkat provinsi (Kuncoro, 2018:36-41).

Proses perencanaan pembangunan daerah secara umum menurut Sjafrizal(2017), "bisa dibagi menjadi empat ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan satu sama lainnya saling berkaitan". Pertama, Perencanaan Makro yang analisisnya bersifat menyeluruh meliputi semua aspek dan sektor pembangunan. Kedua, Perencanaan Sektoral yang mencakup hanya satu bidang atau sektor tertentu saja seperti pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ketiga, Perencanaan Wilayah (Regional) yang mencakup hanya untuk wilayah administratif tertentu saja, seperti provinsi, kabupaten dan kota. Keempat, Perencanaan Proyek yang mencakup perencanaan untuk membangun suatu proyek atau kegiatan tertentu aja seperti pembangunan sekolah, jalan, PLTA dan sebagainya (Sjafrizal, 2017:69).

Tahap-tahap perencanaan pembangunan menurut Blakely (1989) dalam Kuncoro (2018:77-78), "ada enam tahap meliputi (1) pengumpulan dan analisis data, (2) pemilihan strategi pembangunan daerah, (3) pemilihan proyek-proyek pembangunan, (4) pembuatan rencana tindakan, (5) penentuan perincian proyek dan (6) persiapan perencanaan sesuai keseluruhan dan implementasi". Sementara menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam catatan Kuncoro terdiri empat tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana (Kuncoro, 2018:80).

2.3.2 Pendekatan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Seperti telah disebutkan di awal bahwa sejak era reformasi terjadi banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks pembahasan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, regulasinya pun

juga mengalami perubahan mengikuti dinamika yang ada. Untuk saat ini kita mengacu setidaknya pada tiga regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Berdasarkan regulasi tersebut Kuncoro (2018), "mencatat ada empat pendekatan dalam proses perencanaan". Keempat proses perencanaan tersebut memiliki pendekatan dan ciri tersendiri yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses Politik.

Pemilihan presiden atau kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden atau kepala daerah.

2. Proses Teknokratik.

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

3. Proses Partisipatif

Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (stakeholder) antara lain melalui mekanisme Musrenbang;

4. Proses Botom Up dan Top Down

Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan (Kuncoro, 2018:77).

Selanjutnya penyusunan rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional."

Selain prinsip dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan perumusan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

2.3.3 Perencanaan Partisipatif

Pada era Orde baru paradigma pembangunannya cenderung sentralistik dengan tujuan mencapai stabilitas nasional yang tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Paradigma ini menemukan momentumnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1970-1980an yang digambarkan dengan aman dan makmur. Namun jika dikaji, sentralisasi hanya akan menimbulkan ketimpangan, rendahnya akuntabilitas, serta mematikan daya kreasi di daerah serta ketergantungan daerah pada pusat.

Momentum perubahan itu hadir ketika tahun 1997 terjadi reformasi di Indonesia yang ditandai jatuhnya rejim orde baru dan dilanjutkan dengan orde reformasi. Reformasi kemudian mendorong perubahan paradigma yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Harapannya dengan adanya perubahan paradigma ini pemerintah

daerah akan mampu membangun daerahnya berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing, serta adanya transparansi dan akuntabilitas.

Ada empat segi positif dalam kekuatan otonomi daerah yaitu Pertama, bagi pemerintah pusat, otonomi daerah akan menjadi wahana mengurangi beban pusat. Kedua, program atau rencana pembangunan yang akan diwujudkan akan lebih realistis, mengena dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Ketiga, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk belajar mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan demikian belajar menangkap dan merumuskan aspirasi masyarakat setempat. Keempat, adanya keterlibatan rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan (Abe, 2005:8).

Implementasi otonomi daerah dengan watak dasar memberikan kepercayaan pada daerah dan adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi rakyat, merupakan indikasi kuat bahwa skema otonomi daerah bisa menjadi momentum untuk menumbuhkan *good governance* (Abe, 2005:8). Untuk ciri dan prinsip utama dalam mewujudkan *good governance* menurut UNDP dalam Mindarti (2016:164-165) meliputi sembilan aspek yaitu :

1. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*

Adanya keterbukaan yang dibangun di atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan secara tepat waktu.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

5. *Consensus Orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency dan Effectiveness*

Pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna.

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategy vision*

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan ciri *good governance* di atas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu kekuatan di dalam menggerakkan pembangunan daerah di era otonomi daerah. Maka, di dalam perencanaan pembangunan daerah selanjutnya dikenal salah satu pendekatannya adalah perencanaan partisipatif.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (Abe, 2005:88). Tujuan perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang konsisten dan berdasarkan sistem prioritas yang tajam. Namun demikian, berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Tidak saja dari pengambil kebijaksanaan tertinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional namun juga diperlukan partisipasi dari masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan (Tjokroamidjojo, 1995:206).

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Setidaknya dalam sebuah perencanaan harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat yang akan menumbuhkan dukungan dalam pelaksanaannya (Tjokroamidjojo, 1995:207). Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu: pertama, keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat. Kedua, memberi nilai tambah dalam perumusan masalah perencanaan. Karena semakin banyak yang terlibat artinya semakin baik. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat (Abe, 2005:91).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menurut Conyers (1991:154-155) ada tiga alasan utama yakni :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat;

2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Kepercayaan ini menjadi penting khususnya bila tujuannya agar dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu dengan keterlibatan masyarakat, membuat mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan kegiatannya serta akan muncul rasa memiliki terhadap program dan kegiatan tersebut.;
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat dua cara dalam perencanaan pembangunan. Pertama, memobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat untuk kepentingan pencapaian tujuan pembangunan. Artinya keterlibatan masyarakat didasarkan atas hubungan satu arah dari atas ke bawah. Kedua, meningkatkan swadaya, swakarya masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 1995:209). Selanjutnya prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung akan tercapai apabila masyarakat sejak awal ikut ambil bagian dalam perencanaan. Dalam perencanaan partisipatif Abe menawarkan dua bentuk yaitu Pertama, perencanaan langsung disusun bersama masyarakat. Perencanaan ini bisa merupakan (1) perencanaan lokasi-setempat, yaitu perencanaan yang menyangkut daerah di mana daerah berada; dan (2) perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan. Kedua, perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah, seperti parlemen (Abe, 2005:91-92).

2.4 Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri

2.4.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam berbagai literatur memiliki perspektif yang sangat luas. Menurut Marmoah (2014:43), "pemberdayaan adalah peningkatan secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari

kata "power" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan". Maka, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Definsi secara konseptual disampaikan oleh Kusnadi (2015:11), "bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses sosial yang terencana untuk memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat serta menstimulasi dan memotivasi individu-individu agar mereka memiliki keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog". Proses ini ditunjang oleh upaya membangun ekonomi untuk mendukung kemandirian melalui organisasi atau kelembagaan sosial. Hal senada juga diungkapkan oleh Zubaedi (2013:24), "bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata".

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil (Zubaedi, 2013:60). Beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu individu atau kelompok atau masyarakat memiliki keberdayaan ada lima hal yaitu (1) tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi, (2) kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinyuitas, (3) kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrument pembangunan lokal, (4) berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, informasi, kapital, pasar dan teknologi, (5) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan pembangunan dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada. (Kusnadi, 2015:12).

Upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana fisik maupun sosial yang diakses oleh masyarakat paling bawah. Ketiga, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Kartasasmita, 1995).

2.4.2 Pemberdayaan Perempuan

Menurut Moulton dalam Marmoah (2014:70), "pemberdayaan perempuan sering diartikan pembagian kekuasaan yang adil sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi perempuan yang lebih besar di semua sisi kehidupan". Esensi pemberdayaan perempuan menurut Kreisber dalam Marmoah(2014:70), "adalah pertama refleksi kepentingan emansipatoris untuk mendorong perempuan agar mampu berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, proses pelibatan individu atau masyarakat ke dalam proses pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif serta dapat mengatur atau menguasai ketrampilan agar mampu menjadi partisipasi yang kritis dan efektif dalam masyarakat".

Menurut Hubeis (2016:125-126), "pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi". Pemberdayaan perempuan diindikasikan oleh situasi ketika sebagian besar mayoritas dari

perempuan akan mampu menikmati "kebebasan memilih" untuk mandiri dan mengembangkan diri sehingga dapat memiliki kesetaraan akses terhadap sumber daya di ranah domestik atau publik, memperoleh kesempatan dan kekuasaan. Lebih lanjut Hubeis (2016:135), "menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah bertujuan untuk memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduksi mereka". Pedoman kebijakan yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan ada dua hal yaitu: (1) memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa melalui kebijakan nasional yang dilakukan oleh suatu institusi yang mampu mencapai kesetaraan dan keadilan gender, (2) memperbaiki kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan seraya mempertahankan kesatuan nilai dan nilai-nilai sejarah perjuangan perempuan dalam rangka untuk melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan, keluarga dan kesejahteraan sosial (Hubeis, 2016:135).

Menurut Nugroho (2011:XXI), "ada empat indikator pemberdayaan dalam konteks kesetaraan gender yang dimulai dengan pemberdayaan bagi perempuan". Empat indikator tersebut meliputi :

1. Akses yaitu adanya kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan;
2. Partisipasi yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut;
3. Kontrol yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan control atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut;
4. Manfaat yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.

Nugroho (2011:XXII), "menyatakan bahwa pengarusutamaan gender memerlukan kondisi-kondisi dasar yang memungkinkannya bekerja secara efektif". Dalam konsep ilmu ekonomi disebut sebagai *ceteris paribus*. Maka,

untuk membangun kesetaraan gender memerlukan tiga kualitas yang meliputi sektor (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) ekonomi. Membangun gender tidak sama dengan membangun infrastruktur. Membangun gender tidak bisa dilakukan di daerah miskin, terbelakang dalam pendidikan dan masyarakatnya masih kuat budaya patriarkinya (Nugroho, 2011:XXII).

Program pemberdayaan perempuan idealnya dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan semua elemen masyarakat. Maka rancangan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan setidaknya bertujuan pada empat hal yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipan aktif(subyek) agar tidak sekedar menjadi obyek pembangunan;
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana maupun monitoring dan evaluasi kegiatan;
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya (Nugroho, 2011:163-164).

Pemberdayaan perempuan menjadi penting dalam pembangunan berperspektif gender karena adanya kesadaran bahwa perempuan memiliki peran yang sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Perempuan menjadi bagian sentral dalam keluarga dan terutama anak-anak. Kemiskinan perempuan seringkali menular kepada anak-anaknya sehingga pengentasan melalui perempuan berarti pengentasan kemiskinan anggota keluarga lainnya (Mi'radjie dan Sukidin dalam Winarno, 2013:126).

2.4.3 Pemberdayaan Perempuan melalui Desa Perempuan Indonesia Maju

Mandiri

Sebagai sebuah negara, Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya dari pergaulan negara-negara di dunia. Hal ini selaras dengan pendapat Suryono (2010:6), "bahwa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari gelombang besar yang sedang melanda dunia karena berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara". Salah satu arus besar yang memberikan dampak besar bagi Indonesia, terjadi pada tahun 2000. Pada tahun itu pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri oleh 189 Pimpinan Negara termasuk Indonesia mendeklarasikan delapan tujuan atau lebih dikenal dengan *Millenium Development Goals* (Zulyanto, 2014:X). Salah satu sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) yang cukup signifikan adalah sasaran nomor tiga yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Seiring berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, Pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September tahun 2015 yang dihadiri perwakilan dari 193 negara termasuk Indonesia, berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian *Millenium Development Goals* (MDGs) sebelumnya dengan memuat tujuh belas (17) tujuan (Kuncoro, 2018:57). Dalam tujuh belas tujuan tersebut, persoalan gender masih merupakan salah satu tujuannya. Dalam rangka mencapai tujuan kelima *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kesetaraan gender (*Gender Equity*) yang didalamnya terdiri dari yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, serta *Gender Empowerment*

Measure yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan beberapa sektor lainnya. Maka, Pemerintah Indonesia telah merintis sejak tahun 2000 dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada seluruh aparat pemerintah dari Pusat-Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan publik yang mengacu pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender yang dikenal dengan kebijakan responsif gender. Langkah advokasinya dalam pembangunan bertumpu pada dua pendekatan yaitu (1) mendudukan pemerintah sebagai *agent of change* bagi pembangunan yang adil gender dan (2) melakukan intervensi terhadap semua tahap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi (Mufidah, 2009:97-98).

Salah satu implementasinya kemudian lahir program-program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi penting dalam pembangunan berperspektif gender karena adanya kesadaran bahwa perempuan memiliki peran yang sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Perempuan menjadi bagian sentral dalam keluarga dan terutama anak-anak. Kemiskinan perempuan seringkali menular kepada anak-anaknya sehingga pengentasan melalui perempuan berarti pengentasan kemiskinan anggota keluarga lainnya (Mi'radjie dan Sukidin dalam Winarno, 2013:126).

Dalam rangka memberikan kontribusi optimal terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 58/SK/MENEG.PP/XII/2004 Tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, di samping upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan, kualitas pendidikan perempuan, serta penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Penetapan prioritas ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa kemiskinan di seluruh dunia senantiasa berdampak pada perempuan dan anak (KemenPPPA, 2012:8). Kebijakan atas upaya peningkatan produktivitas perempuan dan pengurangan beban keluarga miskin terhadap beban biaya pendidikan dan kesehatan dalam rangka otonomi daerah adalah melakukan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu model desa yang mencerminkan upaya jaminan sosial ekonomi bagi keluarga miskin, khususnya pada perempuan dan anak. Model Desa "Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) atau "Desa Mandiri" atau apapun namanya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa inilah yang menjadi salah satu strategi kebijakan pemberdayaan perempuan (KemenPPPA, 2012:9).

Salah satu Provinsi yang menjadi *pilot project* Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2008, delapan desa yang tersebar di empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi *pilot project* pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju

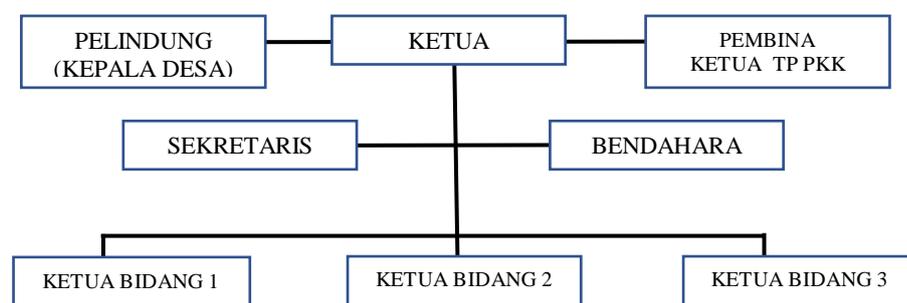
Mandiri (PRIMA) dengan anggaran dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melalui skema APBN. Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dianggap sebagai salah satu model pemberdayaan perempuan yang baik maka mulai tahun anggaran 2009 program ini kemudian dikembangkan dan dibiayai sendiri oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui aspek ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam program ini juga dikoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari berbagai instansi, LSM, organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama menghapus kemiskinan (BPPM DIY, 2017).

Pembentukan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) selanjutnya dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2009-2018 dengan jumlah keseluruhan mencapai delapan puluh tiga desa. Sasaran Pembentukan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perempuan dari keluarga miskin dengan kriteria yaitu: (1) perempuan usia produktif dari keluarga miskin yang sudah memiliki embrio usaha/industri rumahan yang mengolah bahan baku lokal, (2) diutamakan perempuan kepala keluarga, (3) diutamakan perempuan yang menjadi korban KDRT dan (4) diutamakan yang belum mendapatkan akses atau fasilitas program pemerintah lainnya (BPPM DIY, 2017).

Kriteria Pembentukan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi (1) desa yang memiliki penduduk miskin, (2) secara geografis terisolir, tidak memiliki atau belum dapat memanfaatkan sumber daya alam, akses terbatas, (3) secara ekonomis pendapatan perkapita per tahun di bawah standar minimum, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan dan termasuk daftar desa miskin, (4) telah disepakati bersama untuk ditunjuk oleh pemerintah provinsi/kabupaten sebagai lokasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan surat keputusan gubernur atau bupati (BPPM DIY, 2017).

Proses pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi perencanaan, pelaksanaan yang terdiri dari sosialisasi dan pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) serta pengendalian yang terdiri dari pelaporan dan monitoring dan evaluasi (DP3AP2, 2019:5). Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) terdiri dari minimal 25 anggota dengan struktur kepengurusan terdiri dari Pelindung (Kepala Desa/Lurah), Pembina (Ketua TP PKK Desa/Kelurahan), Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang yang digambarkan dalam struktur organisasi seperti dalam gambar 2.1 berikut ini :



Sumber: (DP3AP2, 2019: 9)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa PRIMA

Sampai saat ini, Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) menjadi salah satu program unggulan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberdayaan perempuan. Jumlah sampai Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhir tahun 2018 sebanyak 83 Desa. Adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 1 Januari 2019, maka selanjutnya Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4.4 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan ketidakstabilan nilai mata uang, peningkatan inflasi, peningkatan suku bunga dan kelangkaan bahan baku produksi menjadi faktor-faktor pendorong usaha-usaha berskala besar ambruk. Di sisi lain, dalam masa itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah justru bisa bertahan dari krisis. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu berperan sebagai penyangga (*buffer*) dan katup pengaman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis (Suyatna dalam Budiarto, dkk, 2015:5).

Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan tentang batasan-batasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dinyatakan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Selanjutnya pada Bab IV Kriteria Pasal 6 mengatur tentang kriteria skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Setidaknya ada dua alasan kenapa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bisa bertahan di masa krisis yaitu (1) Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak tergantung pada bahan baku impor dan (2) sumber dana usaha kecil berasal dari dalam negeri sehingga tidak terlalu terpengaruh akan

depresiasi rupiah (Suyatna dalam Budiarto, dkk, 2015:5). Kesuksesan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu bertahan di masa krisis, kemudian membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tumbuh pesat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan data yang dilansir oleh Kompas.com, sampai akhir tahun 2018 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia hampir mencapai 60 juta dengan rincian sebagai berikut: (1) jumlah usaha mikro di Indonesia mencapai 58,91 juta, (2) jumlah usaha kecil mencapai 59.260 dan (3) jumlah usaha menengah mencapai 4.987 (Kompas.com, 2019).

2.4.5 Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Dalam Bingkai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebagai wadah kelompok usaha perempuan akan lebih mudah dipahami jika dibingkai dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini mengingat Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) didefinisikan sebagai sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pembentukan kelompok usaha dengan anggota minimal 25 perempuan di desa yang dianggap berpotensi dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.(DP3AP2, 2019:3). Untuk modal awal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masing-masing Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebesar 37,5 Juta rupiah. Di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro dikategorikan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mengacu pada dua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebagai wadah kelompok usaha perempuan dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Masalah klasikal pada usaha-usaha mikro adalah pada aspek pengembangannya. Maka, pendekatan dalam pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) mengacu pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.5 Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri

2.5.1 Konsep Pengembangan

Menurut kamus KBBI pengembangan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembangkan. Secara konseptual pengembangan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral berdasar kebutuhan melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan, 2005). Sementara Mangkuprawira (2014:134), "mendefinisikan pengembangan sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan masa depan". Pengembangan secara eksplisit sering dikategorikan dalam pengembangan manajemen, organisasi dan individu karyawan (Mangkuprawira,2014:134).

Dalam konteks dunia usaha, Hafsah (2000:198), "mendefinisikan pengembangan sebagai cara yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat lewat bimbingan dan bantuan demi menumbuhkan serta menambah kemampuan usaha-usaha kecil supaya berubah menjadi usaha lebih tangguh dan mandiri". Jadi, berdasarkan definisi di atas, maka definisi pengembangan yang disampaikan oleh Hafsah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Hal ini

mengingat Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan wadah bagi kelompok usaha perempuan di desa.

2.5.2 Konsep Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri

Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, maka menurut pendapat Abe (2005:51), "perencanaan daerah tidak bisa disederhanakan menjadi pembahasan mengenai segi-segi teknis tentang bagaimana perencanaan disusun, melainkan harus pula menyentuh paradigma dan kepentingan-kepentingan dasar yang bekerja dalam pikiran tersebut". Unsur-unsur dasar dalam perencanaan di daerah menurut Abe (2005:51-55) memuat empat hal yaitu :

1. Sumber Masalah Harus Berbasis Data

Perencanaan pada hakekatnya adalah suatu panduan dalam melakukan langkah-langkah perubahan. Posisi ini menegaskan bahwa perencanaan di dalamnya memuat pandangan atau cara pandang terhadap masa kini dan masa lalu, terutama dalam melihat persoalan yang berkembang (Abe, 2005:52). Sejauh mana masalah tersebut dilihat, akan sangat menentukan jenis dan bentuk tindakan yang akan dilakukan. Untuk itulah perlunya sebuah data yang berisi kondisi obyektif yang biasanya tersaji dalam angka-angka statistik. Data inilah

yang akan membantu memahami dengan jernih masalah dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah (Abe, 2005:84-85).

Perencanaan dalam pemerintahan secara ringkas menurut Syamsi (1986:134), "diperlukan untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan tersusun dan dituangkan dalam anggaran". Adapun bahan perencanaan yang baik adalah data dan ramalan. Pendapat Syamsi ini juga selaras dengan pendapat Blakely dalam Kuncoro (2018:77), "bahwa tahap perencanaan yang pertama adalah melakukan pengumpulan data dan analisa data". Pendapat Syamsi dan Blakely ini juga selaras dengan regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada Pasal 274 telah mengamanatkan bahwa :

"Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah."

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membuat sebuah perencanaan daerah yang baik adalah yang berdasarkan data. Menurut Arikunto (2006:118), "pengertian data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi". Pentingnya data dalam proses pembangunan, bahkan menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. Belum lama ini dalam pidato kenegaraan tahun 2019 di depan anggota DPR tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa data itu merupakan kekayaan baru sebuah bangsa. Berikut kutipan pidatonya :

"Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," (Jamaludin, 2019)

Dari pernyataan Presiden di atas, makin menegaskan bahwa penguasaan akan sebuah data sangat penting sekali.

Menurut Tjokroamidjojo (1994), "dalam sebuah perencanaan dapat dilakukan perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkiraan mengenai potensi potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi". Berangkat dari pendapat Tjokroamidjojo maka kebutuhan akan data makin penting dan data juga dituntut untuk disajikan dengan akurat serta *up to date*. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika ingin menguraikan masalah pembangunan secara obyektif dan ingin membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut secara tepat maka basisnya adalah data.

2. Tujuan yang Hendak Dicapai

Menurut Kuncoro (2018:73), "perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang hendak dicapai". Pendapat senada diungkapkan oleh Abe (2005:XXIV), " bahwa perencanaan pada dasarnya memiliki makna penting yaitu sebagai sarana mencapai tujuan". Lebih lanjut Abe (2005:54), "menjelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendorong adanya transformasi sosial, yang sudah barang tentu tidak bisa dijalankan dalam waktu singkat namun dalam kurun waktu tertentu". Maka, dalam konteks ini sebuah perencanaan perlu disusun dalam dua bentuk yaitu: (1) rencana umum yang memuat garis besar jalan yang hendak ditempuh dan (2) suatu rencana yang lebih spesifik, yang memuat program sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada.

Menurut pendapat Sjafrizal (2017:46), "bahwa perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor dan dievaluasi dikemudian hari". Untuk itulah tujuan dan sasaran

pembangunan perlu diterjemahkan ke dalam target pembangunan secara makro atau sektoral maupun secara mikro pada tingkat program dan kegiatan. Dalam konteks daerah, tujuan yang ingin dicapai biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan sebagainya.

3. Program yang Dikembangkan

Menurut Abe (2005:54), "kualitas suatu perencanaan tidak dilihat semata-mata dari kualitas rumusnya, namun pada apa yang sebetulnya ingin dilakukan. Apa yang ingin dilakukan akan terlihat pada sebuah program yang dikembangkan". Suatu program bukan saja mengandung unsur-unsur yang sifatnya mengisi melainkan juga tindakan yang bersifat mengubah. Suatu skema perencanaan yang baru sebaiknya berbasis pada tindakan-tindakan yang bersifat fasilitatif yang pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan mendorong perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Jadi, sebuah perencanaan yang bersifat transformasi salah satu tolok ukurnya bisa dilihat dari programnya.

Sebuah program pada dasarnya merupakan upaya dan tindakan konkret dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, termasuk dana dan tenaga, yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Program dapat dirinci dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan yang lebih konkret dan spesifik pada lokasi tertentu atau tersebar pada beberapa lokasi. (Sjafrizal, 2017:65).

4. Aktor-aktor yang terlibat

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:310), "koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya menyetarakan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh

berbagai komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat". Dalam proses pembangunan koordinasi sebaiknya sudah diterapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Bryson (2016:56) "bahwa langkah awal yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan strategis adalah menetapkan siapa saja yang menjadi orang-orang penting pembuat keputusan". Langkah selanjutnya adalah menetapkan kelompok, unit atau organisasi manakah yang harus dilibatkan dalam upaya perencanaan.

Pemangku kepentingan atau lebih dikenal dengan *stakeholder* menurut Bryson (2016:60), "didefinisikan sebagai orang, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian, sumberdaya atau hasil (*output*) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu". Perencanaan dengan melibatkan *stakeholder* ini selanjutnya disebut sebagai perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah sebuah perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholder*) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang (Kuncoro, 2018:77).

Menurut Abe (2005:55), "dalam sebuah perencanaan perlu ditetapkan aktor-aktor penting yang akan menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan sebuah perencanaan". Hal ini juga selaras dengan salah satu prinsip perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebuah perencanaan perlu disusun berdasarkan prinsip dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan identifikasi awal yang menjadi aktor-aktor penting dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)

meliputi Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG selaku pelaksana program dan kegiatan, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan selaku pengambil kebijakan, Subbag Program selaku penyusun program dan kegiatan Dinas, Bappeda DIY selaku perumus kebijakan di daerah dan Kabupaten sebagai wilayah administratif kedudukan desa-desa. Dari uraian unsur-unsur perencanaan ini, maka akan menjadi pedoman dalam menganalisa perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang merupakan bagian dari perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.

2.5.3 Aspek-Aspek Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri

Mengacu pada kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebagai wadah kelompok usaha perempuan dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Maka, pendekatan dalam pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) mengacu pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dinyatakan sebagai berikut :

"Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." (Bab I, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah makin kokoh sebagai kekuatan utama soko guru perekonomian Indonesia (Budiarto, dan Saptoadi, dan Ridwan, dalam Budiarto, dkk, 2015:96). Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri Pangestika, dan Imam Santoso, dan Retno Astuti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Dukungan Kucuran Kredit (Studi Kasus: UMKM Kabupaten XYZ)" ada beberapa strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

"Terdapat sepuluh alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: (1) melakukan inovasi produk yang diolah, (2) menjaga dan mempertahankan kualitas produk, (3) menjalin kerjasama dengan mitra kerja untuk memperluas pasar, (4) mengoptimalkan pemberian dan penggunaan bantuan dana (kredit bergulir) pemerintah, (5) memperbaiki dan memperluas sistem pemasaran, (6) melakukan pengembangan teknologi produksi, (7) meningkatkan daya saing produk lokal, (8) membatasi distribusi produk impor yang berlebihan, (9) meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan UMKM, serta (10) meningkatkan promosi melalui *event-event* dengan menonjolkan ciri khas produk."(Pangestika, dan Santosa, dan Astuti, 2016:94).

Secara ringkas, Budiarto, dan Saptoadi, dan Ridwan, Susilo, dalam Budiarto, dkk (2015:99) memberikan solusi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melakukan peningkatan kualitas pada empat aspek yaitu:

1. Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen (Shinta, 2011:1). Lebih lanjut Shinta

menjelaskan bahwa peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba (Shinta, 2011:1).

Sementara menurut Drucker dalam Firmansyah (2019:4), "tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri". Idealnya, pemasaran harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Ketika Sony merancang game Play Station 3, ketika Toyota memperkenalkan mobil hibrida, perusahaan-perusahaan tersebut dibanjiri pesanan karena mereka telah merancang produk yang tepat sebagai hasil pemasaran yang cermat (Firmansyah, 2019:4).

Secara umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia dihadapkan pada masalah pemasaran produk mereka. Penguatan pasar ini diprioritaskan terutama untuk menembus pasar yang ada dengan cara sebagai berikut: (1) peningkatan akses informasi pasar, (2) pemenuhan standar kualitas pasar, (3) peluncuran produk inovatif sesuai selera pasar, (3) pengembangan atau perluasan konsumen sasaran (Budiarto, dkk, 2015:100). Pendapat Budiarto, dkk di atas juga selaras dengan hasil penelitian Dadan Sutrisno, dan Agus Suryono, dan Abdullah Said (2016) yang berjudul "Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)" yang menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan pemasaran usaha mikro adalah: (1) membangun jaringan kerjasama hulu-hilir dengan memberdayakan komunitas/ asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan (2) memfasilitasi

pembangunan jaringan pemasaran online terpadu berbasis komunitas (Sutrisno, dan Suryono, dan Said, 2016:111).

Pemasaran online adalah pemasaran dengan menggunakan media internet sebagai media pemasaran suatu produk atau jasa (Timothy, 2010:2). Keuntungan melakukan pemasaran online menurut Timothy setidaknya ada lima hal yaitu (1) membuat informasi menjadi lebih mudah bagi pelanggan, (2) memotong biaya operasional secara signifikan, (3) meningkatkan citra sebuah produk, karena saat ini seringkali sebuah produk dinilai bagus dan serius jika mudah diakses lewat internet, (4) produknya lebih mudah diakses di setiap belahan dunia tanpa memperdulikan lokasi fisiknya dan (5) kemampuan untuk menjual produk selama dua puluh empat jam bahkan saat ditinggal tidur sekalipun (Timothy, 2010:5).

Mengutip dari laporan *We Are Social* diungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni sebesar 132,7 juta. Bila dilihat dari jumlah pengguna internetnya, maka bisa dibilang seluruh pengguna internet di Indonesia sudah mengakses media sosial. *We Are Social* mengatakan 132,7 juta pengguna internet, 130 juta diantaranya pengguna aktif di media sosial dengan penetrasi 49%. Kemudian *platform* media sosial yang paling digandrungi oleh orang Indonesia yaitu (1) YouTube 43%, (2) Facebook 41%, (3) WhatsApp 40%, (4) Instagram 38%, (5) Twitter 27%, (6) Google+ 25% (Haryanto, 2018).

2. Teknologi dan Inovasi

Teknologi dapat diartikan sebagai barang, alat, proses, metode atau prosedur yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Putero dalam Budiarto, dkk, 2015:54).

Bagi suatu negara teknologi mempunyai posisi sentral dalam usahanya meraih berbagai target. Keunggulan teknologi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, produktivitas industri serta perdagangan dan daya saing internasional (Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo, 2015:104).

Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada aspek teknologi terkait dalam proses produksi maupun dalam hal pengemasan (*packaging*). Teknologi dan inovasi juga dapat digunakan dalam memasarkan produk tidak lagi bergantung dengan pemasaran konvensional namun juga melalui pemasaran online dengan memanfaatkan media sosial facebook, instagram, twitter, website, dan sebagainya. Hal ini diperkuat pendapat Putero dalam Budiarto, dkk (2015:57), "bahwa di era teknologi seperti saat ini dikenal istilah *technopreneurship* yaitu wirausaha berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan". Lebih lanjut Putero menjelaskan bentuk *technopreneurship* meliputi (1) pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam proses desain produk, (2) pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam proses produksi, (3) pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam proses pemasaran produk, dan (4) usaha produk yang padat teknologi untuk segmen pasar yang baru (Putero dalam Budiarto, dkk, 2015:57).

Teknologi yang perlu diperkenalkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah teknologi tepat guna. Definisi Teknologi Tepat Guna menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 adalah :

"Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan."

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan Mardiana Andarwati, Edi Subiyantoro, Tutut Subadyo (2018) yang berjudul "Pengaruh Pelatihan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Terhadap Keberdayaan Pengrajin Batik Tulis Ramah Lingkungan" menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah batik tulis di Trenggalek dalam proses produksi menggunakan teknologi tepat guna berupa pewarna alami dan penggunaan meja gambar batik terbukti bahwa kegiatan produksi lebih cepat dan lebih berkualitas.

Sementara untuk tujuan sebuah inovasi idealnya akan mendorong produktivitas dan daya kompetisi. Menurut Bakhshi (2011) inovasi didefinisikan meliputi tiga hal yaitu (1) sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan dengan cara baru guna menarik seseorang, (2) proses menemukan solusi terhadap suatu tantangan dan (3) produk yang betul-betul baru atau produk lama yang diubah sehingga berfungsi lebih baik (Bakhshi dalam Budiarto, dkk, 2015:108). Salah satu inovasi yang sering dilakukan dalam dunia usaha adalah dengan membuat produk baru. Maka salah satu yang perlu diperkenalkan inovasi menurut pendapat Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo (2015:103), "bahwa pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diperkenalkan pada aspek teknologi dan inovasi terkait dalam pengemasan (*packaging*). Hal ini agar produknya tetap baik, tahan lama dan menarik bagi konsumen".

3. Permodalan

3.1 Konsep Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Permodalan pada dasarnya merupakan salah satu aspek penting dalam rangkaian pengelolaan dan pengembangan roda bisnis karena semua kegiatan dalam dunia usaha pada akhirnya akan ditentukan oleh keuangan yang ada (Rusland, Herani dan Aziz, Abdul, 2009: 20). Secara umum sumber permodalan

bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat di bagi menjadi dua yaitu (1) modal sendiri, dan (2) modal dari luar (Rusland, Herani dan Aziz, Abdul, 2009: 21).

Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengalaman selama ini menunjukkan sumber pembiayaan lebih disandarkan pada kredit bank. Kredit idealnya menjadikan rangsangan dan suntikan modal yang bersifat sementara. Pemberian kredit harus mampu mendorong produksi yang akhirnya meningkatkan tabungan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi inilah yang disebut sebagai kapitalisasi permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo (2015:111)

Selama ini usaha mikro masih memandang bank sebagai institusi yang tidak mudah dijangkau dan sulit diakses. Hal ini dikarenakan usaha mikro seringkali tidak mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknis dari perbankan. Kondisi ini dapat dipahami, karena pada umumnya di negara-negara berkembang pasar modal dan lembaga-lembaga keuangan nonbank belum berkembang baik, maka permodalan dunia usaha banyak bergantung dari perbankan (Rusland, Herani dan Aziz, Abdul, 2009: 21).

3.2 Permodalan Desa PRIMA dalam Perspektif Undang-Undang Desa

Pada tahun 2014 terjadi momentum perubahan bagi desa yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menempatkan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan namun memberikan modal bagi desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini merujuk pada dua asas utama dari tiga belas asas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dijelaskan bahwa pengaturan desa berdasarkan rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Pengaturan desa berdasarkan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Kewenangan merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri diatur dalam Pasal 19 penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

"Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari kewenangan desa di atas menunjukkan bahwa posisi desa selanjutnya bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa (Silahuddin, 2015:11).

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini ternyata menjadi satu nafas dengan visi dan misi presiden periode tahun 2014-2019 yang dikenal dengan Nawa Cita dimana pada Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Kurniawan, 2015:11). Maka, posisi desa selanjutnya selain diperkuat

kewenangannya dalam mengatur rumah tangganya sendiri, juga diberikan penguatan dalam hal sumber-sumber pendapatannya.

Sumber-sumber pendapatan bagi desa selanjutnya menjadi lebih beragam sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini tercantum pada Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

"Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah."

Dari tujuh sumber pendapatan desa yang paling menarik adalah adanya alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Negara yang kemudian dikenal dengan dana desa. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana desa adalah :

"Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".

Mengacu pada dana desa dan enam sumber pendapatan lainnya bagi desa menunjukkan bahwa desa saat ini memiliki keleluasaan di dalam sumber-sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun dan memajukan desanya.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa :

"Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa".

Kemudian pada Pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa :

"Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan d. peningkatan pelayanan publik".

Dari uraian di atas, untuk pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa.

4. Manajemen

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemampuan untuk memberikan tanggapan yang cepat dan tepat pada setiap tantangan maupun isu yang dihadapi merupakan kunci keberhasilan untuk dapat bersaing. Kemampuan tersebut berkaitan erat dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang manajemen (Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo, 2015:121). Merujuk hasil penelitian Lila Bismala (2016) yang berjudul "Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah" hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Model manajemen usaha ini mengadopsi dari manajemen perusahaan, yang bekerja pada aspek manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran.

Selain itu dalam aspek manajemen bahwa seorang pemimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap anggotanya. Seorang pemimpin tidak sekedar memiliki karisma dan menjadi panutan bagi anggotanya. Di sisi lain pemimpin juga bisa menjadi *inspirational motivation* yaitu pemimpin yang mampu menanamkan visi yang inspiratif, pembangkit semangat, *team work* dan optimisme diantara anggotanya. (Santosa dalam Budiarto, dkk, 2015:122).

Berdasarkan uraian tentang aspek-aspek pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dapat mengadopsi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aspek-aspek pengembangannya meliputi empat aspek yaitu (1) pemasaran, (2) teknologi dan inovasi, (3) permodalan, dan (4) manajemen.

2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan

Perencanaan sebagai sebuah aktivitas bersifat dinamis, hal ini dikarenakan perencanaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengacu pada pendapat Riyadi dan Bratakusuma (2003:15-39) keberhasilan atau kegagalan suatu program perencanaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan

Faktor pertama adalah lingkungan. Faktor ini bisa ditinjau dari: (1) pertama, sisi luar (eksternal) seperti pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional dan (2) kedua, sisi dalam (internal) yang merupakan pengaruh dari dalam wilayah rencana sendiri. Secara ringkasnya unsur-unsur faktor lingkungan dapat dibagi menjadi tiga bidang yang meliputi:

a. Sosial

Dalam kondisi ideal, masyarakat dapat menjadi tujuan dari sebuah perencanaan sekaligus menjadi subyek sebuah perencanaan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut harus diperhatikan gambaran tentang kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kehidupannya, stratifikasi sosial yang membentuk hirarkhi dalam masyarakat, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Dalam konteks masyarakat yang plural misalnya, proses perencanaannya tidak mudah karena akan muncul berbagai kepentingan yang beragam yang bisa mendorong sikap penolakan maupun penerimaan terhadap hasil perencanaan. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat tercapai sebuah konsensus bersama.

b. Budaya

Faktor sosial di atas, tidak dapat dipisahkan dari faktor budaya. Keduanya saling berkaitan bahkan sulit untuk dipisahkan. Kehidupan sosial kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat, yang terus berkembang menjadi nilai-nilai budaya yang melekat dalam interaksi antar anggota masyarakat. Maka, dalam konteks perencanaan pembangunan daerah faktor budaya atau kultur harus menjadi salah satu pertimbangan penting.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting dikarenakan pada sebuah fakta bahwa di negara-negara berkembang, umumnya yang diprioritaskan pertama adalah pembangunan ekonomi. Kondisi ekonomi

yang meningkat akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang yang lain.

d. Politik

Faktor politik merupakan faktor lain yang dipandang dapat mempengaruhi jalannya proses pembangunan. Dalam konteks ini dapat dilihat pada ideologi yang dianut oleh suatu negara. Ideologi sebagai falsafah negara dipandang sebagai unsur yang memberikan pengaruh kuat terhadap pola, sistem dan kultur yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan termasuk proses perencanaan pembangunan di dalamnya.

2. Faktor sumber daya manusia perencana

Sumber daya manusia perencana merupakan faktor utama yang menggerakkan pelaksanaan perencanaan. Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas. Di sisi lain perencanaan yang baik lebih memungkinkan untuk dapat diimplementasikan dalam program-program pembangunan. Maka, seorang perencana pembangunan pun dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan luas yang jauh ke depan serta harus memiliki kemampuan yang bersifat multidisipliner dan intersektoral serta selalu mengupdate wawasan serta mengembangkan kemampuan sesuai dinamika pembangunan daerah.

3. Faktor sistem yang digunakan

Sistem perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini merupakan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunannya. Pada dasarnya, sistem ini dipengaruhi oleh ideologi yang dianut. Hal ini bisa menyangkut masalah prosedur, mekanisme

pelaksanaan, pengambilan keputusan dan sebagainya. Keberhasilan maupun kegagalan perencanaan pembangunan tergantung pada kondisi dan situasi yang mendukung pelaksanaan serta adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

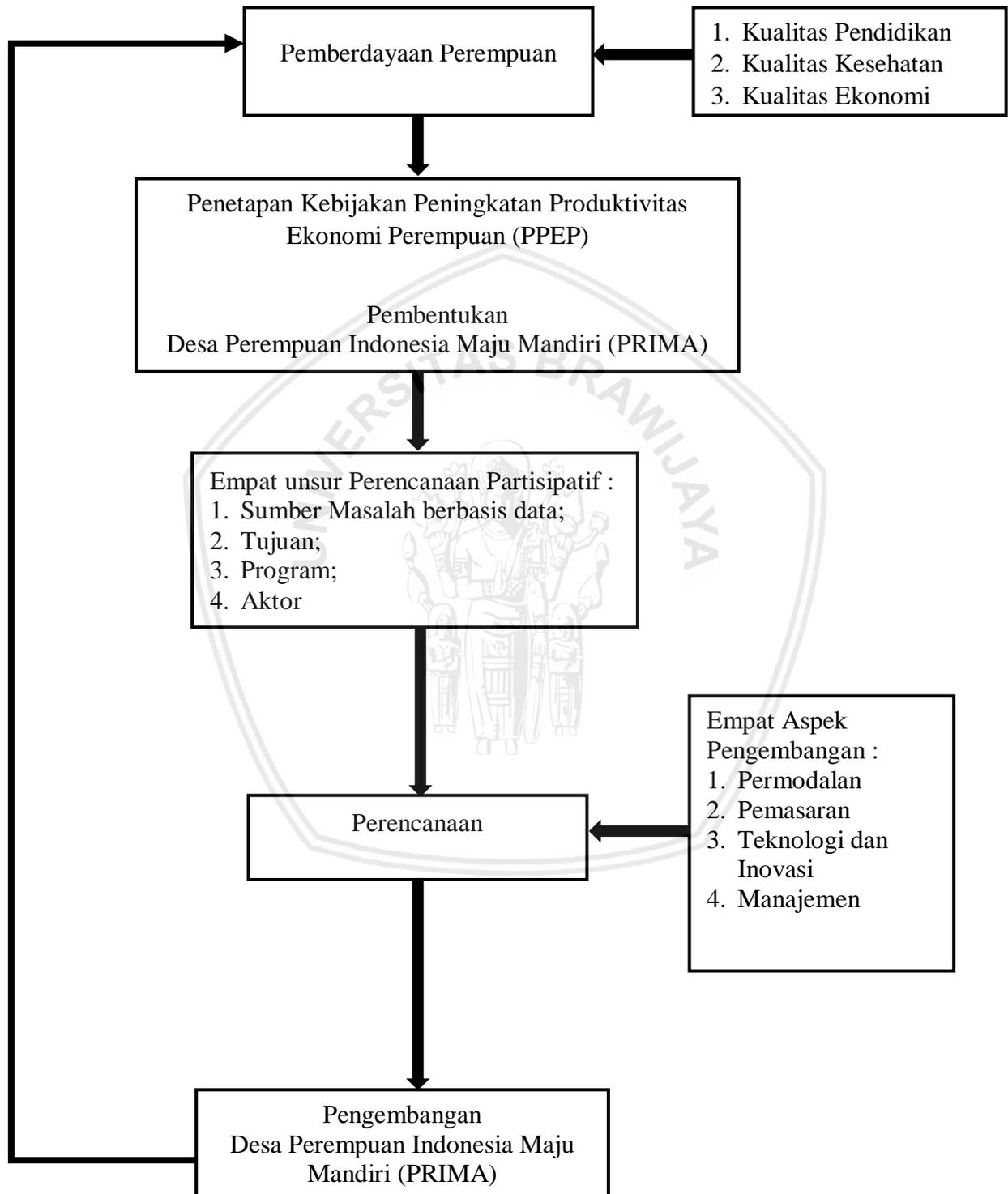
4. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi

Perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat mendorong lahirnya berbagai ilmu baru, berbagai macam temuan maupun terobosan dalam berbagai bidang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, teknologi dan informasi dapat mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan suatu daerah. Meskipun pemanfaatan ilmu dan teknologi tidak dapat diseragamkan karena letak dan kondisi geografis suatu wilayah sangat berpengaruh. Faktor terpenting adalah sejauhmana sumber daya manusia perencananya mampu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi secara optimal untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan suatu daerah .

5. Faktor pendanaan

Faktor pendanaan merupakan faktor yang sudah *given* artinya bahwa hal tersebut harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Maka, perencanaan pembangunan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mahal. Dalam pelaksanaannya, perencana harus benar-benar fokus, teliti dan punya komitmen terhadap tugasnya serta tujuan yang ingin dicapai. Tak kalah penting dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan sumber anggarannya, berapa kebutuhannya dan bagaimana sistem pengelolaannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

ANALISA SOCIAL SETTING LOKASI PENELITIAN**3.1 Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan status sebagai Daerah Istimewa. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Pengukuhanannya dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang menyebutkan Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi (Bappeda DIY, 2019).

Setelah melalui proses panjang, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta makin menguat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruh keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sekedar terletak pada keberadaan Sultan sebagai kepala daerah, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu satunya pemerintah daerah setingkat provinsi yang kepala daerahnya tidak dipilih melalui pemilihan langsung. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengenal pemilihan langsung, melainkan melalui penetapan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akan dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akan dijabat oleh

KGPAA Paku Alam (Bappeda, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 pada Pasal 7 ayat 2 dinyatakan kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam aspek keistimewaan meliputi lima aspek yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (3) kebudayaan, (4) pertanahan, dan (5) tata ruang.

3.1.1. Lokasi dan Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki luas wilayah 3.185, 80 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70.33'- 80.12' Lintang Selatan dan 1100.00' - 1100.50' Bujur Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di pulau Jawa bagian tengah, dengan batas wilayah meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Bappeda, 2019)

Daerah Istimewa Yogyakarta secara administratif terdiri dari satu kota yaitu Kota Yogyakarta dan empat kabupaten yaitu (1) Kabupaten Bantul, (2) Kabupaten Kulon Progo, (3) Kabupaten Gunungkidul dan (4) Kabupaten Sleman dengan jumlah kecamatan sebanyak 78 kecamatan dan 438 Desa/Kelurahan serta 4.508 pedukuhan (BPS Provinsi DIY, 2019:15). Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- a. Pegunungan Selatan, luas : $\pm 1.656,25$ km², ketinggian : 150 – 700 m;
- b. Gunung berapi Merapi, luas : $\pm 582,81$ km², ketinggian : 80 – 2.911 m;
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo, luas : $\pm 215,62$ km², ketinggian : 0 – 80 m;

- d. Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan, luas : $\pm 706,25$ km², ketinggian : 0 – 572 m (BPS Provinsi DIY, 2019:4).

3.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 terdiri dari 3.802.872 dengan sebaran penduduk seperti tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Wilayah	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	218.706	208.792	427.498
2	Kabupaten Bantul	507.856	498.836	1.006.692
3	Kabupaten Kulon Progo	216.158	209.600	425.758
4	Kabupaten Gunungkidul	380.928	355.282	736.210
5	Kabupaten Sleman	597.746	608.968	1.206.714
	Jumlah	1.921.394	1.881.478	3.802.872
	Total	3.802.872		

Sumber: DP3AP2 DIY, 2019, Data Gender dan Anak DIY 2019

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta terbanyak berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo menjadi paling sedikit. Untuk komposisi jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 paling banyak adalah perempuan yaitu 1.921.394 jiwa atau 50,52 %.

3.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada rapat paripurna istimewa di DPRD DIY tahun 2017 adalah Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Selanjutnya berangkat dari tema visi tersebut dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2017-2022, visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja."

Untuk misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah "Kemuliaan Martabat Manusia Jogja Menyandang Misi Lima Kemuliaan" atau Panca Mulia, yakni :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (Bappeda DIY, 2019).

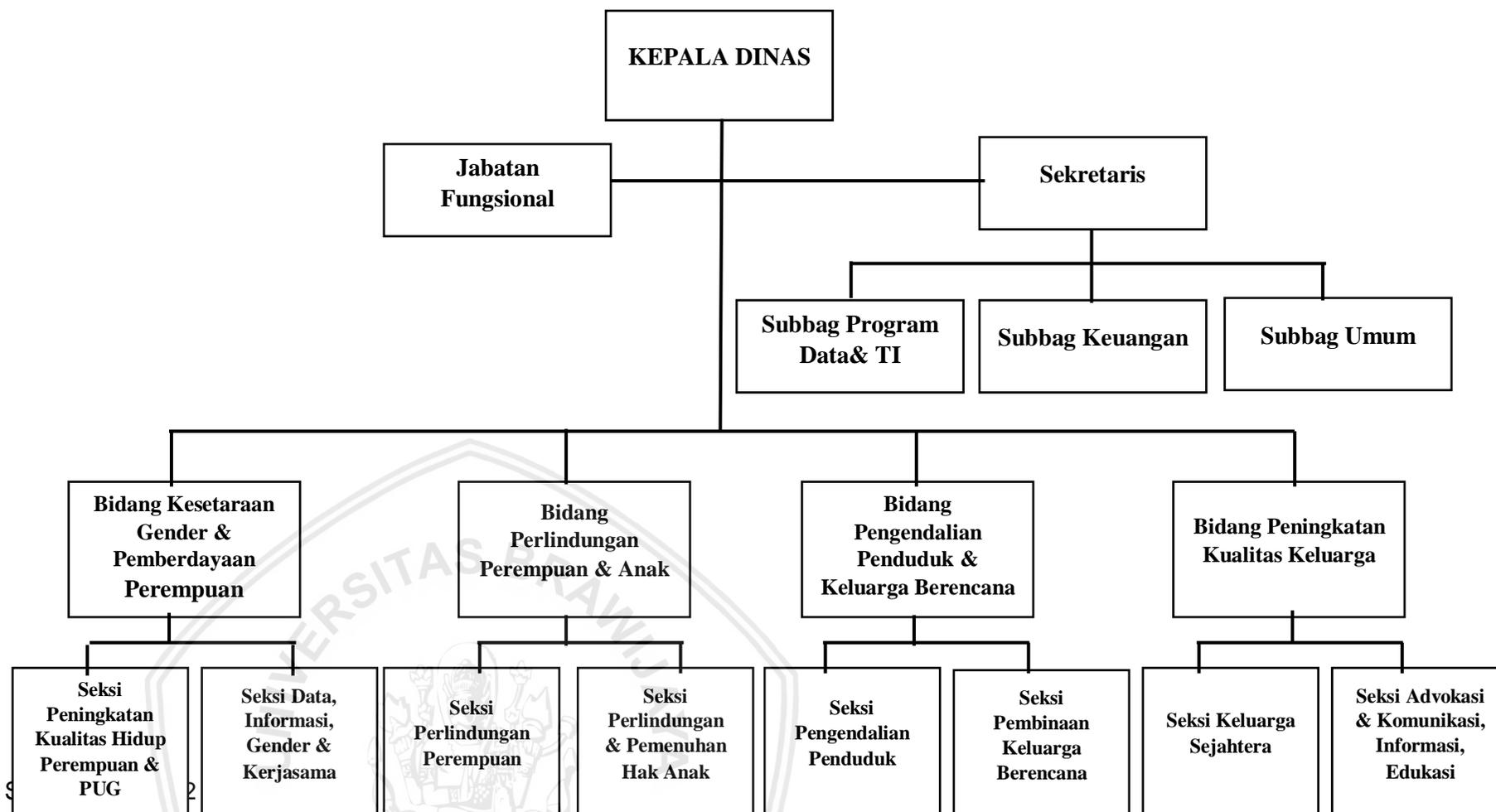
3.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada awal tahun 2019, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya penataan kelembagaan ini membawa konsekuensi, salah satunya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar pengaturan Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY, 2019:2-1).

Berdasarkan peraturan tersebut, susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutmaan Gender;
 - b. Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama.
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Keluarga Berencana.
6. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, terdiri dari:
 - a. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional (DP3AP2 DIY, 2019:2-1).



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

3.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
2. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Dalam rangka pencapaian visi di atas,

sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung pencapaian melalui misi ke satu yaitu meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Adapun tujuan yang hendak dituju adalah meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya, dengan sasaran meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat inklusif gender dan mana bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain. Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Tercapainya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang. Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan;
3. Tercapainya keluarga tangguh Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera, menyongsong peradaban baru. Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga adalah Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia;
4. Terwujudnya kinerja instansi yang akuntabel. Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Secara umum metode studi kasus menurut Yin (2018:11), "merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana dan mengapa. Hal ini disebabkan pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan kaitan-kaitan operasional yang menuntut pelacakan waktu tersendiri, dan bukan sekadar frekuensi atau kemunculan".

Penelitian Kualitatif sendiri menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4), "merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". Sementara menurut Sugiyono (2018:23), "tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik".

4.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:55-57), "batasan masalah disebut dengan fokus, yang berguna untuk mempertajam penelitian".

Maka, fokus penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini diformulasikan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

a. Unsur-unsur perencanaan yaitu :

- 1) Sumber masalah berdasarkan data;
- 2) Tujuan perencanaan;
- 3) Program yang dikembangkan dan;
- 4) Aktor-aktor yang terlibat.

b. Empat aspek pengembangan yaitu :

- 1) Pemasaran;
- 2) Teknologi dan inovasi;
- 3) Permodalan dan;
- 4) Manajemen.

2. Faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi :

a. Faktor Pendukung :

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor sistem yang digunakan;
- 3) Faktor perkembangan ilmu dan teknologi dan;
- 4) Faktor pendanaan.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Faktor sumberdaya manusia perencana.

4.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dipilih karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Pertama, tingkat kemiskinan dan ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu di atas angka nasional;
2. Kedua, Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak perempuan sehingga menjadi relevan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu strategi yang dipilih di Daerah istimewa Yogyakarta;
3. Ketiga, Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) telah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dari sepuluh tahun dengan jumlah desa yang terbentuk sebanyak delapan puluh tiga desa;
4. Keempat, berdasarkan pra penelitian provinsi yang memiliki Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan jumlah terbanyak di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kelima, Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dalam pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

Selanjutnya untuk situs penelitiannya dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan lofland (1984:47) dalam Moleong (2017:157), "sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Di samping kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen

dan lain-lain". Untuk mendukung penelitian ini, maka data yang digunakan meliputi :

1. Data Primer

Menurut Moleong (2017:157), "data primer merupakan data utama yang diperoleh dari para informan melalui wawancara dan hasil observasi pada penelitian ini". Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, pengambilan foto atau film. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui informan kunci meliputi: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk(Dinas P3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda DIY, Kabupaten dan Desa PRIMA.

2. Data Sekunder

Menurut Moleong (2017:159-160), "data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis terkait dengan penelitian ini". Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia seperti Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PEPP), buku data terpilah gender dan anak, buku pedoman Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dan dokumen lainnya tentang pelaksanaan

Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.5 Informan

Dalam penelitian ini informan diambil dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono(2018:24-25), "*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu yaitu orang yang menguasai informasi dari obyek yang diteliti". Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan informan kunci dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menguasai informasi tentang Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Memiliki ketugasan yang bersinggungan dengan program pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penelitian ini akan di mulai dari informan kunci yang dijelaskan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Informan Kunci

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.	Penanggungjawab Program dan Kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	Penanggungjawab kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta

3	Kepala Subbagian Program Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	Penyusun Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
4	Kepala Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta	Penyusun Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Kepala Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	Penanggungjawab Data Gender dan Anak pada Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
6	Perencana Seksi Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	Perencana
7	Bidang Kesra Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta	Perumus kebijakan Teknis di dalam perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Perencana Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman	Mitra pada tingkat Kabupaten
9	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo	Mitra pada tingkat Kabupaten

Seluruh informan kunci diwawancarai langsung oleh peneliti di kantornya masing-masing pada bulan Agustus sampai September 2019 dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu. Mengingat kesibukan para informan, maka wawancara dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal masing-masing informan dan untuk wawancara dengan setiap informan dilaksanakan lebih dari dua kali tatap muka.

4.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Menurut pendapat Manzilati (2017:65), "observasi merupakan sumber awal dari pengetahuan manusia, di dalam memahami dunianya sehari-hari untuk dipergunakan sebagai alat sistemik bagi ilmu sosial sebelum wawancara atau *group discussion*". Pendapat Manzilati ini juga senada dengan pendapat Nasution (1988) dalam Sugiyono (2018:106), "bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi". Selanjutnya Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2018:106), "membagi observasi menjadi tiga jenis yaitu observasi partisipan, observasi secara terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur".

Dalam penelitian ini peneliti memilih observasi partisipan. Menurut Sugiyono (2018:106), "dalam observasi partisipan peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian". Observasi partisipan yang dilakukan peneliti meliputi: mengikuti proses pencermatan perencanaan di seksi Seksi Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dan PUG, mengikuti proses pencermatan perencanaan dan penganggaran di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengikuti proses pelatihan inovasi berupa pelatihan higienis dan pengurusan PIRT, serta mengikuti proses pameran karya perempuan tahun 2016.

2. Wawancara

Moleong (2017:186), "mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". Maksud mengadakan wawancara, menurut Berg (2005) dalam Manzilati (2017:70), "wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data". Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada informan-informan kunci yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda DIY dan Dinas urusan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman.

3. Dokumen

Menurut Moleong (2017:216-2017), "dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data". Hal ini dikarenakan banyak hal dalam dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Dokumen biasanya dibagi atas (1) dokumen pribadi seperti catatan wawancara dan (2) dokumen resmi seperti Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, buku data terpilah gender dan anak, buku pedoman Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), foto-foto kegiatan dan dokumen lainnya tentang pelaksanaan Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.7 Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data, dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:185), "menggunakan empat kriteria meliputi (1) uji kredibilitas, (2) *transferabilitas (validitas eksternal)*, (3) kebergantungan (*dependabilitas*) dan (4) *konfirmasiabilitas (obyektivitas)*". Untuk menjaga agar penelitian penulis tetap dalam koridor ke empat kriteria tersebut, penulis menggunakan dua teknik yaitu :

a. *Triangulasi*

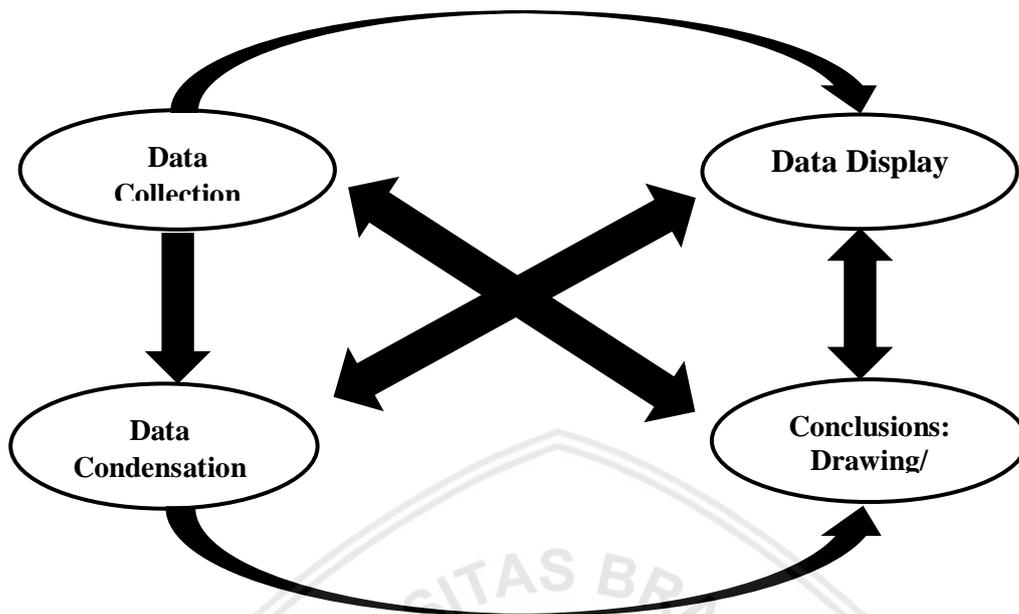
Menurut Sugiyono (2018:189), "*triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu". Sebagai contoh dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan kemudian dicek dengan data hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG. Data data hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG selanjutnya dicek dengan hasil wawancara Kepala Subbagian Program. Hasil wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dicek dengan hasil wawancara dengan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten.

b. Menggunakan bahan referensi

Menurut Sugiyono (2018:192), "bahan referensi merupakan data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti". Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung foto-foto. Foto-foto dan alat rekam misalnya diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan wawancara Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan kemudian diberi tambahan dari kutipan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Hasil wawancara hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG diberi tambahan foto-foto kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

4.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada waktu pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono:2017:132). Proses analisis datanya menurut penjelasan Moleong (2017:247), "dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya". Langkah-langkah analisis data menggunakan *interactive model analysis* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) dalam Sugiyono (2017:143) ditunjukkan dalam gambar 3.1.



Sumber :Miles and Huberman (2014) dalam Sugiyono (2017:143)

Gambar 4.1. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif (Interactive Model Analysis)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumen atau gabungan ketiganya. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi (Sugiyono, 2017:134). Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada seluruh informan kunci. Selain itu melakukan observasi pada proses pencermatan perencanaan pengembangan Desa PRIMA tahun 2020 yang dilakukan di Dinas P3AP2 DIY dan observasi kegiatan pengembangan Desa PRIMA pada aspek inovasi produk. Peneliti juga melakukan studi dokumen seperti laporan kegiatan pengembangan Desa PRIMA, buku panduan Desa PRIMA, hasil kajian Desa Mandiri Budaya, foto-foto kegiatan pengembangan Desa PRIMA dan lain sebagainya.

2. Data Condensation (Kondensasi Data)

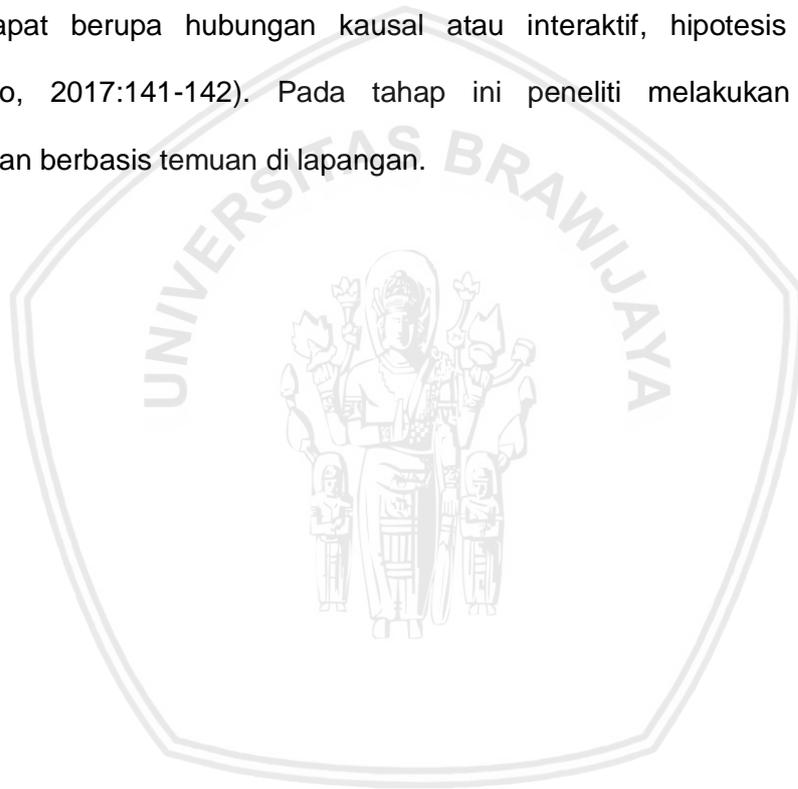
Miles dan Huberman pada tahun 2014 mengganti reduksi data menjadi kondensasi data. Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagi dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan kondensasi data maka data akan menjadi lebih kuat (Miles and Huberman (2014) dalam Sugiyono, 2017:142). Pada tahap ini peneliti mengolah hasil wawancara dari seluruh informan kunci menjadi transkrip wawancara. Kemudian melakukan telaah data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen. Dari proses ini kemudian peneliti melakukan pemilihan data disesuaikan dengan fokus yang ada pada penelitian ini.

3. Data Display (Penyajian Data)

Pada tahap ketiga ini setelah data selesai direduksi, maka dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Untuk penelitian kualitatif yang paling dominan adalah teks yang bersifat naratif. Tujuan display data ini lebih untuk memudahkan seorang peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, 2017:137). Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data berupa narasi yang dilengkapi transkrip wawancara, tabel dan gambar sehingga mampu menggambarkan fokus penelitian secara mendalam.

4. Conclusion: Drawing (Verifikasi)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2017:141-142). Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan berbasis temuan di lapangan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta

5.1.1.1 Sumber Masalah Berbasis Data

Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada awalnya merupakan salah satu implementasi dari kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2008 Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi *pilot project* kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Mulai tahun 2009 sampai 2019 sekarang ini, kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) diadopsi dan dibiaya oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada awal tahun 2019, maka program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dilanjutkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dilaksanakan, tentu saja diawali dengan sebuah proses perencanaan. Dalam proses perencanaan, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dengan berbasis data. Berdasarkan

data yang dilansir oleh BPS, kemiskinan menjadi salah satu isu pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2018, kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta masih di atas kemiskinan Nasional. Data tahun 2018, menunjukkan angka kemiskinan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada angka 11,81 % dan angka kemiskinan Nasional pada angka 9,66%. (BPS, 2019). Perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka, sejak awal perencanaan penentuan lokasi sasaran menggunakan data kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY :

"Untuk penentuan lokasi sasaran kita menggunakan data kemiskinan mas. Provinsi biasanya lokasi sasarannya sampai kecamatan dan untuk lokasi desa kita serahkan kepada kabupaten. (Wawancara 1 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Pernyataan Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Kalau penentuan lokasi sasaran Desa PRIMA selama ini kita mengacu data BPS tentang kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dik. Selain itu ada kriteria tambahan yang sudah ditentukan seperti diutamakan perempuan miskin yang merupakan kepala rumah tangga, korban KDRT, penyandang disabilitas dan tentu saja memiliki embrio usaha." (Wawancara 7 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Berdasarkan dokumen perencanaan terdahulu saat masih menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun anggaran 2008 sampai 2015 perencanaan lokasi sasaran Desa

Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) menggunakan data kemiskinan dari BPS sehingga menjangkau empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya perubahan kebijakan sasaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016-2017 di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka lokasi sasaran program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada data kecamatan yang masuk kantong kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut lima belas lokasi kecamatan yang masuk dalam kantong kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 5.1 Kantong Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2017

No	Nama Kabupaten	Kecamatan
1	Bantul	1. Dlingo
		2. Imogiri
		3. Jetis
2	Gunungkidul	1. Gedangsari
		2. Karangmojo
		3. Ngawen
		4. Nglipar
		5. Patuk
		6. Playen
		7. Ponjongsari
		8. Saptosari
		9. Semin
		10. Wonosari
3	Kulon Progo	1. Kokap
		2. Sentolo

Sumber : Arsip Kasubbag Program Dinas P3AP2 DIY

Penentuan lokasi sasaran Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan data kemiskinan juga dikuatkan oleh Bapak Ari dari Bidang Kesra Bappeda DIY selaku mitra kerja :

"Untuk penentuan lokasi Desa PRIMA pernah menggunakan data lima belas kantong kemiskinan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika di lima belas lokasi tersebut sudah ada Desa PRIMANYA maka boleh mengambil di lokasi lain namun tetap prioritasnya di situ. Mulai 2018, kebijakan penentuan lokasi Desa PRIMA menggunakan tematik kemiskinan. Jadi, lebih luas lagi cakupannya." (Wawancara 26 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesra Bappeda DIY).

Untuk saat ini dengan melihat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, strategi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif dengan memunculkan skema tematik yang terdiri dari :

"Empat tema yang terdiri dari (1) tematiik pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan, (2) pengurangan ketimpangan wilayah, (3) respon terhadap pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan (4) pembiayaan pembangunan non pemerintah."(Bappeda, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, mengecek dokumen perencanaan dan observasi, dapat diinterpretasikan bahwa di dalam menentukan masalah lokasi sasaran Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam perencanaan telah menggunakan basis data. Sayangnya penggunaan data dalam menentukan masalah dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilakukan secara maksimal. Indikasinya, meskipun Program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada satu dasawarsa namun sampai akhir tahun 2018 belum tersedia data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Data Profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang dimaksud tidak sekadar berisi nama-nama desa, tetapi juga berisi daftar pengurus dan jumlah anggotanya, jumlah aset, jenis usaha dan sebagainya. Kekurangan ini juga disadari oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY:

"Data Desa PRIMA sebenarnya ada mas. Karena setiap desa wajib laporan kepada kita setiap tahun. Namun untuk pengolahan datanya, kita akui

jarang kita sentuh. Selama ini paling hanya sebatas dilihat, jika ditemukan ada pengelolaan keuangan yang bermasalah baru kita tindaklanjuti." (Wawancara 1 Agustus 2019, di Ruang Bidang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Kekurangan ini setelah dikonfirmasi kepada Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY juga didapatkan jawaban yang relatif sama :

"Untuk data tentang Profil Desa PRIMA secara keseluruhan dan rinci kami akui kami belum memiliki dik. Karena selama ini kebutuhan kita untuk laporan capaian kinerja, cukup melampirkan data desa prima setiap tahun yang terbentuk berapa? Untuk Renstra 2017-2022 misalnya ya dik, setiap tahun kita targetnya terbentuk 15 Desa PRIMA. Jadi, nanti setiap tahun kita cuma melaporkan nama-nama 15 Desa PRIMA yang terbentuk. Namun, kemarin di forum pimpinan kami sudah mendapatkan arahan agar momentum perubahan kelembagaan tahun ini dan Desa PRIMA sudah genap sepuluh tahun, agar dijadikan pendorong untuk membuat pemetaan Desa PRIMA se Daerah Istimewa Yogyakarta." (Wawancara 7 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Ketersediaan data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penting, karena data tersebut merupakan pembuka wawasan bagi perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Membaca data akan mempermudah di dalam menguraikan sumber permasalahan dan juga akan mempermudah di dalam membuat intervensi yang tepat sasaran. Hal ini diungkap oleh Pak Soleh Kepala Subbagian Program Dinas P3AP2 DIY:

"Kalau yang jelas mas, terkait dengan perencanaan program maupun kegiatan yang paling bagus itu ya harus berbasis data. Dan saat ini tidak hanya level OPD namun juga Nasional dituntut semua harus berbasis data. Kalau kita melakukan perencanaan berbasis data nantinya akan menghasilkan ketepatan intervensi. Untuk Desa PRIMA ya mas, kekurangannya sampai saat ini tidak tidak mampu menunjukkan data secara keseluruhan. Maka tak dorong untuk segera membuatnya." (Wawancara, 19 Agustus 2019 di Ruang Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi).

Saat dilakukan pengecekan data Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat data sebagaimana tertulis dalam tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Desa PRIMA menurut Kabupaten Tahun 2008-2018

No	Kabupaten	Jumlah	Lokasi	
			Kecamatan	Desa
1	Bantul	20	1. Banguntapan	1. Banguntapan
				2. Tamanan
			2. Imogiri	1. Sriharjo
				2. Imogiri
				3. Selopamioro
			3. Sanden	4. Wukirsari
				5. Kebonagung
				1. Gadingsari
				4. Jetis
			5. Kasihan	2. Sumberagung
				3. Patalan
6. Sewon	1. Ngestiharjo			
	1. Bangunharjo			
7. Dlingo	2. Timbulharjo			
	1. Dlingo			
8. Pajangan	2. Terong			
	1. Triwidadi			
9. Pundong	1. Seloharjo			
	1. Trimurti			
10. Srandakan	1. Mulyodadi			
	1. Bembanglipuro			
2.	Kulon Progo	17	1. Nanggulan	1. Banyuroto
				2. Panjatan
			3. Lendah	2. Depok
				1. Ngentakrejo
				2. Gulurejo
			4. Kalibawang	3. Bumirejo
				1. Banjarharjo
			5. Samigaluh	1. Sidoharjo
				1. Tuksono
			6. Sentolo	1. Hargorejo
2. Hargomulyo				
7. Kokap	3. Hargotirto			
	1. Gerbosari			
8. Samigaluh	2. Ngargosari			
	1. Banjaroyo			
9. Kalibawang	1. Karang Sari			
	10. Pengasih			

			11. Galur	1. Karangsewu
3.	Gunungkidul	31	1. Purwosari	1. Giripurwo
			2. Ponjong	1. Sumbergiri
				2. Bedoyo
				3. Kenteng
				4. Genjahan
			3. Semanu	1. Dadapayu
				2. Pacarejo
			4. Semin	1. Pundungsari
				2. Bendung
				3. Kemejing
				4. Sambirejo
				5. Semin
			5. Tanjungsari	1. Hargosari
			6. Ngawen	1. Kampung
				2. Sumberrejo
				3. Watusigar
			7. Karangmojo	1. Ngawis
				2. Karangmojo
				3. Bejiharjo
				4. Jatiayu
			8. Nglipar	1. Katongan
			9. Tanjungsari	1. Kemadang
			10. Semanu	1. Pacarrejo
			11. Wonosari	1. Karangrejek
			12. Gedangsari	1. Mertelu
				2. Ngalang
			13. Saptosari	1. Krambilsawit
				2. Jetis
			14. Patuk	1. Nglegi
			15. Playen	1. Banyusoca
				2. Bleberan
4.	Sleman	15	1. Pakem	1. Purwobinangun
			2. Seyegan	1. Margomulyo
			3. Minggir	1. Sendangmulyo
			4. Cangkringan	1. Kepuharjo
			5. Ngemplak	1. Bimomartani
				2. Wedomartani
			6. Kalasan	1. Tirtomartani
				2. Selomartani
			7. Moyudan	1. Sumbersari
				2. Sumberayu
			8. Prambanan	1. Bokoharjo
			9. Turi	1. Donokerto
			10. Gamping	2. Banyuraden
			11. Mlati	3. Sumberadi

		12. Tempel	4. Banyurejo
Jumlah		83	

(Sumber:DP3AP2, 2019:121)

Melihat data di atas, terlihat Data Desa Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) masih bersifat umum belum menjadi data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

Persoalan utama kenapa data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) belum disusun sampai saat ini dikarenakan adanya skala prioritas. Pada saat masih tergabung dalam Badan Pemberdayaan perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG saat itu adalah Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan pada Bidang Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan. Personil Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan terdiri kepala sub bidang satu orang dan tiga orang staf. Tugas dan fungsi Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan tidak hanya melaksanakan program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), ada juga ada kegiatan Kaukus Perempuan Politik, Kaukus Perempuan Parlemen, Pembinaan Organisasi Perempuan seperti Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Disamping itu sehari-hari juga disibukkan dengan rutinitas kegiatan administrasi, rapat atau melaksanakan ketugasan pimpinan. Maka, kondisi tersebut mendorong Kepala Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan untuk membuat skala prioritas dengan melaksanakan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan model intervensi 3 tahunan sesuai yang telah disepakati sejak awal. Kegiatan ini

dirasakan sudah cukup maksimal jika melihat tugas dan fungsi dari Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan adalah membina organisasi perempuan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Waktu itu masih Subbid PKOP, dik. Dan tuisi subbidnya khan tidak hanya Desa PRIMA. Ada juga kaukus perempuan politik, kaukus perempuan parlemen, pembinaan organisasi perempuan seperti BKOW dan IWAPI juga. Jadi, dulu ada skala prioritas, ada ukur baju. Melakukan yang bisa dikerjakan saja. Kegiatan Desa PRIMA dengan model intervensi 3 tahunan sudah cukup bagus dan maksimal dilakukan subbid PKOP." (Wawancara 7 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Mengingat perkembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mencapai delapan puluh tiga maka penyusunan data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sesuatu yang penting dan mendesak. Apalagi jika mengingat tahun 2019 ini sudah diterbitkan Buku Pedoman Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada buku pedoman tersebut, sudah mengamanatkan dua hal penting terkait data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, adanya form isian profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) secara rinci dan lengkap yang memuat antara lain (1) profil usaha anggota yang terdiri: nama pemilik, nama usaha, alamat usaha, produk utama, (2) aspek produksi, (3) aspek pemasaran, (4) aspek sumber daya manusia dan (5) aspek keuangan (DP3AP2 DIY, 2019:24-30). Kedua, adanya klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang terbagi menjadi tiga kategori sederhana yaitu (1) Desa

PRIMA Tumbuh, (2) Desa PRIMA Berkembang dan (3) Desa PRIMA Maju. (DP3AP2 DIY, 2019:17).

Berangkat dari klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), jika sudah dilakukan maka data yang diperoleh akan membantu membuka wawasan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang sudah terbentuk. Dampaknya, dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) akan dihasilkan kegiatan-kegiatan yang lebih tepat sasaran. Idealnya, perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dilakukan dengan memperhatikan hasil klasifikasinya dan menyesuaikan kebutuhan dan potensi masing-masing desanya sehingga akan dihasilkan intervensi yang tepat sasaran dan tidak diberikan intervensi yang sama seperti yang dilakukan satu dasawarsa ini. Kondisi ini juga diungkapkan oleh Bapak Arif Kepala Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama Dinas P3AP2 DIY:

"Penggunaan data selama ini hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban administratif misalnya capaian kinerja.. Tapi untuk perencanaan kita ini masih sering lupa untuk membaca data-data tersebut. Untuk Desa PRIMA juga sama, idealnya metode intervensinya mengacu pada data profil desa PRIMA yang berisi potensinya masing-masing desa sehingga akan melahirkan intervensi atau *treatmentnya* yang berbeda-beda pula dalam pengembangannya." (Wawancara, 20 Agustus 2019, Ruang Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama)

Untuk ketersediaan data jika ditarik ke level kabupaten, sebenarnya Kabupaten Sleman selangkah lebih maju dalam membuat profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman tidak saja sudah membuat namun juga sudah menggunakan data tersebut sebagai bahan perencanaan kegiatan pengembangan Desa

Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kabupaten Sleman. Hal ini diungkapkan oleh Hadi Perencana Seksi Kualitas Hidup Perempuan, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman:

"Walaupun masih sederhana kami sudah punya data profil Desa PRIMA se Kabupaten Sleman mas. Karena itu kita pakai untuk memantau Desa PRIMA bentukan Provinsi dan juga kita manfaatkan sebagai bahan perencanaan. Jadi, setiap tahun kita itu bisa mengadakan pelatihan untuk Desa PRIMA ada sekitar 8 angkatan mas. Pelatihannya disesuaikan kebutuhan dan keinginan dari Desa PRIMA. Jadi, ketakutan memberi pelatihan yang tidak tepat sasaran bisa diminimalisir." (Wawancara 5 September 2019, di ruang seksi kualitas hidup perempuan, Dinas P3AP2KB Sleman)

Berikut data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) se Kabupaten Sleman sebagaimana tertulis dalam tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Profil Desa PRIMA Kabupaten Sleman Tahun 2008-2016

No	Nama Kelompok	Alamat	Pembentukan	Jenis Usaha
1.	Karanggeneng	Purwobinangun, Pakem, Sleman	2008	manisan salak, enting- enting, jus jambu dan jus sirsak
2.	Mulya Mandiri	Margomulyo, Seyegan	2009	emping, tahu, bakso, telur asin, kue, keripik, kentang, menjahit, tempe, wajik
3.	Lestari	Sendangmulyo, Minggir	2010	snack, ceriping tales, anyaman bambu, emping garut, rambak, peyek belut
4.	Melati	Bimomartani, Ngemplak, Sleman	2011	aneka keripik, susu kedelai, emping jagung, abon lele, telur asin, jajanan pasar,

				rajutan, menjahit
5.	Melati Dhuri	Tirtomartani, Kalasan, Sleman	2011	abon lele, tempe, sovenir, telur asin, ceriping tela
6.	Merapi Bangkit	Kepuharjo, Cangkringan, Sleman	2011	ceriping, abon lele, kue basah, kue kering dan handycraft
7.	Kartini	Wedomartani, Ngemplak, Sleman	2011	lempeng beras, kripik, kue basah, snack
8.	Rahayu Prima	Moyudan, Sleman	2012	tenun, menjahit, jamur, snack
9.	Melati Sari	Sumbersari, Moyudan, Sleman	2012	telur asin, roti kering, kripik tempe, kripik belut, bakso goring
10.	Ngudi Makmur	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	2013	roti, ceriping sukun, jus buah, lempur, gadung, marning jagung
11.	Donokerto	Donokerto, Turi, Sleman	2013	kecap, kripik, kue basah, handycraft
12.	Kenanga	Banyuraden, Gamping, Sleman	2014	jajanan pasar, emping melinjo, bakso goreng, kacang bawang
13.	Selomartani	Selomartani, Kalasan, Sleman	2014	hiasan dinding, bakpia, empek-empek, jenang alot, jadah
14.	Sumber Sejahtera	Sumberadi, Mlati, Sleman	2015	kripik, telur asin, handycraft

15.	Prima Banyurejo	Banyurejo, Tempel, Sleman	2016	kue basah, catering, aneka keripik
-----	-----------------	---------------------------------	------	--

Sumber: Data Seksi Kualitas Hidup Perempuan, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, 2016.

Upaya yang dilakukan Kabupaten Sleman membuat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan mengacu data terbukti bagus karena mampu menghasilkan kegiatan yang bervariasi setiap tahunnya. Hal inilah yang perlu dicontoh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Di sisi lain, pada akhir tahun 2018 juga telah dilakukan sebuah kajian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kajian Desa Mandiri Budaya di mana pada salah satu subnya ada ulasan mengenai implementasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sub ulasan tersebut terdapat sebuah rekomendasi untuk menyempurnakan klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebagai berikut:

"Klasifikasi Desa PRIMA dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu (1) Desa PRIMA Pemula/Dasar, (2) Desa PRIMA Berkembang dan (3) Desa PRIMA Maju. Instrumentnya terdiri empat hal yaitu (1) modal, (2) jumlah anggota, (3) kepengurusan, dan (4) kelengkapan administrasi. (Dinas Kebudayaan DIY, 2018:62).

Penjelasan secara lebih detail terkait klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada di tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4 Klasifikasi Desa PRIMA Tahun 2018

No	Instrumen/ Indikator	Kategori		
		Desa PRIMA Pemula/Dasar	Desa PRIMA Berkembang	Desa PRIMA Maju
1	Modal	Modal usaha kurang dari Rp	Modal usaha antara dari Rp	Modal usaha lebih dari Rp

		37.000.000 dan berasal dari 1 sumber	37.000.000-45.000.000 dan berasal dari 2 sumber	45.000.000 dan berasal dari 2 sumber
2	Jumlah anggota	Jumlah anggota kurang dari 25 orang	Jumlah anggota kurang dari 25-30 orang	Jumlah anggota lebih dari 30 orang
3	Kepengurusan	Kepengurusan lengkap	a. Kepengurusan lengkap b. Belum seluruh pengurus aktif melakukan tugas sesuai bidangnya	a. Kepengurusan lengkap b. Seluruh pengurus sudah aktif melakukan tugas sesuai bidangnya
4	Kelengkapan administrasi	Buku administrasi belum lengkap dan belum diisi secara teratur	Buku administrasi lengkap dan belum diisi secara teratur	Buku administrasi lengkap dan sudah diisi secara teratur
		Pertemuan rutin dilakukan setiap bulan dengan aktivitas simpan pinjam saja	Pertemuan rutin dilakukan setiap bulan dengan aktivitas simpan pinjam dan arisan	Pertemuan rutin dilakukan setiap bulan dengan aktivitas simpan pinjam, arisan, sharing bisnis antar anggota dan kegiatan peningkatan ketrampilan
		Pemasaran produk sudah sampai wilayah desa	Pemasaran produk sudah sampai wilayah kecamatan	Pemasaran produk sudah sampai wilayah kabupaten
		Keanekaragaman produksi kurang dari 2 macam	Keanekaragaman produksi antara 2-3 macam	Keanekaragaman produksi lebih dari 3 macam
		Kerjasama atau keterlibatan dari lintas sektoral kurang dari 1 kali	Kerjasama atau keterlibatan dari lintas sektoral 1-2 kali	Kerjasama atau keterlibatan dari lintas sektoral lebih dari 3 kali

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, pengecekan dokumen dan observasi, dapat diinterpretasikan bahwa kebutuhan untuk ketersediaan data profil Desa

Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) belum tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebutuhan data profil profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sangat mendesak untuk segera dilakukan. Tersedianya data profil tersebut akan menjadi sebuah kekayaan bagi Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG di Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) juga akan mampu membantu dalam memetakan persoalan yang dihadapi oleh Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sekaligus membantu perbaikan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada tahun-tahun mendatang dengan lebih inovatif dan lebih tepat sasaran sesuai potensi dan kondisi masing-masing desanya.

5.1.1.2 Tujuan Perencanaan

Secara konseptual Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Karena secara kultural perempuan memegang peran yang cukup penting di keluarga dan masyarakat. Jika seorang perempuan memiliki penghasilan maka akan meningkatkan kepercayaan dirinya yang berujung adanya posisi tawar perempuan di keluarga dan masyarakat. Perempuan memiliki penghasilan juga akan membantu meningkatkan pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY:

"Tujuan Pembentukan Desa PRIMA itu memberdayakan perempuan di bidang ekonomi. Diharapkan adanya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi akan berdampak pada *bargaining position* perempuan di keluarganya dan masyarakat, diharapkan nantinya juga berdampak pada peningkatan pendidikan anaknya dan kesehatannya juga meningkat." (Wawancara 1 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Bapak Ari Bidang Kesra, Bappeda DIY yang menyatakan bahwa :

"Model Desa PRIMA merupakan model dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Model intervensi penanggulangan kemiskinan itu ada model *charity* diberi langsung bantuan, ada model bantuan untuk kebutuhan dasar seperti dibuatkan jamban dan ada model pemberdayaan. Desa PRIMA adalah salah satu model pemberdayaan pada bidang perempuan." (Wawancara 26 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesra Bappeda DIY).

Dalam sebuah perencanaan, tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk perencanaan daerah tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam konteks perencanaan pembangunan daerah bisa dilihat pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, program, kegiatan organisasi perangkat daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada rapat paripurna istimewa di DPRD DIY tahun 2017 adalah Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Selanjutnya berangkat dari tema visi tersebut dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022, visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja."

Untuk misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah "Kemuliaan Martabat Manusia Jogja Menyanggah Misi Lima Kemuliaan" atau Panca Mulia, yakni :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Bappeda DIY, 2019).

Tujuan adanya Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk mendukung misi 1 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Tujuan 1 dari misi ini adalah meningkatnya kualitas hidup,

kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta dengan sasaran adalah meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Turunannya yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah terwujudnya masyarakat inklusif gender dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain dengan sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapainya dinas menggunakan strategi membentuk kelompok Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) baru. Uraian di atas secara sistematis dapat dijelaskan secara singkat melalui tabel 5.5 di bawah ini :

Tabel 5.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemulaiaan Martabat Manusia Jogja			
Misi : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. 1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	1. Strategi 2.2 Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan Gender 2. Strategi 5.4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 3. Strategi 6.1 Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1. Arah Kebijakan 3.1 Perencanaan dan penganggaran responsif gender 2. Arah Kebijakan 3.2 Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk 3. Arah Kebijakan 3.3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

			pembangunan 4. Arah Kebijakan 3.5 Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana
Tujuan Dinas P3AP2	Sasaran Dinas P3AP2	Strategi Dinas P3AP2	Arah Kebijakan Dinas P3AP2
Terwujudnya masyarakat inklusif gender dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Membentuk Kelompok Desa PRIMA baru	Pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di fokuskan di daerah tertinggal/miskin.

Sumber: Rencana Strategis Dinas P3AP2 2019, hal: 48.

Dari hasil wawancara dan pengecekan dokumen dapat diinterpretasikan bahwa tujuan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta jika diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah untuk mewujudkan masyarakat inklusif gender dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain. Tujuan ini merupakan turunan dari tujuan utama yaitu tujuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta.

5.1.1.3 Program yang Dikembangkan

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah masih diperbolehkan memiliki visi dan misi sendiri. Dari visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah inilah secara berurutan sebuah program dan kegiatan terlahir. Mengacu pada rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2017, visinya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Mendukung terciptanya Kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak menuju masyarakat yang partisipatif, sejahtera dan berbudaya. Selanjutnya untuk Misi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 terdiri dari :

Misi 1. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui kesetaraan gender.

Misi 2. Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Misi 3. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat

Dari visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 di atas, pada misi 1 yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui kesetaraan gender kemudian dijabarkan menjadi tujuan 1 yaitu meningkatkan partisipasi, kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak. Perumusan tujuan ini juga disesuaikan dengan salah satu tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pengembangan partisipasi dan

potensi perempuan. Dari tujuan ini kemudian dijabarkan lagi menjadi sasaran yang spesifik yaitu meningkatkan partisipasi perempuan. Dari tujuan dan sasaran inilah muncul sebuah strategi untuk mencapainya yang dijabarkan ke dalam sebuah program dan kegiatan yaitu program peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dengan kegiatan pengembangan desa perempuan Indonesia maju mandiri. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Tri Kasubbag Program, Data dan TI BPPM DIY :

"Penentuan sebuah program itu mengacu pada visi dan misi BPPM DIY yang perumusannya mempertimbangkan juga tugas dan fungsi BPPM DIY. Untuk lebih mudah melihat proses lahirnya sebuah program dan kegiatan bisa dilihat dari *cascade* di renstra BPPM, Mas. Ada lampiran *cascade*, *cascade* itu merupakan proses perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran sampai program dan kegiatan beserta indikator-indikatornya." (Wawancara 13 Agustus 2019, di Lobby Dinas P3AP2 DIY)

Kemudian hal ini juga dipertegas oleh Pak Ari dari Bidang Kesra Bappeda DIY :

"Di Pemda DIY ada *cascade* semacam diagram alir dari visi misi Pemda sampai dengan kegiatan di OPD. Visi misi menggambarkan kinerja Gubernur. Tujuan-sasaran Pemda menggambarkan kinerja Sekda. Sasaran OPD menggambarkan kinerja eselon 2 Kepala Dinas/Badan. Program OPD menggambarkan kinerja eselon 3 atau Kepala Bidang/Bagian dan kegiatan menggambarkan kinerja eselon 4 atau kepala Seksi/Kepala Subbidang." (Wawancara 26 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesra Bappeda DIY).

Secara lebih ringkas penjabaran di atas, bisa dilihat pada tabel 5.6 rencana program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 di bawah ini:

Tabel 5.6 Rencana Program Dan Kegiatan BPPM DIY 2012-2017

Visi	:	BPPM mendukung terciptanya Kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak menuju masyarakat yang partisipatif, sejahtera dan berbudaya
Misi I	:	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui kesetaraan gender
Tujuan	:	Meningkatkan partisipasi, kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak
Sasaran	:	Meningkatkan partisipasi perempuan
Program	:	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan

Kegiatan	:	Pengembangan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
----------	---	--

Diolah dari Rencana Strategis BPPM DIY 2012-2017, hal:61.

Untuk saat ini dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017, maka tidak ada lagi visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah. Dalam perencanaan daerah pada level Provinsi untuk saat ini yang ada hanya visi dan misi Gubernur. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selanjutnya membantu mewujudkan visi dan misi Gubernur tersebut. Maka, dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 sudah tidak ada lagi visi dan misi Kepala Dinas. Selanjutnya untuk program dan kegiatan lahir disesuaikan dari alur visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Dari tujuan dan sasaran Gubernur inilah selanjutnya yang diturunkan ke organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi program dan kegiatan masing-masing. Untuk lebih jelasnya seperti tergambar dalam tabel rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 sebagaimana tabel 5.7 di bawah ini :

Tabel 5.7 Rencana Program dan Kegiatan Dinas P3AP2 DIY Tahun 2017-2022

Visi	:	Terwujudnya Peningkatan Kemulaiaan Martabat Manusia Jogja
Misi	:	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
Tujuan 1	:	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Sasaran 1	:	Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat
Tujuan Dinas	:	Terwujudnya masyarakat inklusif gender dan aman bagi

		perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain
Sasaran Dinas	:	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
Program	:	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan 1	:	Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri
Indikator Kinerja	:	Tahun 1 = 15 Desa Tahun 2 = 15 Desa Tahun 3 = 15 Desa Tahun 4 = 15 Desa Tahun 5 = 15 Desa

Sumber : Diolah dari Rencana Strategis Dinas P3AP2 DIY 2019, hal:54.

Dari hasil wawancara dan pengecekan dokumen, dapat diinterpretasikan bahwa program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang ini sedikit berbeda dengan program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dari Program Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan menjadi Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini disebabkan adanya perubahan tugas dan fungsi dari Badan menjadi Dinas, meskipun untuk substansi kegiatannya masih sama yaitu Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

5.1.1.4 Aktor –Aktor yang Terlibat

Sebuah perencanaan baik di lembaga pemerintahan maupun swasta tentu saja dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintah daerah, sebuah perencanaan dilakukan dengan mengacu salah satunya regulasi tentang perencanaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang pada pasal 4 menyatakan :

"Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c.

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional."

Dari Pasal 4 poin b di atas, disebutkan bahwa salah satu prinsip pada sebuah perencanaan perlu disusun berdasarkan prinsip antara pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam konteks perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta dari hasil observasi dan hasil wawancara dapat diidentifikasi bahwa aktor-aktor yang terlibat terdiri dari :

1. Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta :
 - a. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan selaku penanggungjawab Program;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan selaku pelaksana kegiatan;
 - c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan TI selaku penyusun program dan kegiatan Badan;
 - d. Bappeda selaku perumus kebijakan di daerah;
 - e. Kabupaten dalam hal ini Badan yang mengampu urusan Pemberdayaan Perempuan selaku mitra sekaligus tempat berkedudukan desa;
2. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta :
 - a. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan selaku penanggungjawab Program;

- b. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG selaku pelaksana kegiatan;
- c. Kasubbag Program selaku penyusun program dan kegiatan Dinas;
- d. Bappeda selaku perumus kebijakan di daerah;
- e. Kabupaten dalam hal ini Dinas yang mengampu urusan Pemberdayaan Perempuan selaku mitra sekaligus tempat berkedudukan desa;

Dari uraian di atas, perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta baik saat diampu oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun saat ini diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan ada lima aktor yang terlibat yaitu (1) Kepala Bidang, (2) Kepala Seksi/Sub Bidang, (3) Kasubbag Program, (4) Bappeda, (5) Dinas Kabupaten yang mengampu urusan Kabupaten. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Awalnya program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan *pilot project* program dan kegiatan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2008 yang bersifat intervensi. Setahun setelah program dan kegiatan ini selesai, dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini terdiri (1) Badan Perencanaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil evaluasi kemudian disepakati bahwa program ini sangat bagus maka akan terus dilanjutkan dengan dibiayai oleh APBD Provinsi dengan

modifikasi intervensi dari model satu tahun menjadi model tiga tahunan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY :

"Awalnya ini kha *pilot projectnya* Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008, mas. Karena dianggap ada hasilnya maka *eman-eman* kalau tidak dilanjutkan. Terus ditangkap DIY tapi dengan modifikasi DIY. Akhirnya menjadi konsep baku di DIY dilakukan intervensi di setiap desa selama tiga tahun." (Wawancara 1 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Tri Kasubbag Program, Data dan TI BPPM DIY:

"Konsep Desa PRIMA dengan model intervensi 3 tahunan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sebenarnya merupakan hasil diskusi bidang perempuan dengan subbag program dan Bappeda, mas. Model Desa PRIMAnyanya Kementerian kita ubah dari satu tahun menjadi tiga tahun. Alasannya biar logis, mosok awal tahun dibentuk terus akhir tahun sudah bisa diberikan bantuan keuangan. Maka, konsepnya kita sepakati menjadi intervensi selama tiga tahun. Tiga tahun itu terdiri dari tahun pertama pembentukan dan penguatan organisasi, mengajukan proposal permodalan, tahun kedua diberikan pengembangan lanjut dan pemberian modal dan baru tahun ketiga dilakukan monitoring dan evaluasi." (Wawancara 13 Agustus 2019, di Ruang Seksi Keluarga Sejahtera).

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Bapak Ari Bidang Kesra Bappeda DIY ternyata ditemukan jawaban kurang lebih sama :

"Konsep intervensi Desa PRIMA menjadi 3 tahun, karena asumsinya sebuah program dianggap berhasil manakala program itu berkelanjutan bukan *hit and run*. Sekarang dibantu, besok sudah tidak. Itu berlaku juga di beberapa kegiatan lain." (Wawancara 26 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesra Bappeda DIY).

Aktor utama dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada pada Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG. Hal ini dikarenakan merekalah yang membuat konsep kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri

(PRIMA setiap tahunnya mau dikonsep seperti apa. Hal ini diungkap oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY:

"Untuk perencanaan saya memberikan arahan secara garis besar, mas. Misalnya tahun ini saya memberikan arahan kalau anggota Desa PRIMA itu tidak lagi anggotanya perempuan miskin semua. Perlu kita masukkan beberapa perempuan menengah, karena ternyata itu berpengaruh sebagai motivator atau penggerak organisasi. Nah, untuk detailnya penguangannya ke dalam kegiatan saya serahkan kepada kepala seksi." (Wawancara 1 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Pernyataan Ibu Kepala Bidang juga dibenarkan Ibu Mala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY:

" Untuk perencanaan kegiatan pengembangan Desa PRIMA kita mengacu pada kegiatan yang sudah-sudah. Tahun pertama kegiatannya sosialisasi dan pelatihan, tahun kedua pencairan dana hibah dan pelatihan dan tahun ketiga money. Nah, penguangannya ke dalam RKA kita mengacu pada *cascade* dan analisis standar belanja yang berlaku di DIY, dik." (Wawancara 7 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Keterlibatan Subbagian Program dalam pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) untuk saat ini lebih banyak melakukan pekerjaan teknis yaitu mengontrol antara perencanaan yang dibuat Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan alur *cascade* yang ada dalam Rencana Strategi Dinas, pengecekan rincian item dan rupiah Rencana Kerja Anggaran (RKA) disesuaikan dengan 3 Analisa Standar Belanja yaitu Standar Belanja Umum (SBU), Standar Belanja Khusus(SBK) dan Standar Belanja Barang dan Jasa yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Pak Soleh Kasubbag Program Dinas P3AP2 DIY :

"Kalau program perannya dalam perencanaan Desa PRIMA untuk saat ini lebih banyak melakukan pengecekan RKAny. Kita cek apa sudah sesuai

alur *cascadenya*, sudah sesuai dengan SBU SBK dan SHBJ apa belum. Kalau untuk konten intervensi Desa PRIMANYA kami tidak terlalu mencampuri, mas. Itu kan ranahnya bidang perempuan. Paling ya itu tadi mas, karena data Desa PRIMA belum ada sampai sekarang maka saya minta tahun depan mereka membuatnya." (Wawancara 19 Agustus 2019, di Ruang Kasubbag Program)

Keterlibatan Kabupaten dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini hanya sebatas pada penentuan lokasi, untuk substansi perencanaan tidak pernah terlibat. Hal ini disampaikan oleh Pak Karno Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Kulon Progo :

"Kabupaten memandang kegiatan Desa PRIMA selama ini sangat bagus sekali dan sangat membantu Kabupaten Kulon Progo, mas. Jadi, ya kami sangat mengapresiasi kegiatan Desa PRIMA dari Provinsi. Untuk keterlibatan kami dalam perencanaannya biasanya kami dilibatkan dalam penentuan lokasi desa sasaran. Setiap tahun kan ada kegiatan sinkronisasi yang dilakukan Provinsi, nah biasanya di situ kami memberikan masukannya. Kalau untuk konten kegiatannya kami tidak terlibat karena itu ranahnya provinsi." (Wawancara 12 September 2019, di Ruang Lobby Dinas P3AP2 DIY)

Hal ini ketika dikonfirmasi kepada penggagas sekaligus penanggungjawab kegiatan sinkronisasi provinsi dan kabupaten/kota Ibu Tri Kasubbag Program, Data dan TI BPPM DIY pernyataan dari Kabupaten Kulon Progo dibenarkan sebagaimana pernyataan beliau berikut ini :

"Waktu itu tujuan saya menggagas adanya kegiatan sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten karena sering ditemui provinsi dan kabupaten jalan sendiri-sendiri. Nah setelah tahun 2013 dimulai adanya sinkronisasi tersebut, maka program dan kegiatan provinsi dan kabupaten mulai bisa diselaraskan. Termasuk pada momen itu bisa dipakai kabupaten untuk mengajukan usulan lokasi Desa PRIMA." (Wawancara 13 September 2019, di Ruang Seksi Keluarga Sejahtera).

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diinterpretasikan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada lima aktor yaitu (1) Kepala Bidang

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Kepala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG, (3) Kasubbag Program Dinas, (4) Bappeda DIY, dan (5) Dinas Kabupaten yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan. Dari lima aktor tersebut yang merupakan aktor utama dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada pada Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG. Karena mereka berdualah substansi kegiatan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dibuat.

5.1.1.5 Aspek-Aspek Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri

1. Pemasaran

Secara umum pemasaran menjadi salah satu faktor kunci bagi jalannya sebuah usaha. Secara umum anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang merupakan para perempuan pelaku usaha mikro industri rumah tangga sudah memiliki jaringan pemasarannya sendiri. Meskipun tidak dipungkiri pemasarannya masih konvensional dan jangkauannya terbatas seperti (1) dijual dengan cara dititipkan warung-warung terdekat dan (2) dijual di pasar terdekat. Hal ini seperti dijelaskan oleh Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Secara umum sampai saat ini pemasarannya produk-produk ibu-ibu Desa PRIMA masih dititipkan warung terdekat dan dijual di pasar, dik." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Dari sisi perencanaan, untuk pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada aspek pemasaran sampai saat ini telah membuat empat konsep pemasaran yaitu :

a. Konsep Pertama, Pelatihan Jejaring Pemasaran

Pelatihan manajemen pemasaran yang konsepnya diberikan pada tahun kedua pendampingan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan materi pelatihan berupa membangun jejaring kerja lintas sektoral. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY berikut ini :

"Tahun pertama sudah diberikan penguatan organisasi. Nah, di tahun kedua ada pelatihan pemasaran yaitu membangun jejaring lintas sektoral. Ya, meskipun masih bersifat teori sih, namun ibu-ibu perlu diberikan wawasan itu." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Sampai saat ini konsep ini masih dipertahankan dan dijalankan dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) setiap tahunnya.

b. Konsep kedua, Pameran Karya Perempuan

Pada tahun 2013 dengan mulai berkembangnya Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka digagas adanya pameran untuk memperkenalkan produk-produk desa Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dan sekaligus untuk memperluas jejaring pemasarannya. Hal ini diungkap oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY :

"Pernah ada pameran tahun 2013 dan 2014 di Wanitatama dan JEC. Waktu itu usulan dan konsepnya bukan dari kita tapi dari program. Tujuan pameran untuk memperkenalkan produk-produk Desa PRIMAnya sekaligus membuka jejaring pemasaran"(Wawancara 2 Agustus 2019, di Ruang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Ketika dikonfirmasi kepada Ibu Tri Kasubbag Program, Data dan TI BPPM DIY informasi yang kurang lebih sama disampaikan :

"Ketika saya ikutan melakukan monev maupun hadir pada pelatihan-pelatihan Desa PRIMA, saya menangkap keluhan-keluhan dari anggota Desa PRIMA secara umum adalah soal pemasaran. Maka, mulai tahun 2013 saya usulkan ke Subbidang PKOP agar ada even pameran." (Wawancara 14 Agustus 2019, di Ruang Seksi Keluarga Sejahtera).

Pameran tersebut akhirnya direalisasikan setahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2014 dan 2015 yang dikemas menjadi kegiatan Pameran Karya Perempuan. Kenapa menjadi kegiatan Pameran Karya Perempuan karena salah satu tugas dan fungsi dari Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan adalah melakukan fasilitasi pengembangan Organisasi Perempuan. Jadi, Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan selain mengampu Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), juga membina organisasi-organisasi perempuan seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dijelaskan Ibu Yayuk Perencana Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan BPPM DIY :

"Pameran tidak semata-mata produk Desa PRIMA saja, dik. Karena Subbidang PKOP tidak hanya membina Desa PRIMA namun juga ada BKOW dan IWAPI. Karena ada slot sekitar 100 stand maka juga ditambah beberapa peserta dari binaan organisasi mitra kita." (Wawancara 14 Agustus 2019, di Lobby Dinas P3AP2 DIY)

Gambaran kegiatan pameran Karya Perempuan dijelaskan melalui tabel 5.8 dan gambar 5.1 dan 5.2 berikut ini:

Tabel 5.8 Pelaksanaan Pameran Karya Perempuan 2014 dan 2015

No	Tahun	Tempat Pelaksanaan	Peserta
1	2014	Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Jalan Laksda. Adi Sucipto	100 Peserta dengan rincian : 1. 30 Desa PRIMA

		Yogyakarta	2. 70 terdiri dari UPPKS, UP2K, P2WKSS, IWAPI, Perwakilan Organisasi Perempuan
2	2015	Jogja Expo Center (JEC) Jalan Janti Yogyakarta	120 Peserta dengan rincian : 1. 40 Desa PRIMA 2. 80 terdiri dari UPPKS, UP2K, P2WKSS, IWAPI, Perwakilan Organisasi Perempuan, Kelompok binaan Ormas Agama, Buruh Tani Perempuan dan Pelaku usaha mandiri.

Sumber: diolah dari Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG.



Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG.

Gambar 5.1 Stand peserta pada Pameran Karya Perempuan Tahun 2014 di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta.



Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG

Gambar 5.2 Kepala BPPM DIY membuka Pameran Karya Perempuan Tahun 2015 di Jogja Expo Center Yogyakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi pameran ini dinilai tidak cukup efektif maka kegiatan pameran ini hanya dilaksanakan selama dua tahun yaitu tahun 2014 dan 2015 saja.

c. Konsep Ketiga, Pameran Insidentil

Selepas tidak adanya kegiatan Pameran Karya Perempuan, maka mulai tahun 2019 ini Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mencoba membuat konsep pameran-pameran baru meskipun masih bersifat insidentil atau waktu-waktu tertentu saja. Hal ini dilakukan mengingat dua hal yaitu Pertama, awal tahun 2019 ini ada tawaran dari Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta yang setiap tahun memiliki agenda mengikuti pameran produk-produk ekonomi kreatif. Disitulah ada peluang produk-produk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), bisa diikuti dalam pameran tersebut. Kedua, karena

Yogyakarta dikenal sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dan setiap tahun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kegiatan di Yogyakarta. Adanya kegiatan tersebut memberikan peluang untuk mengadakan pameran produk-produk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di hotel-hotel tempat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan kegiatan di Yogyakarta. Hal ini diungkapkan Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY :

"Tahun ini kita ditawari ikut pameran oleh Kaperda Jakarta mas. Infonya akhir Oktober nanti ada pameran ekonomi kreatif yang bisa diikuti oleh Desa PRIMA. Kedua, karena Jogja itu sering dipakai acara oleh Kementerian maka ada peluang untuk dilakukan pameran produk Desa PRIMA. Maka Juni kemarin saya minta ke panitia pusat untuk minta dikasih tempat untuk memamerkan produk-produk Desa PRIMA di acara tersebut." (Wawancara 2 Agustus 2019, di Ruang Bidang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Pernyataan Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ini juga dikuatkan oleh pernyataan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Betul sekali dik, tahun ini ada acara pameran dadakan untuk desa PRIMA. Yang pertama tawaran dari Kaperda Jakarta. Kedua, pameran disela-sela acara Rakor PUG se Indonesia yang diadakan tanggal 26-29 Juni lalu di EastParc Hotel. Ya, walaupun stand pamerannya sederhana dan diikuti empat Desa PRIMA namun terbukti sukses. Produk mereka banyak yang beli bahkan Desa PRIMA Panjatan Kulon Progo bisa dapat orderan dari Maluku dan NTT." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)



Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG

Gambar 5.3 Pameran produk Desa PRIMAdi Indocraft tanggal 30 Oktober sampai 3 November 2019 bertempat di JCC Jakarta dan Pameran produk Desa PRIMA tanggal 26-29 Juni 2019 bertempat di EastParc Hotel Yogyakarta

d. Konsep Keempat, Publikasi Desa PRIMA melalui media cetak dan televisi

Tahun 2018 mulai digagas untuk melakukan publikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), dengan memanfaatkan media yaitu media cetak dan media televisi. Hal ini dilakukan dengan dua tujuan yaitu pertama, untuk mensosialisasikan program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) secara umum dan mempromosikan beberapa produk-produk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Kedua, untuk menumbuhkan semangat kelompok Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) serta apresiasi terhadap kegiatan mereka selama sepuluh tahun ini. Hal ini disampaikan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY:

"Tahun ini ada publikasi di media cetak dan televisi sebanyak 15 slot dik. Tujuannya untuk sosialisasi program dan kegiatan Desa PRIMA ke masyarakat secara umum termasuk memperkenalkan beberapa produk-produk Desa PRIMA. Selanjutnya dengan adanya publikasi akan menumbuhkan semangat anggota Desa PRIMA mereka sekaligus mengapresiasi kegiatan mereka. Untuk yang televisi dikemas dalam bentuk

talk show." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan tahun anggaran 2019 untuk liputan di media cetak dan televisi masing-masing mendapatkan 15 slot dengan total anggaran Rp 195.000.000,00 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 Publikasi Desa PRIMA di Media Cetak dan Televisi Tahun 2019

No	Kategori	Anggaran	Nama Media	Materi	Jadwal Tayang
1.	Cetak	45 Juta	Harian Jogja	Liputan Kegiatan	Maret-April-Mei
			Radar Jogja	Liputan Kegiatan	Maret-April-Mei
2.	Televisi	150 Juta	Jogja TV	Talk Show	Maret-April-Mei
			Adi TV	Talk Show	Maret-April-Mei

Sumber: Data Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG

Untuk kegiatan liputan media cetak dilakukan dengan meliput pelaksanaan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) selama tahun anggaran 2019. Kegiatan *talk show* di televisi lokal dilakukan dengan mengundang narasumber dari Dinas P3AP2 DIY, Dinas Perempuan Kabupaten dan Perwakilan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Berikut contoh publikasi kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).





Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG

Gambar 5.4 Publikasi kegiatan Desa PRIMA di Harian Jogja dan Jogja TV

2. Teknologi dan inovasi

Aspek pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada aspek teknologi dan inovasi belum terlalu banyak disentuh. Untuk teknologi penggunaan teknologi tepat guna bahkan belum disentuh. Untuk aspek inovasi konsepnya diberikan tiga macam pelatihan yaitu:

a. Kemasan

Konsep inovasi pertama yang diberikan kepada Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) berupa pelatihan pengemasan produk-produk. Inovasi dalam kemasan perlu diberikan dengan dua tujuan yaitu pertama untuk memberikan pengetahuan baru dalam mengemas sebuah produk yang lebih layak dan memenuhi standar yang ditetapkan pasar. Kedua, agar memberikan bekal atau inspirasi bagi anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) jika kelak ingin mencoba usaha yang baru. Pernyataan seperti diungkapkan oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY:

"Untuk inovasi paling cuma inovasi dalam kemasan mas. Pada tahun kedua pendampingan pasti ada pelatihan kemasan." (Wawancara 2 Agustus 2019, di Ruang Bidang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Informasi yang sama juga didapatkan dari Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Pemanfaatan teknologi tepat guna belum kami sentuh. Pelatihan terkait inovasi yang kami lakukan adalah memberikan pelatihan kemasan. Pelatihan kemasan tidak membatasi hanya usaha makanan. Apapun produknya kami minta dibawa ke pelatihan agar nanti para pelatih bisa memberikan masukan kalo produk batik sebaiknya kemasannya seperti apa, produk kerajinan kemasannya seperti apa. Harapan lainnya pelatihan kemasan juga bisa menjadi modal mereka jika kelak akan mencoba usaha baru." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Realisasi kegiatan pelatihan kemasan ini diberikan pada tahun kedua pendampingan.



Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG, 2019

Gambar 5.5 Pelatihan kemasan bertempat di Desa PRIMA Sabdodadi Bantul

b. Higienies dan PIRT

Konsep inovasi kedua yang diberikan kepada Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) berupa satu paket pelatihan tentang higienis dan tata cara pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Paket pelatihan ini perlu diberikan alasannya anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruhnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Mereka menjalankan dua perannya sebagai ibu yang bertugas menyajikan makanan di keluarganya sekaligus sebagai perempuan pelaku usaha yang dituntut menjaga keamanan pangan hasil olahannya. Tujuan pelatihan higienis untuk memberikan bekal bagi seluruh anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di dalam memastikan keamanan pengolahan makanannya sesuai standar yang diberikan Dinas Kesehatan. Pelatihan tata cara pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) tujuan jangka panjangnya untuk memperluas pemasaran produk-produk anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Hal ini sebagaimana diungkapkan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Higienis perlu diberikan dengan tujuan untuk keamanan pangan. Anggota Desa PRIMA adalah ibu rumah tangga yang bertugas menyajikan makanan untuk keluarganya. Kedua, mereka memiliki usaha di bidang makanan maka mereka juga harus melakukan prosedur memasak untuk menunjang kesehatan dan keamanan pengolahan makanan produk mereka." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Ibu Mala melanjutkan informasi terkait pelatihan PIRT sebagai berikut:

"PIRT diberikan sebenarnya untuk memperluas pemasaran. Jika produk sudah ada PIRT biasanya lebih mudah diserap pasar. PIRT itu semacam legalisasi produk, dengan memiliki PIRT produk-produk olahan Desa PRIMA diharapkan akan lebih dipercaya konsumen yang dampaknya pemasaran meningkat." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Realisasinya paket pelatihan tentang higienis dan tata cara pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) diberikan pada tahun pertama pendampingan. Untuk narasumber menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten setempat yang memang salah satu kewenangannya mengeluarkan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Karena merupakan salah satu materi terpenting maka pelatihan ini selalu ada setiap tahunnya.



Sumber:Dokumen Pribadi

Gambar 5.6 Suasana Pelatihan PIRT di Desa PRIMA Caturharjo oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

c. Memasak

Secara umum usaha Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) bergerak di usaha makanan. Maka, konsep inovasi ketiga yang diberikan adalah pelatihan memasak. Tujuan pelatihan memasak ini ada dua hal yaitu pertama, untuk meningkatkan kemampuan memasak sekaligus mengajarkan standar baku

di dalam memasak. Contohnya pengenalan celemek pada saat memasak untuk pelindung tubuh. Kedua, pelatihan ini bertujuan akan memberikan inspirasi bagi anggota lain yang usahanya bukan makanan. Harapannya dengan melihat pelatihan ini kan muncul ide-ide usaha baru. Secara umum usaha Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) bergerak di usaha makanan. Hal ini disampaikan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Pelatihan memasak itu diberikan pada tahun pertama. Karena sebagian besar mereka usahanya di makanan. Pelatihan memasak ini tidak dikhususkan untuk yang punya usaha makanan, yang punya batik, kerajinan semuanya tetap ikut. Tujuannya ya agar memberi inspirasi kalau suatu saat mereka itu mencoba usaha makanan mereka sudah ada bekal." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Realisasi kegiatan memasak ini dilaksanakan pada tahun pertama pendampingan. Narasumber diambilkan dari Sanggar Anak Bumi Tani (SABT). Berikut gambar pelatihan memasak :



Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG, 2019

Gambar 5.7 Pelatihan Memasak di Desa PRIMA Getas, Gunungkidul

3. Permodalan

Salah satu kesulitan bagi usaha mikro apalagi usaha rumah tangga adalah kesulitan mengakses permodalan terutama di perbankan. Umumnya usaha-usaha rumah tangga tersebut sering disebut kurang bisa memenuhi persyaratan dari perbankan. Maka, di desa-desa banyak ibu-ibu yang memiliki usaha sampingan kemudian terjerat pada renternir atau lebih dikenal di desa dengan nama bank harian atau bank *plecit*. Menjadi beban berat terjerat renternir atau bank harian atau bank *plecit* tersebut karena setiap hari ada kewajiban membayar angsurannya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY:

"Usaha-usaha mikro itu terkenal kurang bankable. Maka, konsep dari kita itu kita berikan permodalan di tahun kedua dengan mekanisme hibah. Harapannya dapat mengurangi atau membebaskan perempuan-perempuan itu dari renternir atau kalau di desa mungkin lebih terkenal dengan sebutan bank *plecit* yo mas." (Wawancara 2 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Maka, dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada aspek permodalan ada dua konsep yang ditawarkan dalam mengatasi masalah permodalan ini yaitu :

a. Pertama adalah pemberian modal awal

Secara umum modal awal berorganisasi umumnya dari patungan para anggotanya. Untuk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), sejak dari sosialisasi di tahun pertama sampai pelatihan di tahun kedua, para peserta selalu diberikan honor atau uang saku pelatihan. Disinilah ada peluang untuk menyisihkan sebagian honor atau uang saku tersebut sebagai modal awal. Tentu saja kesepakatan ini dibuat bersama antara Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY dengan seluruh anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mala

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2

DIY:

"Aspek permodalan Desa PRIMA ada dua konsep yang kami laksanakan, dik. Pertama modal awal Desa PRIMA dibentuk. Kami hitung ada 5 kali pelatihan, dan setiap pelatihan ada honoronya. Maka, setiap pelatihan kami membuat kesepakatan dengan peserta honoronya kami potong menjadi dua satu bagian diterimakan peserta dan satu bagian untuk modal awal organisasi. Mungkin karena ada keterbukaan ya dik, sejauh ini tidak pernah ada komplain dari peserta." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Realisasi dari konsep ini pada awal pendirian Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG membuat kesepakatan dengan seluruh anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Kesepakatan itu berisi bahwa setiap pelatihan honor untuk peserta dikenakan pajak terlebih dahulu sebesar 6%. Setelah dipotong pajak, penerimaan honor untuk peserta dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) satu bagian diberikan sebagai honor peserta dan (2) satu bagian lagi dikumpulkan menjadi satu sebagai modal awal. Dalam catatan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG, pada tahun pertama pendampingan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada sekitar 5 kali pelatihan. Maka perhitungan modal awal Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang baru dibentuk, diuraikan seperti dalam tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 Penghitungan Modal Awal Desa PRIMA

No	Uraian	Penghitungan	Jumlah
1	Honor Peserta	1 Hari x Rp 60.000,00	= Rp 60.000,00
2	Potongan Pajak 6%	6% x Rp 60.000,00	= Rp 3.600,00
3	Honor Peserta Bersih	=Honor Peserta-Pajak =Rp 60.000,00-Rp 3.600,00	= Rp 56.400,00
Honor Peserta Bersih dalam 1 kali Pelatihan Rp Rp 56.400,00			
4	Pembagian Honor Peserta	1. Diterimakan Peserta	= Rp 30.000,00
		2. Dijadikan modal awal	= Rp 26.400,00

5	Modal 1 Orang dalam 1 Pelatihan	1 Kali x Rp 26.400,00	= Rp 26.400,00
6	Modal 1 kelompok dalam 1 Pelatihan	25 Orang x 1 kali x Rp 26.400,00	= Rp 660.000,00
7	Modal 1 Kelompok dalam 5 Pelatihan	25 Orang x 5 kali x Rp 26.400,00	= Rp 3.300.000,00
Jadi, Modal Desa PRIMA pada tahun pertama = Rp 3.300.000,00			

Sumber: Wawancara

Peruntukan modal awal ini untuk operasional awal organisasi, pertemuan atau rapat sampai pembuatan proposal pencairan dana hibah.

b. Kedua Adalah Pemberian Dana Hibah

Aspek permodalan kedua adalah pemberian hibah sebesar Rp 37.500.000,00 yang diterimakan kepada setiap Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada tahun kedua pendampingan. Konsepnya seluruh anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) diberikan pegangan modal usaha selama tiga hari. Tujuannya jika pada hari pertama yang bersangkutan belum mampu menjual produknya atau belum mendapatkan keuntungan, maka sekurang-kurangnya yang bersangkutan masih memiliki modal untuk dua hari lagi.

Berangkat dari asumsi satu orang modalnya per hari Rp 500.000,00, maka satu orang selama tiga hari mendapatkan modal sebesar Rp 1.500.000,00. Jumlah anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada dua puluh lima orang maka total bantuan modal yang berikan adalah Rp 1.500.000,00 dikalikan dua puluh lima orang maka totalnya bantuan sebesar Rp 37.500.000,00. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Kedua, kami berikan permodalan sebesar Rp 37.500.000,00 melalui mekanisme hibah yang diterima di tahun kedua. Modal inilah yang kami harapkan akan menjadi modal yang berkembang. Untuk bisa sampai ketemu angka Rp 37.500.000,00 itu coba nanti ditanyakan ke Kasubbag Program BPPM karena itu dulu konsep dari beliau, dik." (Wawancara

Agustus 8 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Ketika hal ini dikonfirmasi pada bu Tri Kasubbag Program, Data dan TI BPPM DIY didapatkan jawaban sebagai berikut :

"Untuk pengembangan Desa PRIMA saya memang banyak memberikan usulan mas. Kaena sejak awal saya turut membidani Desa PRIMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk modal kenapa bisa ketemu angka Rp 37.500.000,00? kenapa bukan angka yang bulat. Itu karena konsepnya Desa PRIMA adalah memberikan modal bagi perempuan untuk membeli bahan baku usaha setidaknya cukup untuk 3 hari. Etungannya satu orang diberikan modal Rp 1.500.000,00 untuk 3 hari. Maka, jika di hari pertama ia belum bisa mengembalikan modal atau mendapatkan untung, setidaknya dia masih memiliki modal berjualan untuk dua hari ke depan. Jadi, 25 orang dikalikan Rp 1.500.000,00 ketemulah Rp 37.500.000,00 itu mas." (Wawancara 14 Agustus 2019, di Ruang Seksi Keluarga Sejahtera). Berikut uraian lebih rinci aspek permodalan Desa Perempuan Indonesia

Maju Mandiri (PRIMA) dalam bentuk tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 Rincian Permodalan Desa PRIMA

No	Uraian	Penghitungan	Jumlah
1	Modal usaha 1 orang anggota Desa PRIMA	1. Modal untuk 1 hari = 1 Hari x Rp 500.000,00	= Rp 500.000,00
		2. Modal untuk 3 hari = 3 Hari x Rp 500.000,00	= Rp 1.500.000,00
3	Modal usaha seluruh anggota Desa PRIMA	25 orang x Rp 1.500.000,00	= Rp 37.500.000,00

Sumber: Wawancara

Untuk realisasi perputaran penggunaan modal dari dana hibah sebesar Rp 37.500.000,00 dikembalikan kepada kebutuhan dan konsep dari masing-masing Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Arahannya yang terpenting untuk jasa tidak boleh ditarik lebih dari 1%. Dan Jasa 1 % itu arahannya juga dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) untuk penambahan modal dan (2) untuk keperluan organisasi misalnya membeli seragam atau mengadakan pelatihan sendiri. Hal ini disampaikan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY:

"Pada prinsipnya mekanisme perputaran uangnya saat ini kami serahkan ke masing-masing Desa PRIMA disesuaikan kebutuhan mereka, dik. Kami mewanti-wanti untuk jasa tidak boleh melebihi 1%. Karena tujuan kita ingin untuk memutus rantai pinjam uang direnternir. Jasa 1% itu juga kami minta dibagi dua bagian. Satu bagian untuk tambah modal dan satu bagian lagi untuk beli seragam atau mengadakan pelatihan sendiri." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Bantuan aspek permodalan kepada seluruh Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) disambut positif. Hal ini karena mampu memberikan solusi permodalan bagi setiap anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) melalui praktek simpan pinjam dan dengan modal tersebut membuat usaha anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) bisa terus berjalan dan modal pun terus berkembang. Dari hasil wawancara, pengecekan dokumen dan observasi di lapangan dapat diinterpretasikan bahwa aspek permodalan ini yang dikonsepsi sangat berdampak positif bagi anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) terutama dalam menghindarkan pinjam uang pada renternir atau bank *plecit*.

4. Manajemen

Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam aspek manajemen diberikan pada tahun pertama. Konsepnya diberikan pelatihan-pelatihan dasar dalam berorganisasi dengan tujuan untuk memperkuat jalannya organisasi. Hal ini disampaikan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Di tahun pertama tepatnya setelah pembentukan Desa PRIMA, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan manajemen organisasi. Tujuannya untuk menguatkan organisasi juga para pengurusnya. Kedua, ada pelatihan manajemen pembukuan. Materinya terkait pembukuan yang perlu dibutuhkan sebagai organisasi. Termasuk disisipkan materi pelatihan penyusunan proposal pengajuan dana hibah." (Wawancara 8 Agustus 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Realisasi kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada aspek manajemen diberikan dua pelatihan yaitu Pertama, pelatihan manajemen berorganisasi. Materi ini berisi bagaimana struktur organisasi dibentuk, pembagian peran sampai tips-tips menjalankan organisasi. Kedua, pelatihan manajemen pembukuan. Materi manajemen pembukuan ini masih bersifat sederhana yang meliputi (1) buku induk / daftar anggota, (2) buku tamu (3) buku notulen rapat, (4) buku agenda surat masuk dan surat keluar, (5) buku daftar hadir dan (6) buku inventaris. Disela-sela pelatihan manajemen tersebut juga diberikan materi pelatihan tentang hibah yang berisi (1) materi pembuatan proposal pengajuan dana hibah ke Gubernur DIY dan (2) materi mekanisme laporan pertanggungjawaban dana hibah. Berikut materi pelatihan manajemen yang diperuntukkan bagi Desa Perempuan Indonesia Maju mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 5.12 Pelatihan Manajemen Desa PRIMA

No	Uraian	Materi	Narsumber
1	Manajemen Organisasi	a. Skema dan alur tugas b. Tugas pokok dan fungsi struktur Desa PRIMA c. Penguatan Organisasi	SMEDC
2	Manajemen Pembukuan	a. Buku Induk / Daftar Anggota b. Buku Tamu c. Buku Notulen Rapat d. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar e. Buku Daftar Hadir f. Buku Inventaris	Dinas P3AP2 DIY
3	Hibah	a. Prosedur Pembuatan Proposal Hibah b. Laporan Penggunaan Dana Hibah	Dinas P3AP2 DIY

Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG



Sumber: Arsip Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG, 2019

Gambar 5.8 Suasana Pelatihan Manajemen Organisasi di Desa PRIMA Hargowilis, Kulon Progo dengan Narasumber dari SMEDC

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta

5.1.2.1 Faktor Pendukung

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dalam perencanaan bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Untuk konteks perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), faktor lingkungan dari luar yaitu adanya kebijakan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2008 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *pilot project* kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya faktor dari dalam adalah kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkomitmen tetap meneruskan kegiatan yang berasal dari

pusat yang dianggap bagus dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nelly Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 DIY :

"Awalnya ini khan *pilot projectnya* Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008, mas. Karena dianggap ada hasilnya maka *eman-eman* kalau tidak dilanjutkan. Terus ditangkap DIY tapi dengan modifikasi DIY. Akhirnya menjadi konsep baku di DIY dilakukan intervensi di setiap desa selama tiga tahun." (Wawancara 1 Agustus 2019, Ruang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Dari hasil wawancara ini dapat diinterpretasikan bahwa faktor lingkungan menjadi faktor pendukung dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Faktor sistem yang digunakan

Sistem perencanaan di sini adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah wilayah tertentu sebagai dasar landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan, hal itu bisa menyangkut masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan dan teknologi. Sistem perencanaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk bagus karena memiliki inovasi *cascade* atau pohon kinerja. *Cascade* merupakan suatu kerangka logis dari proses perencanaan yang di dalamnya memuat visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan dan sasaran sampai program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah termasuk rincian indikator-indikatornya. Selain *Cascade* dalam perencanaan, pada proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta format kegiatannya mengacu pada Standar Belanja Umum (SBU) dan Standar Belanja Khusus

(SBK) yang telah ada. Untuk rincian per item sudah disusun sebuah Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Sistem perencanaan yang digunakan selama ini gak ada hambatan karena dalam perencanaan setiap tahunnya mengacu pada *cascade*. *Cascade* itu memudahkan kita di dalam membuat perencanaan Desa PRIMA setiap tahunnya. Karena kita tinggal menyesuaikan saja dengan target-target yang ada di *cascade*." (Wawancara 24 September 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Pernyataan ini ditambahkan oleh Murti yang menjadi perencana Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG sebagai berikut:

"Perencanaan yang kubuat tahun ini mengikuti *cascade*. Untuk RKAnyanya bentuk kegiatan mengikuti Standar Belanja Umum dan Standar Belanja Khusus. Rincian harga per item ada acuannya yaitu Standar Harga Belanja Daerah. Misal honor peserta Rp 60.000,00 itu berlaku se Pemda DIY". (Wawancara 24 September 2019, Ruang tamu Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Dari hasil wawancara ini dapat diinterpretasikan bahwa faktor sistem yang digunakan menjadi faktor pendukung dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi

Penggunaan ilmu dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah terbukti sangat membantu dalam perencanaan daerah. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah memiliki inovasi dalam perencanaan daerah yang berbasis teknologi atau lebih dikenal dengan *E-Planning* yang dinamakan Jogja Plan. Jogja Plan merupakan aplikasi untuk menyusun perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

yang dapat diakses semua orang. Jogja Plan merupakan komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keterbukaan informasi.

Untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengupload seluruh dokumen Rencana Kerja dan Anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tugas ini biasanya dikerjakan oleh Subbag Program. Subbag Program biasanya mengkompilasi seluruh dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dari seluruh bidang, baru kemudian dilakukan *upload* pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Maka, masing-masing seksi di dalam menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran hanya dalam bentuk *excel*. Kondisi ini membuat pekerjaan para perencana menjadi lebih mudah. Hal ini diungkapkan Pak Soleh Kasubbag Progam Dinas P3AP2 DIY:

"Kalau di DIY untuk aplikasi perencanaan ada Jogja Plan dan untuk penganggaran ada SIPKD, mas. Kalau RKA yang mengupload ke SIPKD biasanya program hasil dari kompilasi RKA dari teman-teman bidang." (Wawancara 24 September 2019, Ruang Subbag Program)

Pernyataan ini ditambahkan oleh Murti yang menjadi perencana Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG :

"Kalau saat ini perencana tugasnya cuma membuat RKA dalam bentuk *excel*. Terus diserahkan ke program dan mereka yang akan mengupload ke SIPKD. Jadi, pekerjaan perencana jadi lebih mudah". (Wawancara 24 September 2019, Ruang tamu Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Dari hasil wawancara ini dapat diinterpretasikan bahwa faktor perkembangan ilmu dan teknologi menjadi faktor pendukung dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Faktor Pendanaan

Faktor pendanaan seringkali menjadi hambatan dalam perencanaan. Untuk konteks perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh ini bukan menjadi masalah. Indikasinya, selama sepuluh tahun kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilaksanakan, TAPD mendukung penuh kegiatan ini. Salah satu wujudnya dalam penganggaran untuk kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta ada kecenderungan selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini diungkapkan. Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Kalau untuk anggaran selama ini TAPD selalu support, dik. Bahkan setiap tahun selalu naik angkanya." (Wawancara 24 September 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Pernyataan ini juga didukung oleh Pak Ari dari Bidang Kesra Bappeda DIY :

"Karena kegiatan Desa PRIMA merupakan kegiatan yang bagus dan bagian wujud komitmen dari Pemda DIY dalam pengurangan kemiskinan maka program ini masih dipertahankan termasuk soal anggarannya." (Wawancara 27 September 2019, Ruang Bidang Kesra Bappeda DIY).

Pernyataan di atas juga terbukti dengan pengecekan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa total anggarannya selalu naik. Pada tahun anggaran 2017 anggarannya sebesar Rp.540.324.000,00. Untuk tahun anggaran 2018 anggarannya sebesar Rp 885.102.000,00 dan untuk tahun anggaran 2019 anggarannya sebesar 1.308.721.000,00.

Dari hasil wawancara ini dapat diinterpretasikan bahwa faktor pendanaan menjadi faktor pendukung dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

1. Faktor Sumber Daya Manusia Perencana

Pada setiap kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh individu maupun organisasi, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai motor penggerak. Dalam kegiatan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), maka yang menjadi motor penggerak adalah staf perencana. Staf perencana inilah yang menerjemahkan arahan kebijakan dari kepala Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan rencana-rencana yang bersifat teknis dari Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat antara lain kode rekening, uraian kegiatan, volume, harga satuan sampai jumlah anggaran atau yang lebih dikenal dengan nama dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Untuk saat ini, perencana pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG menjadi kendala utama, sejak ada perubahan kelembagaan di awal tahun dan mutasi staf-staf serta staf yang memasuki masa pensiun. Praktis, saat ini yang membantu Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG adalah Ibu Murti yang posisi aslinya adalah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG Dinas P3AP2 DIY :

"Kendalanya sekarang ya kekurangan staf dik. Awal tahun ini khan ada perubahan kelembagaan yang diikuti mutasi staf, Pak Santo juga sudah memasuki pensiun. Saat ini ya untungya terus dibantu mbak Murti. Dari membuat perencanaan, ikut melaksanakan kegiatan sampai menyusun SPJ. Kalau gak ada mbak Murti repot dik."(Wawancara 24 September 2019, Ruang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG)

Hal ini ketika dikonfirmasi ke Mbak Murti yang menjadi perencana Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG didapatkan informasi yang kurang lebih sama :

"Statusku khan tetap Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, cuma awal tahun ini diperbantukan di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG. Ya, sebenarnya berat membagi tugas sebagai fungsional, ikut melaksanakan kegiatan, menyusun SPJ dan sekarang dituntut juga menjadi perencana. Makanya, aku sekarang jadi sering pulang malam." (Wawancara 24 September 2019, Ruang tamu Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Dari hasil wawancara ini dapat diinterpretasikan bahwa faktor sumber daya manusia perencana menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju

Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta

5.2.1.1 Sumber Masalah Berbasis Data

Pada tahun 2001 dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, maka sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan itu dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui undang-undang ini daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. (Sjahrizal, 2017:11). Lebih lanjut menurut Sjahrizal (2017:24) perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan.

Sementara menurut Tjokroamidjojo (1995:9) pentingnya sebuah perencanaan karena dalam perencanaan terkandung adanya suatu pengarahannya kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan dalam pemerintahan secara ringkas menurut Syamsi (1986:134) diperlukan untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan tersusun dan dituangkan dalam anggaran. Adapun bahan perencanaan yang baik adalah data dan ramalan. Pendapat Syamsi ini juga selaras dengan pendapat Blakely (1989) yang menyatakan bahwa tahap perencanaan yang pertama adalah melakukan pengumpulan data dan analisa data. (Blakely dalam Kuncoro, 2018:77) Pendapat Syamsi dan Blakely ini juga selaras dengan regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada Pasal 274 telah mengamanatkan bahwa :

"Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah."

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membuat sebuah perencanaan daerah yang baik adalah yang berdasarkan data. Menurut Arikunto (2006:118) pengertian data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.

Hasil penelitiannya telah menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam implementasi penyusunan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, selama ini telah menggunakan basis data kemiskinan baik yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik maupun data kantong kemiskinan versi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sayangnya data yang digunakan baru sebatas data untuk penentuan desa sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dalam aspek-aspek pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) selama ini belum menggunakan basis data. Idealnya data yang digunakan adalah data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sayangnya temuan di lapangan untuk data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta belum tersedia sampai saat ini. Data yang tersedia baru sebatas nama dan alamat Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) saja.

Ketiadaan data tersebut menyebabkan dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu menyentuh persoalan dan kebutuhan utama yang dihadapi oleh anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya pemasaran. Ketiadaan data juga membuat perumusan masalah menjadi disederhanakan semua desa adalah sama. Akibatnya, perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia

Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta konsepnya masih menggunakan pola yang sama yaitu diberikan intervensi yang seragam untuk setiap desa dalam sepuluh tahun ini.

Penggunaan data untuk perumusan masalah bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga dilakukan di Serbia. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zoran Rakicevic, dan Jasmina Omerbegovic Bijelovic, dan Danica Lecic Cvetkovic (2015) yang berjudul "A Model For Effective Planning Of Small and Medium Enterprises Support Services". Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membuat sebuah model perencanaan efektif bagi Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan sebuah survei terlebih dahulu yang dilakukan dengan mengambil sampel sejumlah 336 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Serbia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masalahnya bukan terletak pada jenis dan volume kegiatannya namun yang terpenting adalah dukungan yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu sendiri.

Jika berkaca pada Kabupaten Sleman, hasil penelitian di lapangan telah menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman ternyata selangkah lebih maju dalam membuat profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman saat ini sudah memiliki profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Kabupaten Sleman. Selanjutnya dalam perencanaan mereka menggunakan data tersebut sebagai bahan perencanaan kegiatan pengembangan Desa Perempuan

Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kabupaten Sleman. Dampaknya kegiatan yang disusun menjadi variatif dan kegiatan yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisir.

Apa yang dilakukan Kabupaten Sleman ini selaras dengan pendapat Abe. Abe (2005:52) menyatakan bahwa dalam sebuah perencanaan diperlukan sebuah data yang berisi kondisi obyektif yang biasanya tersaji dalam angka-angka statistik. Data inilah yang akan membantu memahami dengan jernih masalah dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah serta akan sangat menentukan jenis dan bentuk tindakan yang akan dilakukan. Maka, kebutuhan menyusun profil desa Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kebutuhan yang mendesak.

Gambaran profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebenarnya juga sudah ada di dalam Buku Pedoman Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Pada buku pedoman tersebut sebenarnya sudah mengamanatkan dua hal penting terkait data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, adanya form isian profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) secara rinci dan lengkap yang memuat antara lain (1) profil usaha anggota yang terdiri: nama pemilik, nama usaha, alamat usaha, produk utama, (2) aspek produksi, (3) aspek pemasaran, (4) aspek sumber daya manusia dan (5) aspek keuangan. (DP3AP2 DIY, 2019:24-30). Kedua, adanya klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang terbagi menjadi tiga kategori sederhana yaitu (1) Desa

PRIMA Pemula atau Tumbuh, (2) Desa PRIMA Berkembang dan (3) Desa PRIMA Maju. (DP3AP2 DIY, 2019:17).

Profil sekaligus klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta jika sudah berhasil disusun maka akan menjadi sebuah "kekayaan baru" bagi Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan secara khusus dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum. Hal ini merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu bahwa data itu merupakan kekayaan baru sebuah bangsa. Berikut kutipan pidatonya :

"Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan *cyber* termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," (Jamaludin, 2019)

Ketersediaan data profil dan klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menjadi sebuah kekayaan karena setidaknya memiliki dua keuntungan yaitu (1) akan mempermudah di dalam memetakan masalah-masalah yang dihadapi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) secara lebih obyektif dan *update* dan (2) akan mempermudah di dalam membuat *roadmap* pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun-tahun mendatang. Setelah ketersediaan data, maka tindakan selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan *updating* data.

Menurut Tjokroamidjojo (1994) dalam sebuah perencanaan dapat dilakukan perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkiraan mengenai potensi potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang

mungkin dihadapi. Berangkat dari pendapat Tjokroamidjojo maka kebutuhan akan data makin penting dan data juga dituntut untuk disajikan dengan akurat serta *up to date*. Artinya hal ini juga berlaku pada ketersediaan data profil dan klasifikasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya, ke depan perencanaan kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) lebih bervariasi dan bisa disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

5.2.1.2 Tujuan Perencanaan

Menurut Abe (2005:27) perencanaan berasal dari kata "rencana", yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana ini kemudian Abe (2005:27) menyimpulkan bahwa sebuah perencanaan terdiri beberapa komponen penting meliputi: (1) tujuan atau apa yang hendak dicapai, (2) kegiatan atau tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan dan (3) waktu atau kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan. Pendapat Abe ini juga diperkuat oleh pendapat Conyers (1984:4) bahwa terdapat salah satu elemen dasar perencanaan yaitu perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pendapat Abe dan Conyers di atas, juga selaras dengan pendapat Soekartawi yang menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya mengambil suatu kebijaksanaan (*policy*) dengan mempertimbangkan salah satunya perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai. (Soekartawi, 1990:6).

Secara konseptual Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi. Hal ini selaras dengan pendapat Nugroho bahwa di dalam membangun kesetaraan gender tidak bisa dilakukan di daerah miskin, terbelakang dalam pendidikan dan masyarakatnya masih kuat budaya patriarkinya. Maka, untuk membangun kesetaraan gender memerlukan tiga kualitas yang meliputi (1) pendidikan, (2) kesehatan, dan (3) ekonomi. (Nugroho, 2011:XXII).

Tujuan pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi telah terbukti. Hal ini mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Murti Maharini pada tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Dampak Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta" disimpulkan bahwa Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dapat meningkatkan jumlah pendapatan perempuan pelaku usaha, mampu meningkatkan pemenuhan konsumsi rumah tangga dan mampu meningkatkan omzet usaha perempuan pelaku usaha. (Maharini, 2018:61).

Demikian pula tujuan pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di provinsi lain juga tercapai. Hal ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Irwani Jamilah, dan Erlina, dan Rujiman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Serdang Bedagai". Penelitian ini mengkaji pengaruh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) dengan dimensi penguatan

kelembagaan, pemberdayaan sumberdaya perempuan, dan pengembangan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa saat ini tidak ada lagi visi misi organisasi perangkat daerah, yang ada hanyalah visi misi kepala daerah. Demikian pula untuk saat ini perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka, tujuan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian salah satu tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 yaitu terwujudnya masyarakat *inklusif gender* dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain dengan sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Tujuan ini dirumuskan karena menyesuaikan dengan salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengarusutamaan *gender*, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta di atas, merupakan turunan dari tujuan 1 dari misi 1 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Tujuan 1 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta dengan sasaran adalah meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Dan untuk misi 1 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Menurut Kuncoro (2018:73) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang hendak dicapai. Untuk target pada perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini bisa dilihat pada uraian yang ada dalam *cascade* atau pohon kinerja. Dokumen *cascade* atau pohon kinerja bisa ditemukan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Di dalam *cascade* tersebut telah dinyatakan bahwa kegiatan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta target setiap tahunnya adalah membina lima belas desa.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang dengan sasaran yang juga sudah ditetapkan. Adanya tujuan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seperti yang diuraikan di atas, juga menunjukkan telah terpenuhinya salah satu unsur dalam perencanaan yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai. Hal ini artinya telah selaras dengan pendapat Abe (2005:52) yang menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya memiliki makna penting yaitu sebagai sarana mencapai tujuan.

5.2.1.3 Program yang Dikembangkan

Untuk mewujudkan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan *gender*, Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada seluruh aparat pemerintah dari Pusat-Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan *gender* guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif *gender* sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Berangkat dari Instruksi Presiden inilah selanjutnya dikenal strategi pembangunan dengan istilah Pengarusutamaan Gender. Salah satu implementasi Pengarusutamaan *gender* kemudian lahir program-program pemberdayaan perempuan.

Sebuah program menurut Sjafrizal (2017:65) pada dasarnya merupakan upaya dan tindakan konkret dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, termasuk dana dan tenaga, yang

dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Program dapat dirinci dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan yang lebih konkret dan spesifik pada lokasi tertentu atau tersebar pada beberapa lokasi. Sjafrizal (2017:65). Selanjutnya program pemberdayaan perempuan menurut Hubeis (2016:135) merupakan kebijakan pemerintah bertujuan untuk memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduksi mereka.

Implementasi program-program pemberdayaan perempuan di pemerintah daerah secara umum dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan atau dengan nama lain. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengarusutamaan *gender*, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Mulai tahun 2017 dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017, maka tidak ada lagi visi dan misi organisasi perangkat daerah. Pada level provinsi yang ada hanya visi dan misi kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur. Untuk tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selanjutnya hanyalah membantu mewujudkan visi dan misi gubernur. Selanjutnya untuk program dan kegiatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah, muncul

dari hasil penyesuaian dari alur visi dan misi gubernur yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Berangkat dari tujuan dan sasaran gubernur inilah selanjutnya yang diturunkan ke organisasi perangkat daerah menjadi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 sudah tidak ada lagi visi dan misi Kepala Dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2022 bertugas untuk membantu mencapai visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada misi 1 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tujuan 1 yaitu meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Berangkat dari tujuan 1 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini kemudian diturunkan menjadi salah satu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 yaitu terwujudnya masyarakat *inklusif gender* dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain. Dari tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta inilah kemudian diturun lagi menjadi sebuah program yaitu Program Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan dengan Kegiatan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

Program Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tepat. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini selaras dengan pendapat Hubeis (2016:135) sebelumnya yang menyatakan bahwa program pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan pemerintah bertujuan untuk memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduksi mereka. Kesesuaian juga ditemukan dengan merujuk pendapat Nugroho (2011:163-164) bahwa rancangan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan setidaknya bertujuan salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa program yang dirumuskan untuk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sesungguhnya dilakukan untuk mengubah kondisi perempuan melalui pendekatan pemberdayaan perempuan. Hal ini selaras dengan pendapat Abe (2005:54) bahwa kualitas suatu perencanaan tidak dilihat semata-mata dari kualitas rumusannya, namun pada apa yang sebetulnya ingin dilakukan. Apa yang ingin dilakukan akan terlihat pada sebuah program yang dikembangkan. Suatu program bukan saja mengandung unsur-unsur yang sifatnya mengisi melainkan juga tindakan yang bersifat mengubah.

5.2.1.4 Aktor-Aktor yang Terlibat

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:310) koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya menyerasikan dan

menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam proses pembangunan koordinasi sebaiknya sudah diterapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat menjadi sesuatu yang penting agar tercipta perencanaan yang berkualitas. Hal ini juga diungkapkan oleh Bryson (2016:56) bahwa langkah awal yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan strategis adalah menetapkan siapa saja yang menjadi orang-orang penting pembuat keputusan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan kelompok, unit atau organisasi manakah yang harus dilibatkan dalam upaya perencanaan.

Dalam prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa perlunya perencanaan disusun antara pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Pemangku kepentingan atau lebih dikenal dengan *stakeholder* menurut Bryson (2016:60) didefinisikan sebagai orang, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian, sumberdaya atau hasil (*output*) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Perencanaan dengan melibatkan stakeholder ini selanjutnya disebut sebagai perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif menurut Kuncoro (2018:77) adalah sebuah perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholder*) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi aktor-aktor penting dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)

meliputi lima aktor. Lima aktor tersebut aktor yang terlibat dalam koordinasi perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada lima aktor yaitu (1) Kepala Bidang Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Kepala Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG, (3) Kasubbag Program, (4) Bappeda DIY, dan (5) Dinas Kabupaten yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan. Kondisi ini disebabkan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sejak awal sampai saat ini lebih menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik daripada pendekatan perencanaan partisipatif.

Menjadi sebuah pertanyaan kenapa desa-desa lokasi sasaran belum dilibatkan ? Padahal sebagai obyek pembangunan mereka seharusnya dilibatkan sejak perencanaan agar dihasilkan kualitas perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini disebabkan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sejak awal lebih menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik daripada pendekatan perencanaan partisipatif.

Seperti diungkapkan oleh Kuncoro(2018:77) dalam proses perencanaan di Indonesia sejak tahun 2004 dikenal dengan empat pendekatan yaitu (1) proses politik, (2) proses teknokratik, (3) proses partisipatif dan (4) proses *bottom-up* dan *top-down*. Sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) menunjukkan proses teknokratik. Proses teknokratik menurut Kuncoro (2018:77) adalah perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dilaksanakan dengan menggunakan mode dan kerangka ilmiah.

Awalnya program dan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) muncul sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang dikenal dengan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) pada tahun 2004. Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) kemudian melahirkan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan yang dikenal model Desa "Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)". (KemenPPPA, 2012:9). Pada tahun 2008 Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu *pilot projectnya*. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009, model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dianggap sebagai sebuah konsep yang bagus dalam mengurangi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan perempuan. Maka, sampai saat ini kegiatan ini tetap dipertahankan dan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari uraian di atas, maka tidak mengherankan apabila dalam proses perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan menggunakan pendekatan teknokratik. Sebagai pendekatan teknokratik, maka yang berperan dalam koordinasi di dalam perencanaan hanya lima aktor di atas. Dari lima aktor tersebut yang merupakan aktor utama dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ada pada Kepala Bidang Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG. Karena mereka berdualah substansi kegiatan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dibuat.

Secara prosedur pendekatan teknokratik yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada yang salah. Akan tetapi jika dianalisa dari hasil temuan di lapangan, pendekatan inilah yang menjadi salah satu penyebab perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) selama satu dasawarsa di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi rutinitas dan semua desa mendapatkan intervensi yang sama. Realita di lapangan, setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hambatan dalam pengembangan usahanya juga berbeda-beda. Kondisi tersebut akan lebih mudah dipotret secara mendalam jika data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dibuat. Selanjutnya dalam membuat solusi atasi hambatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) tersebut, secara substansi lebih tepat apabila dalam perencanaannya menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). (Abe, 2005:88). Tujuan perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang konsisten dan berdasarkan sistem prioritas yang tajam. Namun demikian, berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Tidak saja dari pengambil kebijaksanaan tertinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional namun juga diperlukan partisipasi dari masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. (Tjokroamidjojo, 1995:206).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menurut Conyers (1991:154-155) ada tiga alasan utama yakni :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Kepercayaan ini menjadi penting khususnya bila tujuannya agar dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu dengan keterlibatan masyarakat, membuat mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan kegiatannya serta akan muncul rasa memiliki terhadap program dan kegiatan tersebut;
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Dari uraian-uraian tentang perencanaan partisipatif, maka dapat diidentifikasi bahwa aktor yang belum dilibatkan dalam perencanaan pengembangan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam perspektif perencanaan partisipatif adalah masyarakat dalam hal ini anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) itu sendiri. Sebenarnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lebih mudah untuk ditingkatkan. Hal ini merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Utama Sudarsana (2015) yang berjudul "Perencanaan Partisipatif Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan". Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perencanaan Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down dan

teknokratis. Pendekatan partisipatif belum sepenuhnya diadopsi mengingat masyarakat miskin sebagai sasaran program belum dilibatkan dalam penyusunan rencana. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk Daerah Istimewa Yogyakarta partisipasi masyarakat lebih mudah direalisasikan karena adanya faktor pendukung partisipasi masyarakat yaitu adanya sistem sosial di dalam masyarakat seperti kebiasaan bergotong-royong, *sambatan* (saling menolong disaat ada anggota masyarakat yang membutuhkan), budaya *ewuh-pakewuh* (tidak enak hati) jika tidak ikut suatu kegiatan serta hubungan kekerabatan yang masih sangat erat.

Mengacu pada pendapat Abe (2005:55) yang menyatakan bahwa dalam sebuah perencanaan perlu melibatkan aktor-aktor penting yang akan menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan sebuah perencanaan. Maka, berdasarkan hasil penelitian perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan pendekatan perencanaan teknokratik telah terbukti melibatkan aktor-aktor penting sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing. Namun jika menggunakan perspektif perencanaan partisipatif, maka perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) belum melibatkan aktor-aktor penting. Hal ini dikarenakan dalam proses perencanaannya belum melibatkan salah satu aktor kunci yaitu masyarakat yang dalam hal ini adalah anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) itu sendiri.

5.2.1.5 Aspek Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri

1. Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen.(Shinta, 2011:1). Lebih lanjut Shinta menjelaskan bahwa peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. (Shinta, 2011:1).

Sementara menurut Drucker tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri. (Drucker dalam Firmansyah, 2019:4). Idealnya, pemasaran harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Ketika Sony merancang game Play Station 3, ketika Toyota memperkenalkan mobil hibrida, perusahaan-perusahaan tersebut dibanjiri pesanan karena mereka telah merancang produk yang tepat sebagai hasil pemasaran yang cermat. (Firmansyah, 2019:4)

Pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia sampai saat ini merupakan salah satu permasalahan yang menghambat perkembangan mereka. Umumnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unit usaha keluarga. Keterbatasan model usaha seperti ini adalah jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. (Suyatna dalam Budiarto, dkk, 2015:28). Lebih lanjut Suyatna menjelaskan dua kelemahan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemasaran yaitu (1) kurang memiliki informasi yang lengkap dan rinci, terkait pasar mana saja yang bisa ditembus oleh produk yang mereka hasilkan dan (2) keterbatasan *budget* pemasaran yang dimiliki dalam mengembangkan pangsa pasar yang lebih luas. (Suyatna dalam Budiarto, dkk, 2015:29).

Berdasarkan hasil penelitian, kesulitan pemasaran juga dialami oleh Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di dalam menjual produk-produknya. Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sendiri merupakan wadah bagi perempuan pelaku usaha yang umumnya adalah ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini tidak mengherankan apabila produk-produk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) kendala utamanya pada aspek pemasaran. Hal ini tidak dipungkiri karena pemasaran produk-produknya masih konvensional dan jangkauannya terbatas seperti (1) dijual dengan cara dititipkan warung-warung terdekat dan (2) dijual di pasar desa terdekat.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengembangan pada aspek pemasaran sejauh ini ditempuh melalui tiga kegiatan yaitu (1) pelatihan jejaring pemasaran, (2) pameran, dan (3) publikasi media cetak dan televisi. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya belum maksimal karena tiga kegiatan tersebut baru menyentuh pemasaran pada peningkatan informasi pasar. Hal ini mengacu pada pendapat Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo (2015:100) bahwa upaya penguatan dan pengembangan pada aspek pemasaran sebaiknya diprioritaskan untuk

menembus pasar yang ada dengan empat cara sebagai berikut: (1) peningkatan akses informasi pasar, (2) pemenuhan standar kualitas pasar, (3) peluncuran produk inovatif sesuai selera pasar, dan (4) pengembangan atau perluasan konsumen sasaran. Maka, yang masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengerjakan tiga aspek pengembangan pemasaran lainnya.

Pengembangan pada aspek pemasaran perlu terus dilakukan hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ammad Khan, Nazish Kanwal, Peer Ghulam Nabi, Ashfaq Ahmad Shah (2016:) tentang Sarhad Rural Support Program (SRSP) yaitu suatu program dalam memberdayakan pengusaha perempuan pedesaan melalui kredit mikro di Pakistan :

"Market creation for rural women entrepreneurs is very important and should be carried out by microcredit institutions beyond just providing credit services to the clients. This will not only facilitate the existing women entrepreneurs in strengthening their business but also motivate other rural women to create better decisions on business establishment and taking credit from the institutions."(Khan, dan Nazish, dan Nabi, dan Ashfaq (2016:161).

"Penciptaan pasar bagi pengusaha perempuan pedesaan sangat penting dan harus dilakukan oleh lembaga kredit mikro selain memberikan layanan kredit kepada pengusaha perempuan pedesaan. Ini tidak hanya akan memfasilitasi pengusaha perempuan di dalam memperkuat bisnis mereka tetapi juga akan memotivasi perempuan pedesaan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam mendirikan usaha dan mengambil kredit dari lembaga-lembaga tersebut." (Khan, dan Nazish, dan Nabi, dan Ashfaq (2016:161).

Mengacu pada penelitian di atas, menunjukkan bahwa untuk mengembangkan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) tidak sekedar diberikan bantuan modal juga dibantu dalam pemasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tiga aspek penguatan dan pengembangan pemasaran, yang perlu dicoba dilakukan pada aspek keempat yaitu pengembangan atau perluasan konsumen sasaran. Konsep pengembangan atau perluasan konsumen sasaran perlu dicoba oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemasaran online. Hal ini merujuk pada hasil penelitian Dadan Sutrisno, dan Agus Suryono, dan Abdullah Said (2016) yang berjudul "Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)" yang menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan pemasaran usaha mikro adalah dengan memfasilitasi pembangunan jaringan pemasaran online terpadu berbasis komunitas." (Sutrisno, dan Suryono, dan Said, 2016:111).

Pemasaran online adalah pemasaran dengan menggunakan media internet sebagai media pemasaran suatu produk atau jasa. (Timothy, 2010:2). Keuntungan melakukan pemasaran online menurut Timothy setidaknya ada lima hal yaitu (1) membuat informasi menjadi lebih mudah bagi pelanggan, (2) memotong biaya operasional secara signifikan, (3) meningkatkan citra sebuah produk, karena saat ini seringkali sebuah produk dinilai bagus dan serius jika mudah diakses lewat internet, (4) produknya lebih mudah diakses di setiap belahan dunia tanpa memperdulikan lokasi fisiknya dan (5) kemampuan untuk menjual produk selama dua puluh empat jam bahkan saat ditinggal tidur sekalipun. (Timothy, 2010:5).

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran internet telah mampu menciptakan suatu ekonomi baru, juga mengubah persepsi kita di dalam segala aspek sektor

kehidupan salah satunya dalam melakukan pemasaran sebuah produk. Mengutip dari laporan *We Are Social* diungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni sebesar 132,7 juta. Bila dilihat dari jumlah pengguna internetnya, maka bisa dibayangkan seluruh pengguna internet di Indonesia sudah mengakses media sosial. *We Are Social* mengatakan 132,7 juta pengguna internet, 130 juta diantaranya pengguna aktif di media sosial dengan penetrasi 49%. Kemudian *platform* media sosial yang paling digandrungi oleh orang Indonesia yaitu (1) YouTube 43%, (2) Facebook 41%, (3) WhatsApp 40%, (4) Instagram 38%, (5) Twitter 27%, (6) Google+ 25%. (Haryanto, 2018).

Dari data-data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang pemasaran online di Indonesia sangat besar. Maka, ke depan untuk produk-produk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) perlu mencoba untuk masuk ke wilayah pemasaran melalui media sosial yaitu facebook dan instagram. Karena keduanya terbukti sebagai media sosial yang digandrungi dan biaya pembuatannya juga murah dan mudah diakses. Hal ini juga selaras dengan pendapat Putero dalam Budiarto, dkk (2015:57) bahwa di era teknologi seperti saat ini dikenal istilah *technopreneurship* yaitu wirausaha berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Putero menjelaskan bentuk *technopreneurship* meliputi (1) pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam proses desain produk, (2) pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam proses produksi, (3) pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam proses pemasaran produk, dan (4) usaha produk yang padat teknologi untuk segmen pasar yang baru.(Putero dalam Budiarto, dkk, 2015:57).

2. Teknologi dan Inovasi

Teknologi dapat diartikan sebagai barang, alat, proses, metode atau prosedur yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. (Putero dalam Budiarto, dkk, 2015:54). Bagi suatu negara teknologi mempunyai posisi sentral dalam usahanya meraih berbagai target. Keunggulan teknologi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, produktivitas industri serta perdagangan dan daya saing internasional. (Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo, 2015:104).

Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pengembangan teknologi juga memainkan peranan penting. Karena menurut Putero (2015) setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya yaitu (1) teknologi dapat memunculkan produk baru, (2) teknologi dapat memberikan cara atau proses baru dan (3) teknologi dapat membantu mengubah cara berkomunikasi dan berkoordinasi baik *internal* maupun *eksternal* kepada pelanggan. (Putero dalam Budiarto, dkk, 2015:72). Kemajuan teknologi yang dikombinasikan dengan inovasi menjadi salah satu kata kunci keunggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Membuat produk baru merupakan inovasi yang paling umum. Pembuatan produk baru ini bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada atau teknologi yang baru sama sekali. (Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo, 2015:108).

Pemanfaatan teknologi idealnya mampu meningkatkan nilai tambah berbagai produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sayangnya kelemahan sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia salah satunya pada aspek teknologi. Kelemahan pada aspek tersebut secara umum ada tiga hal yaitu (1) ketidakmampuan mempertahankan kualitas produk, (3) kurangnya

inovasi produk dan (3) peralatan dan teknologi produksi yang digunakan masih sederhana. (Putero dalam Budiarto, dkk, 2015:53).

Berdasarkan hasil penelitian, selama ini Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) juga mengalami kendala di dalam aspek teknologi dan inovasi. Konsep pengembangan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada aspek teknologi belum ada. Namun untuk konsep pengembangan inovasi sudah diberikan berupa pelatihan kemasan dan pelatihan higienis. Harapannya pelatihan ini akan membantu memperkuat kualitas produk-produk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) terutama dalam hal keamanan pangan.

Patut disayangkan selama ini Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) belum diperkenalkan dengan aspek teknologi. Padahal dengan mayoritas merupakan industri rumah tangga, akan sangat tepat jika mereka diperkenalkan dengan teknologi tepat guna. Definisi Teknologi Tepat Guna menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 adalah :

"Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan."

Pemanfaatan teknologi tepat guna terbukti membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan Mardiana Andarwati, Edi Subiyantoro, Tutut Subadyo (2018) yang berjudul "Pengaruh Pelatihan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Terhadap Keberdayaan Pengrajin Batik Tulis Ramah Lingkungan" menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah batik tulis di Trenggalek dalam proses produksi menggunakan

teknologi tepat guna berupa pewarna alami dan penggunaan meja gambar batik terbukti mempermudah kegiatan produksi lebih cepat dan lebih berkualitas.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola teknologi tepat guna adalah Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi pembina teknis di bidang teknologi rekayasa yang bernaung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka, ke depan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menggandeng Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mengembangkan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) khususnya pada aspek teknologi.

Untuk aspek inovasi idealnya akan mendorong produktivitas dan daya kompetisi. Menurut Bakhshi (2011) inovasi didefinisikan meliputi tiga hal yaitu (1) sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan dengan cara baru guna menarik seseorang, (2) proses menemukan solusi terhadap suatu tantangan dan (3) produk yang betul-betul baru atau produk lama yang diubah sehingga berfungsi lebih baik. (Bakhshi dalam Budiarto, dkk, 2015:108). Salah satu inovasi yang sering dilakukan dalam dunia usaha adalah dengan membuat produk baru.

Untuk aspek inovasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) konsepnya diberikan pelatihan inovasi produk berupa pelatihan kemasan (*packaging*) dan pelatihan higienies. Harapannya pelatihan ini akan membantu memperkuat kualitas produk-produk Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) agar lebih mudah diterima konsumen serta terjaganya produk-produk makanan dalam hal keamanannya. Harus diakui sebagian besar produk-produk

Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) kemasannya masih sederhana dan konvensional. Maka, inovasi dalam bentuk pelatihan kemasan menjadi sebuah terobosan penting di dalam mengembangkan usaha Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengubah kemasan produk lama menjadi kemasan yang baru sesuai tuntutan pasar.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut juga selaras dengan pendapat Budiarto, Sptoadi, Ridwan dan Susilo (2015:103) bahwa pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diperkenalkan pada aspek teknologi dan inovasi terkait dalam pengemasan (*packaging*). Hal ini agar produknya tetap baik, tahan lama dan menarik bagi konsumen. Pendapat ini juga dikuatkan hasil penelitian Alves (2015) yang menunjukkan bahwa dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Distrik Ermera, Timur Leste yang perlu dikembangkan adalah inovasi produk.

Dari uraian di atas, terlihat kelemahan dalam pengembangan Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam aspek teknologi dan inovasi. Maka, di tahun mendatang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membuat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) pada aspek teknologi dengan memperkenalkan teknologi tepat guna. Untuk aspek inovasi perlu ditambahkan kegiatan atau pelatihan untuk peningkatan kualitas produk.

3. Permodalan

3.1 Permodalan bersumber dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta

Permodalan pada dasarnya merupakan salah satu aspek penting dalam rangkaian pengelolaan dan pengembangan roda bisnis karena semua kegiatan dalam dunia usaha pada akhirnya akan ditentukan oleh keuangan yang ada. (Rusland dan Aziz, 2009: 20). Secara umum sumber permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat di bagi menjadi dua yaitu (1) modal sendiri, dan (2) modal dari luar. (Rusland dan Aziz, 2009: 21).

Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengalaman selama ini menunjukkan sumber pembiayaan lebih disandarkan pada kredit bank. Kredit idealnya menjadikan rangsangan dan suntikan modal yang bersifat sementara. Pemberian kredit harus mampu mendorong produksi yang akhirnya meningkatkan tabungan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi inilah yang disebut sebagai kapitalisasi permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo (2015:111)

Sayangnya selama ini yang terdengar adalah keluhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kesulitan mendapat kredit dari bank. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya persyaratan yang diminta dengan prosedur yang panjang yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Kondisi ini dapat dipahami, karena pada umumnya di negara-negara berkembang pasar modal dan lembaga-lembaga keuangan nonbank belum berkembang baik, maka permodalan dunia usaha banyak bergantung dari perbankan. (Rusland dan Aziz, 2009: 21).

Kesulitan permodalan dari internal dan kesulitan mengakses perbankan menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Hal ini juga dikuatkan oleh Juvenal Alves (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya penguatan modal usaha". Hasil penelitian Alves (2015) menunjukkan bahwa dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Distrik Ermera, Timor Leste salah satu kelemahannya adalah modal usaha. Pada usaha mikro terutama yang berbasis pedesaan yang umumnya merupakan industri rumah tangga, kondisi ini membuat mereka mudah terjatuh pada renternir atau lebih dikenal dengan nama bank harian atau bank *plecit*. Menjadi beban berat terjatuh renternir atau bank harian atau bank *plecit* tersebut karena setiap hari ada kewajiban membayar angsurannya.

Kondisi serupa juga dialami oleh para perempuan pelaku usaha sebelum bergabung dalam Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Para perempuan pelaku usaha umumnya mendapatkan modal dari kantong pribadi dan beberapa berhutang pada bank harian. Sebagai kegiatan dengan tujuan pemberdayaan perempuan pada penguatan aspek ekonomi maka sejak awal kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) diberikan bantuan permodalan. Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek permodalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan permodalan melalui skema hibah sebesar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah yang diberikan pada tahun kedua pendampingan di masing-masing desa sasaran.

Besaran modal yang diberikan kepada Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sudah berdasarkan kalkulasi. Kalkulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya ada dua hal yaitu (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan (2) asumsi bahwa setiap

anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) setidaknya bisa memiliki modal untuk memutar usahanya selama tiga hari. Selain itu, pada masa awal pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) juga sudah diberikan bantuan modal awal dari hasil penyisihan honor pelatihan yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan seluruh anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan permodalan ini dengan dua tujuan yaitu (1) membantu mempermudah mendapatkan modal usaha serta (2) menghilangkan ketergantungan pada reternir, bank harian atau bank *plecit* yang banyak beredar di pedesaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan arahan terkait penggunaan permodalan ini ada dua hal yaitu (1) untuk syarat peminjam merupakan anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dan tanpa agunan dan (2) untuk jasa tidak boleh ditarik lebih dari satu persen. Untuk jasa satu persen itu arahnya juga dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) untuk penambahan modal dan (2) untuk keperluan organisasi misalnya membeli seragam atau mengadakan pelatihan sendiri.

Bantuan permodalan yang diberikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sudah tepat. Hal ini merujuk pada hasil penelitian Putri Pangestika, dan Imam Santoso, dan Retno Astuti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Dukungan Kucuran Kredit (Studi Kasus: UMKM Kabupaten XYZ)." Hasil penelitian

menunjukkan bahwa bantuan kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten XYZ mampu meningkatkan produksi yang berujung pada peningkatan yang signifikan pada omset penjualan dan keuntungan usaha.

Juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Susmita Chatterjee, dan Sangita Dutta Gupta dan Parijat Upadhyay (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Empowering Women And Stimulating Development At Bottom Of Pyramid Through Micro Entrepreneurship". Penelitian dilakukan di India pada Program Self-help Groups (SHGs), dimana program ini adalah sebuah organisasi perempuan yang terdiri dari 10-20 anggota perempuan desa yang menumbuhkembangkan kebiasaan menabung dan diberikan akses ke kredit untuk memberikan dorongan kepada para anggotanya mendirikan usaha mikro mereka sendiri dengan bantuan kredit tersebut. Penelitian ini menyatakan bahwa perempuan merupakan salah satu pendorong pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan bahwa perempuan jika mulai memiliki penghasilan, maka mereka akan membelanjakan uangnya untuk pendidikan anak-anak dan kesejahteraan mereka.

Selanjutnya dengan mengacu pada pendapat Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo (2015:110) bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi usaha, salah satu faktor penunjang yang cukup penting adalah ketersediaan modal yang memadai. Selama ini usaha mikro kecil masih memandang bank sebagai institusi yang tidak mudah dijangkau dan sulit diakses. Hal ini dikarenakan usaha mikro seringkali tidak mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknis dari perbankan. Maka, upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam memberikan permodalan kepada seluruh Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) melalui skema dana hibah sudah tepat dilakukan.

3.2 Permodalan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri dalam Perspektif Undang-Undang Desa

Pada tahun 2014 terjadi momentum perubahan bagi desa yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menempatkan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan namun memberikan modal bagi desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini merujuk pada dua asas utama dari tiga belas asas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pengaturan desa berdasarkan rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Pengaturan desa berdasarkan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Kewenangan merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri diatur dalam Pasal 19 penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

"Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari kewenangan desa di atas menunjukkan bahwa posisi desa selanjutnya bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa (Silahuddin, 2015:11).

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini ternyata menjadi satu nafas dengan visi dan misi presiden periode tahun 2014-2019 yang dikenal dengan Nawa Cita dimana pada Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Kurniawan, 2015:11). Maka, posisi desa selanjutnya selain diperkuat kewenangannya dalam mengatur rumah tangganya sendiri, juga diberikan penguatan dalam hal sumber-sumber pendapatannya.

Sumber-sumber pendapatan bagi desa selanjutnya menjadi lebih beragam sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini tercantum pada Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

"Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah."

Dari tujuh sumber pendapatan desa yang paling menarik adalah adanya alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Negara yang kemudian dikenal dengan dana desa. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana desa adalah :

"Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".

Mengacu pada dana desa dan enam sumber pendapatan lainnya bagi desa menunjukkan bahwa desa saat ini memiliki keleluasaan di dalam sumber-sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun dan memajukan desanya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan momentum bagi lembaga kemasyarakatan desa untuk lebih memberdayakan masyarakat desa. Salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang ada di delapan puluh tiga desa di Daerah istimewa Yogyakarta saat ini adalah Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Pengakuan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa tercermin dalam pembentukannya Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang telah dilengkapi dengan surat keputusan kepala Desa (DP3AP2 DIY, 2019:8).

Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) selanjutnya dalam pengembangannya memiliki peluang tidak lagi bergantung pada bantuan provinsi

dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan dengan adanya dana desa bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa :

"Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa".

Kemudian pada Pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa :

"Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan d. peningkatan pelayanan publik".

Dari dua pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam pengembangannya untuk mendapatkan pembiayaan dari desa melalui alokasi dana desa terbuka lebar. Hal ini mengingat tujuan pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) selaras dengan manfaat penggunaan dana desa yaitu untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulan kemiskinan.

Kegiatan-kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang dapat dibiayai oleh dana desa mengacu pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti pemberian modal, pengadaan pelatihan ketrampilan usaha maupun pemberian sarana penunjang usaha. Ketiga hal tersebut diuraikan dalam Pasal 6 ayat 3 poin d berikut ini :

"Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk : d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin".

Dan juga pada Pasal 8 ayat 1 poin c berikut ini :

"Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi: usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen".

Dari uraian di atas, untuk pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa. Pertama, hal ini mengacu pada kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam hal ini mengatur pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Kedua, juga memberikan ruang bagi alokasi dana desa agar tidak monoton sebagian besar hanya untuk alokasi infrastruktur. Maka, Ketugasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya adalah menjembatani komunikasi pengurus Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan pemerintah desa dan atau memberikan fasilitasi pendampingan kepada Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) agar lebih mudah di dalam mengakses dana desa.

4. Manajemen

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan ketidakstabilan nilai mata uang, peningkatan inflasi, peningkatan suku bunga dan kelangkaan bahan baku produksi menjadi faktor-faktor pendorong

usaha-usaha berskala besar ambruk. Di sisi lain, dalam masa itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah justru bisa bertahan dari krisis. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu berperan sebagai penyangga (*buffer*) dan katup pengaman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sector formal yang terkena dampak krisis. (Suyatna dalam Budiarto, dkk, 2015:5)

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemampuan untuk memberikan tanggapan yang cepat dan tepat pada setiap tantangan maupun isu yang dihadapi merupakan kunci keberhasilan untuk dapat bersaing. Kemampuan tersebut berkaitan erat dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang manajemen. (Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo, 2015:121) Merujuk hasil penelitian Lila Bismala (2016) yang berjudul "Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah" hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Model manajemen usaha ini mengadopsi dari manajemen perusahaan, yang bekerja pada aspek manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran.

Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan wadah perempuan pelaku usaha yang mayoritas usahanya merupakan industri rumah tangga. Sebagai industri rumah tangga menurut Santosa dalam Budiarto, dkk (2015:122) sebuah usaha kecil lahir dari sebuah usaha keluarga umumnya merupakan bagian dari upaya peningkatan pendapatan keluarga. Maka, gaya manajemennya diwarnai gaya manajemen rumah tangga. Maka, berdasarkan

hasil penelitian pada aspek manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bekal pelatihan dasar-dasar manajemen organisasi. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan manajemen berorganisasi dan manajemen pembukuan.

Berdasarkan uraian di atas, merujuk pada pendapat Budiarto, Saptoadi, Ridwan dan Susilo (2015:121) bahwa aspek manajemen perlu diberikan pada kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena manajemen merupakan kunci keberhasilan untuk dapat menjalankan organisasi dan menghadapi setiap tantangan. Manajemen yang dimaksud mencakup manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen, informasi maupun kemampuan mengelola sumber daya manusia. Maka, upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan materi pelatihan manajemen yang bersifat mendasar sudah tepat. Apalagi mengingat organisasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan organisasi yang masih sederhana.

Upaya lain yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perubahan manajemen kepemimpinan. Dalam struktur organisasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) juga memiliki ketua, sekretaris dan bendahara. Posisi ketua biasanya memiliki posisi strategis karena tidak sekedar menjadi pemimpin namun juga bisa menjadi motivator atau inspirasi bagi anggota lainnya. Maka, beberapa tahun terakhir ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

membuat kebijakan untuk memasukan perempuan pelaku usaha menengah untuk menjadi bagian dari anggota Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Hal ini selaras dengan pendapat Santosa (2013) dalam Budiarto, dkk (2015:122) bahwa seorang pemimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap anggotanya. Seorang pemimpin tidak sekedar memiliki karisma dan menjadi panutan bagi anggotanya. Di sisi lain pemimpin juga bisa menjadi *inspirational motivation* yaitu pemimpin yang mampu menanamkan visi yang inspiratif, pembangkit semangat, *team work* dan optimisme diantara anggotanya.

5.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta

5.2.2.1 Faktor Pendukung

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil tidaknya program perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian untuk perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat pengaruh lingkungan dari luar dan dari dalam. Pertama, faktor lingkungan dari luar yaitu adanya kebijakan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2008 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *pilot project* kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) untuk mengurangi kemiskinan. Faktor lingkungan dari luar ini menunjukkan fokusnya pada faktor ekonomi. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara

berkembang prioritas terhadap pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus utama pembangunan.

Kedua, faktor dari dalam adalah kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkomitmen tetap meneruskan kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang berasal dari pusat. Komitmen ini dilatar belakangi kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) secara konseptual bagus dan mampu menunjukkan hasil dalam membantu mengurangi kemiskinan. Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang tinggi. Pada data yang terbaru yaitu tahun 2018, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta angka kemiskinannya pada angka 11,81 % dan angka kemiskinan Nasional pada angka 9,66%. (BPS, 2019). Untuk Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 pada angka 0.422 dan Gini Ratio Nasional tahun 2018 pada angka 0.384. (BPS Provinsi DIY, 2019). Maka, kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) merupakan salah satu kegiatan yang diandalkan untuk mengurangi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan perempuan.

Merujuk pendapat Riyadi dan Bratakusuma (2003:16) bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu program perencanaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusuma (2003:16) menjelaskan bahwa faktor lingkungan bisa terbagi menjadi dua yaitu (1) faktor lingkungan dari luar seperti pengaruh dari lingkup nasional dan (2) faktor dari dalam yaitu dari kondisi internal daerah rencana itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk Riyadi dan Bratakusuma di atas, maka faktor lingkungan dapat disimpulkan menjadi faktor pendukung

perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Faktor Sistem yang Digunakan

Menurut Riyadi dan Bratakusuma (2003:30) sistem perencanaan merupakan aturan atau kebijakan yang digunakan suatu daerah sebagai dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian untuk perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta didukung sistem yang sudah baik. Dalam sistem perencanaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menggunakan sebuah inovasi yaitu *cascade* atau dikenal juga sebagai pohon kinerja. *Cascade* merupakan suatu kerangka logis dari proses perencanaan yang di dalamnya memuat visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan dan sasaran sampai program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah termasuk rincian indikator-indikatornya.

Selain *cascade* dalam perencanaan, pada proses penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta format kegiatannya harus mengacu pada Standar Belanja Umum (SBU) dan Standar Belanja Khusus (SBK) yang telah ditetapkan. Untuk rincian per item sudah disusun sebuah Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya. Adanya sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti ini, terbukti sangat membantu tugas para perencana di dalam menerjemahkan kebijakan, arahan dari pimpinan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Merujuk Riyadi dan Bratakusuma (2003:30) bahwa sistem yang digunakan dalam perencanaan bisa menyangkut masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan dan sebagainya. Prosedur perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh ini sudah tertata dengan baik. Artinya dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) juga telah mengikuti prosedur perencanaan yang berlaku tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk Riyadi dan Bratakusuma di atas, maka faktor sistem yang digunakan dapat disimpulkan menjadi faktor pendukung perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan ilmu dan teknologi sangat membantu dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inovasi teknologi dalam perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah memiliki inovasi dalam perencanaan daerah yang berbasis teknologi atau lebih dikenal dengan *E-Planning* yang dinamakan Jogja Plan. Jogja Plan merupakan aplikasi untuk menyusun perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat diakses semua orang. Jogja Plan merupakan komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keterbukaan informasi.

Untuk penyusunan penganggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD). Payung hukumnya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 yang dinyatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah suatu sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adanya dua inovasi teknologi Jogja Plan dan SIPKD cukup membantu di dalam menyusun maupun mengontrol kesesuaian antara perencanaan dan penganggarnya. Bagi perencana di dalam menyusun penganggaran pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta juga lebih mudah karena hanya menyusun dokumen Rencana Kerja dan Penganggaran dalam bentuk *excel*. Tugas mengupload dokumen Rencana Kerja dan Penganggaran ke SIPKD selanjutnya menjadi tugas dari Subbag Program. Kondisi tersebut artinya selaras dengan pendapat Riyadi dan Bratakusuma (2003:36) bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, teknologi dan informasi dapat mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan suatu daerah. Faktor terpenting adalah sejauhmana sumber daya manusia perencananya mampu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi secara optimal untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk Riyadi dan Bratakusuma di atas, maka faktor

perkembangan teknologi dan informasi dapat disimpulkan menjadi faktor pendukung perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Faktor Pendanaan

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu umumnya satu tahun. Kebijakan anggaran tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan. Anggaran merupakan instrumen utama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. (Nurkholis dan Khusaini, 2019:4-5).

Anggaran menjadi penting karena menurut Nurkholis dan Khusaini(2019:65) ada tiga alasan yaitu :

- (1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas;
- (3) Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Maka tak mengherankan apabila Riyadi dan Bratakusumah (2003:38) kemudian memasukan faktor pendanaan sebagai faktor pendukung pada satu sisi dan di sisi lain juga bisa menjadi faktor penghambat dalam sebuah perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor pendanaan dalam perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh ini bukan menjadi masalah. Indikasinya, selama sepuluh tahun ini anggaran untuk kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung selalu naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengecekan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa total anggarannya selalu naik. Pada tahun anggaran 2017 anggarannya sebesar Rp.540.324.000,00. Untuk tahun anggaran 2018 anggarannya sebesar Rp 885.102.000,00 dan untuk tahun anggaran 2019 anggarannya sebesar 1.308.721.000,00.

Anggaran yang besar untuk kegiatan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mencapai tujuannya yaitu mengurangi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan perempuan. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, strategi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten,

lengkap, partisipatif, dan inovatif dengan memunculkan skema tematik yang terdiri dari :

"Empat tema yang terdiri dari (1) tematik pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan, (2) pengurangan ketimpangan wilayah, (3) respon terhadap pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan (4) pembiayaan pembangunan non pemerintah."(Bappeda, 2017)

Dengan anggaran yang besar dan selalu naik, membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kesulitan di dalam mencapai target kinerja setiap tahunnya.

Hal ini selaras dengan pendapat pendapat Riyadi dan Bratakusuma (2003:38-39) faktor pendanaan merupakan faktor yang sudah *given* artinya bahwa hal tersebut harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Dalam pelaksanaannya, perencana harus benar-benar fokus, teliti dan punya komitmen terhadap tugasnya serta tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk Riyadi dan Bratakusuma di atas, maka faktor pendanaan dapat disimpulkan menjadi faktor pendukung perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2.2.2 Faktor Penghambat

1. Faktor sumber daya manusia perencana

Sumber daya manusia perencana merupakan faktor utama yang menggerakkan pelaksanaan perencanaan. Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas. (Riyadi dan Bratakusuma, 2003:25). Sampai saat ini masih dirasakan kelemahan teknis yang terdapat pada perencanaan pembangunan adalah sumber daya perencana. Aparatur yang ada umumnya adalah tenaga

administrasi yang kebanyakan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang perencanaan pembangunan. Akibatnya, kualitas dan kelayakan dokumen perencanaan jauh dari ideal.(Sjahfrizal, 2017:142-143).

Idealnya dalam setiap organisasi perangkat daerah memiliki staf perencana. Staf perencana sebenarnya merupakan jabatan fungsional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas 3 jabatan yaitu (1) Jabatan Administrasi, (2) Jabatan Fungsional, dan (3) Jabatan Pimpinan Tinggi. Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa jabatan fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional perencana atau yang selanjutnya disebut sebagai perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas pokok diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat untuk menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan dan berkedudukan di lingkungan instansi pemerintah.(Sjahfrizal, 2017:142-146).

Sayangnya implementasi tugas perencanaan oleh jabatan fungsional perencana di lingkungan pemerintah daerah masih belum optimal bahkan di organisasi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sekalipun. Hal ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Wati (2017) yang berjudul "Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu: Studi Kasus Pada Jabatan Peneliti Dan Perencana Di Bappeda Provinsi Bengkulu" Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan peneliti dan perencana belum dilakukan secara optimal melalui melibatkan dalam kegiatan kelitbang dan perencanaan. Komitmen pimpinan dan pejabat struktural lainnya belum memberi ruang bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat peneliti dan perencana. Dari penelitian ini

bisa menggambarkan situasi perencana di pemerintah daerah. Jika di Bappeda saja masih belum optimal, apalagi di organisasi perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kegiatan perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi motor penggerak adalah staf perencana. Staf perencana inilah yang menerjemahkan arahan kebijakan dari kepala Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan rencana-rencana yang bersifat teknis dari Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat antara lain kode rekening, uraian kegiatan, volume, harga satuan sampai jumlah anggaran atau yang lebih dikenal dengan nama dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Sayangnya mulai tahun ini, perencana pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG menjadi kendala utama. Hal ini karena adanya perubahan kelembagaan di awal tahun 2019 yang diikuti mutasi para staf serta adanya staf yang memasuki masa pensiun. Praktis, saat ini yang membantu bukan perencana namun jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang diperbantukan menjadi staf pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG. Kondisi ini menjadi tidak ideal di dalam mendukung perencanaan. Karena fungsional penggerak swadaya masyarakat tugas dan fungsinya adalah melatih dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Merujuk pendapat Riyadi dan Bratakusuma (2003:26) bahwa seorang perencana pembangunan pun dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan luas yang jauh ke depan serta harus memiliki kemampuan yang bersifat multidisipliner dan intersektoral serta selalu mengupdate wawasan serta

mengembangkan kemampuan sesuai dinamika pembangunan daerah. Maka, situasi yang dihadapi Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG dalam kekurangan staf perencana menjadi jauh dari kata ideal. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk Riyadi dan Bratakusuma di atas, maka faktor sumber daya manusia perencana dapat disimpulkan menjadi faktor penghambat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Berangkat dari kasus Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) maka perencanaan pemberdayaan perempuan menjadi tidak mudah dilakukan jika tidak menggunakan basis data dan pendekatan partisipatif.
2. Perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terlihat sebagai rutinitas. Hal ini dapat terjadi karena perencanaannya lebih menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis daripada perencanaan partisipatif.
 - a. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dari empat unsur perencanaan yang terdiri dari :
 - 1) sumber masalah berbasis data, ternyata untuk unsur ini belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan data profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini belum ada;
 - 2) tujuan perencanaan, unsur ini sudah terpenuhi karena tujuan perencanaannya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) program yang dikembangkan, unsur ini sudah terpenuhi karena program diturunkan dari visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mencapai kualitas hidup masyarakat Yogyakarta melalui program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4) Identifikasi aktor-aktor, unsur ini terpenuhi karena sebagai perencanaan teknokratik di dalam implementasi perencanaannya sudah melibatkan aktor-aktor terdiri dari Dinas P3AP2 DIY, Bappeda dan Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Hasil penelitian lapangan menunjukkan aspek pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) telah dilakukan sebagai berikut :

- 1) aspek pemasaran, sudah dilakukan meski baru menyentuh pada aspek peningkatan informasi pasar melalui kegiatan pameran dan publikasi di media cetak dan televisi. Masih diperlukan kegiatan baru untuk aspek pengembangan atau perluasan konsumen sasaran.
- 2) aspek teknologi dan inovasi, sudah dilakukan dengan memberikan pelatihan inovasi untuk kemasan (*packaging*) dan pelatihan *higinies*. Sayangnya belum ada pengenalan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang terbukti cocok untuk usaha mikro;
- 3) aspek permodalan, sudah dilakukan dengan memberikan bantuan keuangan kepada masing-masing Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebesar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah melalui skema hibah pada tahun kedua pendampingan. Adanya dana desa juga memberikan peluang pengembangan dalam aspek permodalan;
- 4) aspek manajemen, sudah dilakukan dengan memberikan pelatihan manajemen organisasi dan inovasi dalam keanggotaan dengan memasukan perempuan pelaku usaha menengah sebagai ketua organisasi;

3. Untuk faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

a. Faktor pendukung terdiri empat hal yaitu :

- 1) faktor lingkungan, faktor dari luar berupa kebijakan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Untuk faktor dari dalam berupa kebijakan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkomitmen untuk terus mendanai kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) faktor sistem, sistem perencanaan yang digunakan sudah menggunakan *cascade* atau pohon kinerja dalam sistem perencanaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga mempermudah tugas para perencana;
- 3) faktor perkembangan ilmu dan teknologi, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki aplikasi perencanaan Jogja Plan dan aplikasi penganggaran SIPKD yang terbukti sangat membantu tugas para perencana;
- 4) faktor pendanaan, untuk pendanaan kegiatannya tidak mengalami hambatan karena komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada kegiatan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sehingga setiap tahun anggarannya selalu naik.

b. Faktor penghambatnya adalah faktor sumber daya manusia perencana. Hal ini dikarenakan pada seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan PUG saat ini tidak memiliki staf perencana, yang ada jabatan

fungsional penggerak swadaya masyarakat yang diperbantukan sebagai staf perencanaan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian pada penelitian ini, peneliti merasa perlu menyampaikan beberapa masukan untuk perbaikan pada perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun-tahun mendatang. Maka, masukan dari peneliti sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu perbaikan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan yang baik adalah yang berbasis data, maka hal yang mendesak saat ini adalah membuat data sekaligus klasifikasi profil Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketersediaan data profil tersebut juga akan mempermudah membuat *roadmap* pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun-tahun mendatang;
 - b. Aspek pengembangan pemasaran online melalui media sosial perlu dijadikan salah satu kegiatan di tahun mendatang. Hal ini mengingat pemasaran melalui media sosial selain sedang menjadi trend untuk saat ini juga secara biaya penyelenggaraan lebih murah daripada membuat pameran;
 - c. Untuk aspek permodalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta perlu

menjembatani komunikasi dengan pemerintah desa agar Desa PRIMA bisa difasilitasi melalui alokasi dana desa.

2. Faktor penghambat perencanaan pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak adanya sumber daya manusia perencana. Maka, sarannya adalah mengajukan formasi jabatan fungsional perencana pada Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri;
- Alves, Juvenal. 2015. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Penguatan Modal Usaha (Studi Kasus di Daerah Binaan Institute Pembinaan Pengembangan Kewirasusahaan di Distrik Ermera Timor Leste). Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang;
- Ammad Khan, Muhammad, dan Nazish Kanwal, dan Peer Ghulam Nabi, dan Ashfaq Ahmad Shah, 2016. "Empowering Women Entrepreneurs Through Microcredit: Assessing the Role of Sarhad Rural Support Program in Pakistan". *Jurnal : Journal Of Entrepreneurship, Management And Innovation* Vol 12 Issue 1, Hal 91-112, 2016;
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Bappeda DIY, 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Yogyakarta: Bappeda DIY;
- Bappeda DIY, 2019. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Performance Report) Tahun 2018. Yogyakarta: Bappeda DIY;
- Bismala, Lila, 2016. "Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah" *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016;
- BPS, 2019. "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018". Berita Resmi Statistik Nomor: 07/01/Th. XXII, 15 Januari 2019. Jakarta: BPS;
- BPS Provinsi DIY, 2019. "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta September 2018". Berita Resmi Statistik Nomor 11/02/34/Th.XXI, 1 Februari 2019. Yogyakarta:BPS Provinsi DIY;
- BPS Provinsi DIY, 2019. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2019. Yogyakarta:BPS Provinsi DIY;
- Bryson, John M. 2016. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization: A Guide for Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. Josey Bass Publisher. San Francisco. Penerjemah: M. Miftahudin, 2016. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Budiarto, dkk, 2015. *Pengembangan UMKM:Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;

- Chatterjee, Susmita dan Sangita Dutta Gupta dan Parijat Upadhyay, 2017. "Empowering Women And Stimulating Development At Bottom Of Pyramid Through Micro Entrepreneurship". *Journal Management Decision*, Vol. 56 Issue: 1, pp.160-174;
- Convers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Dinas Kebudayaan DIY, 2018. *Kajian Desa Mandiri Budaya*. Yogyakarta:Dinas Kebudayaan DIY;
- DP3AP2 DIY, 2019. *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019*. Yogyakarta: DP3AP2 DIY;
- DP3AP2 DIY, 2019. *Buku Pedoman Desa Prima*. Yogyakarta: DP3AP2 DIY;
- DP3AP2 DIY, 2019. *Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022*. Yogyakarta: DP3AP2 DIY;
- DPR RI, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta ;
- Fakih, Mansour, 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cetakan Keempat belas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Firmansyah, Anang, 2019. *Pemasaran:Dasar dan Konsep*. Pasuruan: Qiara Media
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan;
- Handayani, Trisakti, dan Sugiarti, 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang:UMM Pess;
- Haryanto, Agus Tri, 2018. "130 Juta Orang Indoensia Tercatat Aktif di Medsos". Melalui <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos>. Diakses 10 November 2019 ;
- Hasibuan, Malayu SP, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Cetakan Ketujuh Belas*. Jakarta: Remaja Rosdakarya;
- Hubeis, Aida Vitayala, 2016. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa Cetakan Ketiga*. Bogor:IPB Press;
- Jamaludin, Fauzan, 2019. "Data adalah Jenis kekayaan baru bangsa kita". Melalui <https://www.merdeka.com/teknologi/jokowi-data-adalah-jenis-kekayaan-baru-bangsa-kita.html>. Diakses 25 Agustus 2019;
- Jamilah, Irwani, dan Erlina, dan Rujiman, 2016. "Pengaruh Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) Terhadap

Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Serdang Bedagai", *Jurnal Ekonom*, Vol 19, No 1, Januari 2016;

KemenPPPA, 2012. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Kemenkeu, 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta;

Kompas.com, 2019. "Mengapa Masih Banyak UMKM Indonesia yang Belum Go Digital?". melalui: <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/12/152246426/mengapa-masih-banyak-umkm-indonesia-yang-belum-go-digital>. Diakses pada Tanggal 30 Mei 2019;

Kuncoro, Mudrajad, 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama;

Kurniawan, Borni, 2015. *Buku 5: Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta:KemenDesa PDTT;

Kusnadi, 2015. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir: Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut*. Yogyakarta: Graha Ilmu;

Maharini, Murti, 2018. *Evaluasi Dampak Program Desa Prima Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Thesis Magister, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta;

Mahi, Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso, 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana;

Mangkuprawira, Sjafriz, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Bogor: Ghalia Indonesia:

Manzilati, Asfi, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press;

Marmoah, Sri, 2014. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. Yogyakarta: CV Budi Utama;

Menteri Dalam Negeri, 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang*

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Jakarta;

Menteri Desa PDTT, 2017. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Jakarta;*

Menteri Desa PDTT, 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Jakarta;*

Mindarti, Lely Indah. 2016. *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press;

Moleong, Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;

Mufidah, 2009. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan*. Malang: UIN Malang Press;

Nugroho, Riant, 2011. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia Cetakan II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Nurkholis dan Khusaini, 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press

Pangestika, Putri dan Imam Santoso, dan Retno Astuti, 2016. "Strategi Pengembangan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Dukungan Kucuran Kredit (Studi Kasus: UMKM Kabupaten XYZ)". *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016, Hal. 84-95 ISSN 2252-7877 E-ISSN 2549-3892;

Rakicevic, Zoran dan Bijelovic, Jasmina Omerbegovic dan Cvetkovic, Danica Lecic, 2015 "A model for effective planning of SME support services". *Evaluation and Program Planning*, Vol. 54, February 2016;

Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta;*

Rusland, Herani dan Aziz, Abdul, 2009. *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Bank Indonesia;

Shinta, Agustina, 2011. *Manajemen Pemasaran*. Malang: Universitas Brawijaya Press;

Silahuddin, 2015. *Buku 1: Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta:KemenDesaPDTT;

- Sjafrizal, 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Cetakan Keempat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada;
- Sudarsana, Nugraha Utama, 2015. "Perencanaan Partisipatif Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan". *Reformasi:Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015, ISSN 2407-6864;
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Ketiga*. Bandung: CV Alfabeta;
- Sutrisno, Dadan dan Agus Suryono, dan Abdullah Said, 2016. "Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)". *Jurnal Wacana*, Volume 19, Nomor 2 Tahun 2016, ISSN : 1411-0199 E-ISSN : 2338-1884;
- Suryono, Agus, 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan, Cetakan Pertama*. Malang: Universitas Brawijaya Press;
- Syamsi, Ibnu, 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan Pemrograman Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta:Rajawali;
- Timothy, James, 2010. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta:PT Toko Gunung Agung;
- Wati, Rahmi, 2017. "Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu: Studi Kasus Pada Jabatan Peneliti Dan Perencana Di Bappeda Provinsi Bengkulu." *Jurnal Civil Service*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2017.
- Winarno, Budi, 2013. *Etika Pembangunan*. Jakarta:PT Buku Seru;
- Yin, Robert K, 2018. *Studi Kasus:Desain dan Metode*. Depok:Rajawali Press;
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat:Wacana & Praktik Cetakan 1*. Jakarta: Kencana;
- Zulyanto, Aan, dan Astrid Amalia Noeraini, dan Lilis Siti Badriah, dan Navik Istikomah, 2014. *Pencapaian MGDs di Indonesia*. Bandung:Unpad Press.



Panduan Wawancara

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Pewawancara : Kuntarta

Pertanyaan :

A. Pengantar

1. Bagaimanakah awal mula pelaksanaan Program Desa PRIMA di DIY?

B. Substansi

1. Dalam perencanaan ada unsur data sebagai basis perencanaan. Bagaimanakah penggunaan data dalam perencanaan pengembangan Desa PRIMA di DIY ?
2. Apakah yang menjadi tujuan perencanaan pengembangan Desa PRIMA di DIY?
3. Untuk program yang menaungi Desa PRIMA, bagaimanakah proses pengembangannya ?
4. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan pengembangan Desa PRIMA di DIY? Dan apa perannya masing-masing?
5. Untuk aspek-aspek pengembangan Desa PRIMA di DIY, kegiatan pengembangan apa saja yang dilakukan pada aspek :
 - a. Pemasaran ?
 - 1) Bagaimanakah konsep pengembangan pemasarannya?
 - 2) Apa tujuan yang ingin dicapai?
 - 3) Kegiatannya diberikan pada tahun keberapa?
 - b. Teknologi dan Inovasi ?
 - 1) Bagaimanakah konsep kegiatan pengembangan teknologi dan informasi?
 - 2) Apa tujuan yang ingin dicapai?
 - 3) Kegiatannya diberikan pada tahun keberapa ?
 - c. Permodalan ?
 - 1) Bagaimanakah konsep pemberian permodalannya?
 - 2) Apa tujuan pemberian permodalan tersebut?

- 3) Bagaimanakah mekanisme penyalurannya?
- d. Manajemen
 - 1) Bagaimanakah konsep kegiatan pengembangan manajemen ?
 - 2) Apa tujuan pengembangan manajemen ?
 - 3) Keegiatannya diberikan pada tahun keberapa?
6. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengembangan Desa PRIMA pada faktor :
 - a. Lingkungan
 - b. Sistem yang digunakan
 - c. Perkembangan ilmu dan teknologi
 - d. Pendanaan
 - e. Sumber daya manusia perencana



Panduan Wawancara

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Pewawancara : Kuntarta

Pertanyaan :

A. Pengantar

1. Bagaimanakah tanggapan Kabupaten terhadap kegiatan Desa PRIMA yang dilakukan oleh provinsi di Kabupaten ini ?

B. Substansi

1. Dalam aspek perencanaan ada unsur data. Bagaimanakah ketersediaan Data Desa PRIMA di Kabupaten? Apakah ketersediaan Data Desa PRIMA di Kabupaten dimanfaatkan dalam perencanaan pengembangan Desa PRIMA di level Kabupaten ?
2. Dalam konteks perencanaan pengembangan Desa PRIMA di tingkat Provinsi, apakah Kabupaten dilibatkan? Apa saja peran kabupaten dalam perencanaan tersebut?
3. Untuk aspek-aspek pengembangan Desa PRIMA yang dilakukan oleh Provinsi apakah kabupaten memberikan masukan kepada provinsi?
4. Secara umum kegiatan pembentukan dan pengembangan Desa PRIMA dilakukan oleh Provinsi dalam hal ini oleh Dinas P3AP2 DIY. Apakah dari Kabupaten ada inisiatif sendiri melakukan pengembangan Desa PRIMA di kabupaten ini?

Panduan Wawancara

Instansi : Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pewawancara : Kuntarta

Pertanyaan :

A. Pengantar

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Desa PRIMA dalam mendukung Visi Misi Gubernur ?

B. Substansi

1. Apakah ketersediaan data menjadi dasar dalam proses perencanaan di lingkungan Pemda DIY ?
2. Bagaimanakah penggunaan data dalam perencanaan pengembangan Desa PRIMA di DIY ?
3. Apakah yang menjadi tujuan perencanaan pengembangan Desa PRIMA di DIY?
4. Bagaimanakah peran Bappeda dalam perencanaan pengembangan Desa PRIMA di DIY?
5. Untuk aspek-aspek pengembangan Desa PRIMA apakah ada keterlibatan dari Bappeda kepada Dinas P3AP2 DIY ?
6. Bagaimanakah sistem yang digunakan dalam proses perencanaan di lingkungan Pemda DIY ?
7. Bagaimanakah faktor pendanaan dalam perencanaan pengembangan Desa PRIMA di DIY ?